

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA PENINGKATAN
CAPAIAN KESERTAAN KB PRIA DI KAWASAN PESISIR
KABUPATEN PEKALONGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SETYA RINI

NIM. 500833644

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017**

ABSTRAK**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DALAM UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB PRIA
DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN PEKALONGAN**

Setya Rini

setyarini1984@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tidak dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh penyelenggara program dan terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya capaian kesertaan KB Pria di Kawasan tersebut. Faktor yang menghambat implementasi dari sisi kelompok sasaran adalah budaya yang berlaku di kelompok sasaran bahwa KB adalah urusan wanita. Selain itu sikap tidak mendukung terhadap Program KB disebabkan oleh informasi negatif mengenai kontrasepsi pria. Sedangkan penghambat dari sisi implementor adalah minimnya sosialisasi tentang KB Pria, tidak adanya pendekatan dengan kelompok ataupun tokoh informal serta tidak aktifnya pembinaan kepada kelompok "Prio Utomo". Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab rendahnya capaian kesertaan KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto tidak hanya disebabkan oleh kondisi kelompok sasaran namun disebabkan pula oleh rendahnya komitmen implementor terhadap pelaksanaan program. Saran yang dapat diajukan adalah meningkatkan kegiatan penyuluhan KB Pria secara komprehensif terhadap kelompok sasaran.

Kata Kunci : Budaya, Implementasi, Penyuluhan, Program KB Pria, Sikap.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF FAMILY PLANNING PROGRAM POLICY IN AN EFFORT TO INCREASE THE ACHIEVEMENT OF MALE PARTICIPATION ON FAMILY PLANNING IN COASTAL AREA OF PEKALONGAN

Setya Rini

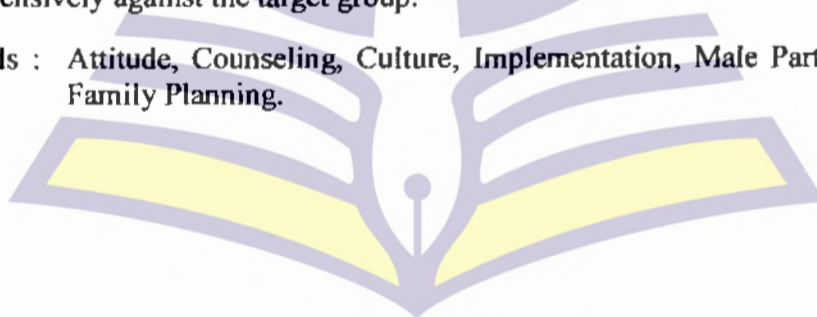
setyarini1984@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

The aim of this research is to find out how to implement Male Participation on Family Planning Program in Coastal Area of Wonokerto and to identify the factors that influence the implementation. The method that used in this research is done qualitatively with phenomenological approach. The results notes that the implementation is not executed in accordance with the guidelines and there are several hinder factors that cause low achievement of male participation in that area. The hinder factors of the implementation through the target group is "perception culture". They think that Family Planning is women's affair. In addition, the attitude of not supporting the Family Planning Program is caused by negative information about male contraception. While the obstacles from the implementor side is the lack of socialization about Male Participation on Family Planning, the lack of approach with the target group or informal leaders and the inactivity of the guidance to the group "Prio Utomo". The conclusion is that the factors causing the low achievement of male participation on family planning in that area not only caused by the condition of the target group but also due to the low commitment of the implementor to that program. Suggestions that can be proposed is to improve the counseling of that program comprehensively against the target group.

Keywords : Attitude, Counseling, Culture, Implementation, Male Participation on Family Planning.



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB PRIA DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN PEKALONGAN adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang, 16 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Setya Rini)

NIM. 500833644

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL

Judul Artikel : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DALAM UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN
KESERTAAN KB PRIA DI KAWASAN PESISIR
KABUPATEN PEKALONGAN

Penulis Artikel : SETYA RINI

N I M : 500833644

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Hari / Tanggal : Minggu, 16 Juli 2017

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Warsito Kawedar, M.Si., Akt.
NIP. 19740510 199802 1 001

Pembimbing II,



Dr. Tita Rosita, M.Pd.
NIP. 19601003 198601 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA : SETYA RINI
NIM : 500833644
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA
PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB
PRIA DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN
PEKALONGAN

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 16 Juli 2017

Waktu : Pukul 13.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS.

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Dr. Tita Rosita, M.Pd.

Penguji Ahli :
Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc

Pembimbing I :
Dr. Warsito Kawedar, M.Si, Akt.

Pembimbing II :
Dr. Tita Rosita, M.Pd.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA
PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB
PRIA DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN
PEKALONGAN

NAMA : SETYA RINI

NIM : 500833644

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Warsito Kawedar, M.Si., Akt.
NIP. 19740510 199802 1 001

Pembimbing II



Dr. Tita Rosita, M.Pd.
NIP. 19601003 198601 2 001

Penguji Ahli



Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc
NIP. 19570302 198807 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program MAP


Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan TAPM dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB PRIA DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN PEKALONGAN” sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

TAPM ini disusun agar pembaca dapat memahami bahwa Program Keluarga Berencana yang telah berjalan di Indonesia bukan saja tanggung jawab wanita sebagai istri. Para pria atau suami sebagai kepala keluarga diharapkan mampu lebih berperan aktif dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana ini melalui partisipasinya dalam penggunaan alat kontrasepsi pria.

Dalam penyusunan TAPM ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan, dorongan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan hingga tahap akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D dan Staf yang mendukung pemberian beasiswa pendidikan S2 bagi Penyuluh Keluarga Berencana.
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

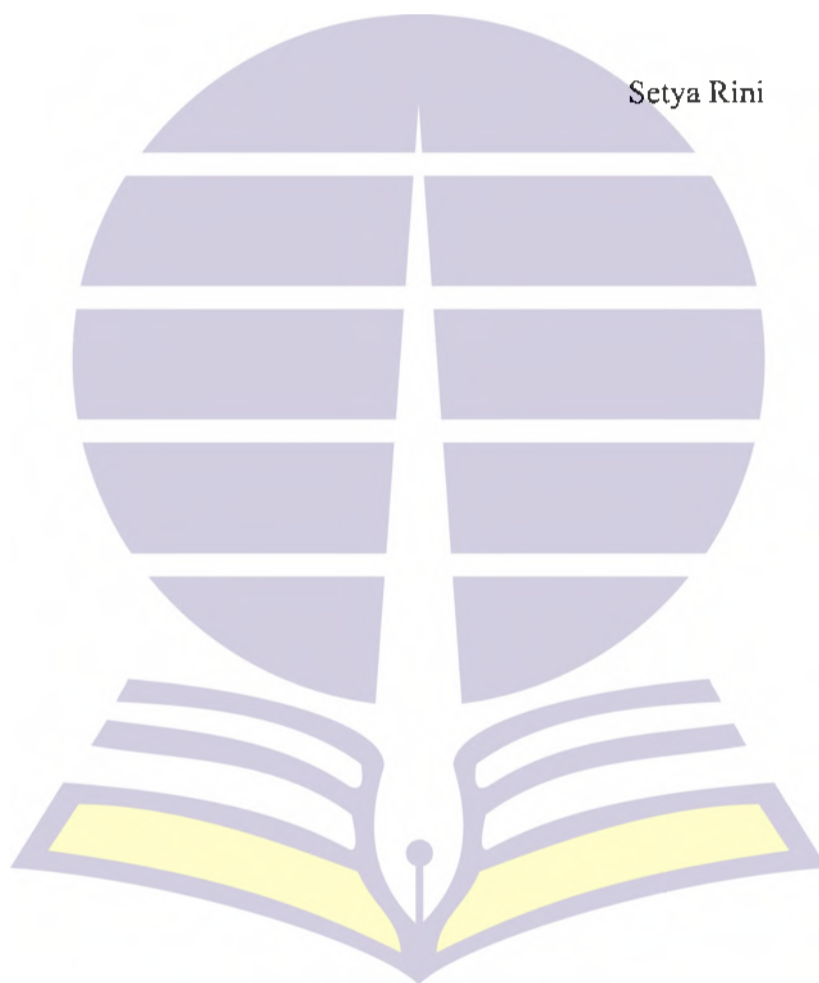
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed., selaku Ketua Bidang Ilmu / Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
4. Bapak Dr. Warsito Kawedar, M.Si, Akt dan Ibu Dr. Tita Rosita, M.Pd selaku Pembimbing 1 dan 2 yang telah begitu baik dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran demi mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini.
5. Bapak Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc selaku penguji ahli dalam ujian sidang TAPM.
6. Ibu Dra. Binti Muflikhah, M.Hum yang telah membantu proses studi S2 di UPBJJ Semarang.
7. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu, Abi, Mia, Kiran, Tata dan seluruh keluarga besar yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini sampai akhir. Semua pencapaian saya selama ini akan saya persembahkan untuk kalian.
8. Ibu Susi, Ibu Titin dan Para SKD Kecamatan Wonokerto yang telah memberikan banyak bantuan sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.
9. Teman-teman seperjuangan dalam studi S2 beasiswa BKKBN, terimakasih atas pertemanan kita dan semoga kita bisa menjadi Penyuluh Keluarga Berencana yang lebih baik lagi.
10. Teman-teman tercinta, Dina, Risky, Fita, Hanum dan Nanik yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga semua ini dapat saya lalui dengan baik.

11. Teman masa kecilku, Khusnu yang telah memberikan kemudahan dalam peminjaman buku di perpustakaan, terimakasih dan maaf telah banyak saya repotkan.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, amin.

Penulis,

Setya Rini



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	15
1. Kebijakan Publik	15
a. Pengertian Kebijakan Publik	15
b. Tahap-Tahap Dalam Perumusan Kebijakan Publik	17
2. Implementasi Kebijakan Publik	22
a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	23
b. Model Implementasi Kebijakan Publik	26
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Berfikir	45
D. Operasionalisasi Konsep	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	54
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	56
C. Instrumen Penelitian	57
D. Prosedur Pengumpulan Data	57
E. Metode Analisis Data	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	62
B. Hasil	76
C. Pembahasan	132

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	171
B. Saran	174

DAFTAR PUSTAKA	175
----------------------	-----

LAMPIRAN-I-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia, Indonesia memiliki urgensi dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 237,6 juta jiwa pada tahun 2010, melebihi 3,4 juta dari proyeksi sebesar 234,2 juta jiwa. Demikian juga untuk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) periode tahun 2000-2010 sebesar 1,49 persen meningkat dibanding LPP periode tahun 1990-2000 yaitu 1,45 persen (Witjaksono, 2012). Tentu saja hal ini membawa permasalahan serius yang harus dipikirkan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk akan menjadi beban pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan antara lain masalah pendidikan, masalah kesehatan serta masalah tingkat penghasilan atau pendapatan.

Sebenarnya Indonesia sudah pernah berhasil dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahun 1970-an hingga 1990-an dengan mengusung Program Keluarga Berencana. Laju Pertumbuhan Penduduk dapat ditekan dari 2,6% pada tahun 1970 menjadi 1,6% pada tahun 1996. Namun seiring dengan berakhirnya masa orde baru, Program Keluarga Berencana sudah tidak terdengar gaungnya. Pada waktu itu, keberhasilan program Keluarga Berencana sangat ditentukan pada aspek demografis yaitu

dengan tujuan untuk mengendalikan angka kelahiran. Selanjutnya pada tahun 1994, pasca ditandatanganinya *International Conference on Population and Development* (ICPD) di Cairo, telah terjadi pergeseran paradigma dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dari pendekatan demografis dan penurunan fertilitas menjadi lebih kearah pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender (Warta Keluarga Berencana, 2010).

Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009, melalui kebijakan Keluarga Berencana yang tertuang dalam pasal 20 dan 21, disebutkan bahwa Keluarga Berencana membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab melalui pengaturan usia ideal perkawinan; pengaturan usia ideal untuk melahirkan; penentuan jumlah ideal anak; penentuan jarak ideal kelahiran anak; dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Selanjutnya disebutkan pula bahwa tujuan Program Keluarga Berencana antara lain untuk mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian bayi, anak dan ibu; meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan dan konseling dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi; meningkatkan kesertaan dan partisipasi pria dalam ber KB; dan mempromosikan ASI dengan menjarangkan jarak kelahiran.

Berpijak pada era baru Program Keluarga Berencana yang lebih memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender serta salah satu tujuan dari program KB yang tertuang dalam UU No 52 Tahun 2009 tentang peningkatan kesertaan dan partisipasi pria dalam ber-KB hendaknya perlu

dilakukan reorientasi dan reposisi program secara menyeluruh dan terpadu. Reorientasi dimaksud terutama ditempuh dengan jalan menjamin kualitas dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang lebih baik serta menghargai dan melindungi hak-hak reproduksi yang menjadi bagian integral dari hak-hak azasi manusia yang bersifat universal. Prinsip pokok dalam mewujudkan keberhasilan program KB dimaksudkan adalah peningkatan kualitas di segala bentuk serta kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan serta peningkatan partisipasi pria (Warta Keluarga Berencana, 2010).

Dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria dimana dalam Pasal 1 Point 4 menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi pria adalah bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab para pria atau suami dalam pelaksanaan Program KB dan Kesehatan Reproduksi. Selanjutnya disebutkan bahwa hak reproduksi adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang kelas sosial, suku, umur dan agama mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai jumlah anak, jarak antara anak, serta menentukan kelahiran anak dan dimana akan melahirkan. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menekankan perlunya dilakukan perubahan atau penyerasian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 yang meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya (Witjaksono, 2012).

Telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pasal 159 menyebutkan bahwa Deputi Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Sedangkan organisasi di tingkat provinsi diatur oleh Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di provinsi dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan KKB (Witjaksono, 2012).

Menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut, maka disusunlah Sasaran Kerja Bidang KB dan KR Tahun 2012-2014 dimana pada point 7 disebutkan “Meningkatkan persentase peserta KB pria menjadi 5 persen pada tahun 2014” (Witjaksono, 2012). Namun kenyataan di lapangan pencapaian peserta KB pria masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Kemudian sasaran kerja diatas diperbaharui dengan Sasaran Strategis Kedeputian Bidang KB dan KR Tahun 2015-2019. Sasaran strategis yang disebut adalah “Meningkatnya Kesertaan ber-KB, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusunlah indikator keberhasilan program sebagai berikut :

1. Tercapainya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern sebesar 61,1% pada tahun 2019.
2. Tercapainya persentase sasaran kesertaan KB Pria sebesar 4,3% pada tahun 2019.
3. Tercapainya persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi sebesar 25% dari 291.536 sasaran pada tahun 2019.

Hal yang perlu dicermati dalam indikator sasaran strategis diatas adalah menurunnya target capaian kesertaan KB Pria dari 5% turun menjadi 4,3%. Padahal apabila dilihat dari angka perbandingan persentase capaian KB wanita, angka tersebut masih terbilang rendah. Namun apabila melihat kenyataan di lapangan, capaian kesertaan KB pria belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015, dalam pemakaian kontrasepsi modern, sebagian besar Pasangan Usia Subur peserta KB di Indonesia masih mengandalkan kontrasepsi Suntikan sebesar 59,57% dan Pil sebesar 20,71% dari total pengguna KB. Sedangkan persentase pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terbesar adalah pengguna IUD sebesar 7,30% dan Susuk KB (Implant) sebesar 6,21%. Adapun peserta KB Pria yang ada hanya mencapai sekitar 1,27% yang terdiri dari MOP sebesar 0,27% dan Kondom sebesar 1%.

Manuaba (1998:478) menyatakan bahwa dalam usaha meningkatkan gerakan Keluarga Bcrencana Nasional peranan pria sebenarnya sangat penting dan menentukan. Sebagai kepala keluarga pria merupakan tulang punggung keluarga dan selalu terlibat untuk mengambil keputusan tentang kesejahteraan keluarga, termasuk untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan. Dari

pengertian diatas terlihat bahwa kesertaan pria dalam ber-KB seharusnya lebih di prioritaskan. Namun selama ini banyak program terutama masalah kesehatan dan KB hanya memfokuskan pada wanita. Bahkan dalam RPJMN Kesehatan tahun 2015-2019 hanya menyebutkan peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia. Selain itu jenis alat kontrasepsi KB bagi pria sangatlah terbatas. Saat ini hanya tersedia Kondom dan Pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) atau yang lebih dikenal dengan sterilisasi pria atau Vasektomi. Inilah yang disinyalir menjadi penyebab rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB.

Menurut peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Issac Tri Oktaviatie, S. Ant, Msc. (2012), kurangnya promosi atau sosialisasi tentang KB Pria dikarenakan kebijakan KB di Indonesia yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan. Perempuan masih menjadi sasaran utama sosialisasi program KB dengan harapan istri yang akan mengkomunikasikan dan menegosiasikan pemakaian alat kontrasepsi kepada suaminya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta pria dan kesetaraan gender dalam konteks keluarga berencana karena tidak secara serius menjadikan pria sebagai target sasaran program KB (www.ugm.ac.id, diunduh pada 4 Februari 2016). Bahkan studi internasional yang melibatkan 450 wanita sepakat bahwa mereka mengharapkan pasangan laki-laki mereka untuk menganambil peran yang lebih aktif dalam penggunaan alat kontrasepsi (GJ Manetti dan SC Honig, 2010). Selain itu studi internasional yang dilakukan di India, menekankan bahwa kurangnya kesadaran dan kesalahpahaman menjadikan pria kurang mengambil peran dalam urusan kesehatan reproduksi. Untuk mengatasi isu gender ini

diperlukan perhatian yang mendesak dalam peningkatan partisipasi pria serta perlunya dilakukan perubahan pendekatan dalam Program Keluarga Berencana (Biradar, 2013).

Nampaknya, permasalahan rendahnya capaian kesertaan KB Pria telah menjadi permasalahan nasional. Hal serupa dirasakan pula oleh Kabupaten Pekalongan dimana pencapaian KB pria yang terdiri dari metode kontrasepsi KB MOP (Medis Operasi Pria) dan Kondom masih terbilang rendah. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini, keadaan pencapaian KB pria pada tahun 2014 dan 2015 rata-rata masih dibawah 5 persen.

TABEL. 1
PENCAPAIAN PA KB PRIA KAB. PEKALONGAN

NO	KECAMATAN	2014			2015		
		KB PRIA (MOP & KONDOM)	JML PA	% THD P PA	KB PRIA (MOP & KONDOM)	JML PA	% THD P PA
1	KANDANGSERANG	119	6395	1,86	116	6431	1,80
2	PANINGGARAN	159	7586	2,10	119	6277	1,90
3	LEBAKBARANG	125	2426	5,15	115	1914	6,01
4	PETUNGKRIONO	87	2219	3,92	67	2263	2,96
5	TALUN	146	5820	2,51	127	5630	2,26
6	DORO	203	6599	3,08	132	6464	2,04
7	KARANGANYAR	127	6891	1,84	113	5670	1,99
8	KAJEN	333	11231	2,97	291	11147	2,61
9	KESESI	251	12390	2,03	155	12058	1,29
10	SRAGI	156	10186	1,53	158	10421	1,52
11	BOJONG	258	11169	2,31	254	11606	2,19
12	WONOPRINGGO	365	6639	5,50	370	6689	5,53
13	KEDUNGWUNI	206	13280	1,55	228	13446	1,70
14	BUARAN	238	6210	3,83	206	5914	3,48
15	TIRTO	135	8793	1,54	145	8711	1,66
16	WIRADESA	149	8397	1,77	118	8085	1,46
17	SIWALAN	101	6654	1,52	131	6461	2,03

18	KARANGDADAP	174	5797	3,00	162	5864	2,76
19	WONOKERTO	86	7315	1,18	91	7304	1,25
JUMLAH		3418	145997	2,34	3098	142355	2,18

Sumber : Umpan balik Tk. Kab Th. 2014&2015

Dari tabel diatas terlihat dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan hanya ada dua kecamatan yang telah berhasil mencapai target hingga 5%. Kecamatan Wonokerto adalah kecamatan dengan pencapaian KB Pria terendah di Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Wonokerto merupakan kecamatan yang terletak di daerah paling utara di Kabupaten Pekalongan. Secara geografis, wilayah di Kecamatan Wonokerto terbagi menjadi dua yaitu wilayah pesisir dan wilayah non pesisir.

TABEL 2
PERSENTASE CAPAIAN KB DESA NON PESISIR KEC. WONOKERTO
PER SEPTEMBER 2016

NO	DESA NON PESISIR KEC. WONOKERTO	PASANGAN USIA SUBUR											
		PUS	PERSENTASE PER MIX KONTRASEPSI										
			IU D	MO W	IP	STK	PIL	JML	% KB WANITA	M O P	K D M	J M L	% KB PRIA
1	Werdi	651	11	10	9	370	140	540	82,95	0	21	21	3,23
2	Rowoyoso	984	12	23	21	592	141	789	80,18	0	24	24	2,44
3	Bebel	1547	18	49	10	1138	35	1248	80,67	0	1	1	0,06
4	Wonokerto Wetan	651	4	17	1	401	144	567	87,10	6	4	10	1,54
5	Sijambe	904	30	17	2	668	31	748	82,74	0	1	1	0,11
6	Pesanggrahan	513	9	33	4	383	39	468	91,23	0	1	1	0,19
JUMLAH		5250	84	149	47	3550	530	4380	83,05	6	52	58	1,10

Sumber : Laporan F/1/Dal/Kec/13

TABEL 3
 PERSENTASE CAPAIAN KB DESA PESISIR KEC. WONOKERTO
 PER SEPTEMBER 2016

NO	DESA PESISIR KEC. WONOKERTO	PASANGAN USIA SUBUR											
		PUS	PERSENTASE PER MIX KONTRASEPSI										
			IU D	MO W	IP	STK	PIL	JML	% KB WANITA	M O P	K D M	J M L	% KB PRIA
1	Pecakaran	654	5	17	10	404	39	475	72,63	0	0	0	0,00
2	Api-Api	837	11	23	13	592	24	663	79,21	0	0	0	0,00
3	Wonokerto Kulon	1053	9	36	3	685	95	828	78,63	0	0	0	0,00
4	Tratebang	506	8	11	2	361	44	426	84,19	0	3	3	0,59
5	Semut	541	6	16	1	386	30	439	81,15	5	0	5	0,92
JUMLAH		3591	39	103	29	2428	232	2831	78,84	5	3	8	0,22

Sumber : Laporan F/1/Dal/Kec/13

Dari data Tabel 2 dan Tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian KB Pria di Desa Pesisir Kec. Wonokerto lebih rendah dibandingkan dengan Desa Non Pesisir Kec. Wonokerto. Dari survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai lima orang pria pasangan usia subur (PUS) di desa-desa pesisir Kecamatan Wonokerto, diketahui bahwa hanya 1 dari lima responden saja yang mengetahui salah satu alat kontrasepsi pria yaitu kondom. Dan dari kelima pria PUS tersebut tidak satupun yang mengetahui tentang Metode Operasi Pria atau teknik vasektomi. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan salah satu responden yang telah diwawancarai sebagai berikut "*la nek KB niku yo urusane wong wedok mba, nek KB Pria kulo namung ngertose kondom*" ("KB itu urusan perempuan, kalau KB Pria yang saya tahu hanya kondom saja"). Penggunaan alat dan obat kontrasepsi didominasi oleh kaum perempuan secara kondisional, artinya para istri nelayan hanya meminum pil atau menggunakan suntikan KB saat suaminya berada dirumah (tidak melaut).

Daerah pesisir yang termasuk dalam kategori daerah Galciltas (Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan) sebagaimana juga daerah-daerah yang memiliki ciri khusus, seperti daerah kumuh atau perumahan real estate, memiliki keunikan tersendiri, baik dalam sistem nilai masyarakat, kepercayaan masyarakat, cara bersikap masyarakat, maupun sistem pendistribusian kekuasaan dalam masyarakatnya. Pada dekade 1980 an masyarakat pantai secara umum dikenal sebagai kelompok masyarakat yang ditandai oleh berbagai keterbelakangan, baik sosio-ekonomis, maupun budayanya. Dewasa ini tak pelak lagi sebagian desa pantai telah mencapai tingkat perkembangan sosio-ekonomi maupun budaya yang membanggakan, sementara sebagian desa pantai lainnya sedang berupaya meningkatkan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan sebagian masih tetap terbelakang. Namun demikian, baik desa pantai yang maju, yang sedang berkembang maupun yang masih terbelakang, masyarakat desa pantai atau pesisir tetap memiliki keunikan sebagai daerah masyarakat nelayan (BKKBN, 1995).

Secara geografis, Kabupaten Pekalongan terbagi atas tiga daerah, yaitu daerah pegunungan, daerah dataran dan daerah pesisir. Ada tiga kecamatan yang memiliki wilayah pesisir. Selain Kecamatan Wonokerto yang sebelumnya telah disebutkan, terdapat Kecamatan Siwalan yang memiliki dua desa pesisir dan Kecamatan Tirta yang juga memiliki dua desa pesisir. Jika sebelumnya peneliti hanya menyajikan data dari desa pesisir yang ada di Kecamatan Wonokerto, maka tabel berikut adalah persentase capaian KB Pria di desa-desa pesisir yang ada di Kabupaten Pekalongan.

TABEL 4
 PERSENTASE CAPAIAN KB PRIA
 DI DESA PESISIR KABUPATEN PEKALONGAN

NO	KEC	DESA / KEL	PASANGAN USIA SUBUR											
			PUS	IU D	M O W	IP	ST K	PIL	JM L	% KB WAN ITA	M O P	K D M	J M L	% KB PRIA
1	Siwalan	Depok	364	6	21	5	190	47	269	73,90	0	10	10	2,75
2	Siwalan	Blacanan	412	5	17	3	280	13	318	77,18	0	2	2	0,49
3	Wonokerto	Pecakaran	654	5	17	10	404	39	475	72,63	0	0	0	0,00
4	Wonokerto	Api-Api	837	11	23	13	592	24	663	79,21	0	0	0	0,00
5	Wonokerto	Wonokerto Kulon	1053	9	36	3	685	95	828	78,63	0	0	0	0,00
6	Wonokerto	Tratebang	506	8	11	2	361	44	426	84,19	0	3	3	0,59
7	Wonokerto	Semut	541	6	16	1	386	30	439	81,15	5	0	5	0,92
8	Tirto	Mulyorejo	556	26	10	23	259	76	394	70,86	5	3	8	1,44
9	Tirto	Jeruk Sari	1367	36	16	35	732	170	989	72,35	2	2	4	0,29

Sumber : Laporan F/1/Dal/Kec/13

Dari tabel diatas, terlihat bahwa rendahnya capaian KB Pria tidak hanya terjadi di desa pesisir yang ada di Kecamatan Wonokerto, namun juga desa-desa pesisir yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan dapat disimpulkan pula bahwa dalam penggarapan program Keluarga Berencana, desa pesisir harus mendapatkan perlakuan khusus. Keunikan karakteristik masyarakatnya membuat daerah pesisir harus diperlakukan sama dengan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciitas). Pendekatan difokuskan pada dimensi kultural dimana mencakup upaya-upaya perubahan perilaku, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat pesisir.

Selain dari karakteristik masyarakat pesisir yang disinyalir menjadi penyebab rendahnya kesertaan pria dalam Program KB, nampaknya perlu dicermati pula dari sisi kelembagaan Keluarga Berencana yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-010/B5/2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, pada pasal 2 point 2 dalam pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) menyebutkan bahwa ratio penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB adalah 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 2 (dua) desa/kelurahan pada tahun 2014. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut peraturan tersebut di wilayah Kabupaten Pekalongan. Di wilayah Kecamatan Wonokerto saja, dimana terdiri dari sebelas desa hanya memiliki dua orang PKB/PLKB. Tentunya hal ini juga menjadi penghambat dalam melakukan penggerakan di tingkat lini lapangan.

Permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir inilah yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan program KB Pria yang berjalan di kawasan tersebut. Apakah implementor sudah memahami dan menerjemahkan kebijakan dalam tindakan nyata, seberapa besar dukungan antar institusi pelaksana dan bagaimana dukungan masyarakat terhadap program KB yang selama ini berjalan.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini antara lain :

1. Masih rendahnya pencapaian KB pria di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan.
2. Masih rendahnya partisipasi pria untuk menggunakan metode dan alat kontrasepsi pria baik itu kondom atau MOP.

4. Terbatasnya jenis alat kontrasepsi bagi pria yang disediakan untuk pria.
5. Jumlah tenaga penyuluh Keluarga Berencana sebagai implementor kebijakan yang terbatas.

Setelah teridentifikasi masalah-masalah tersebut diatas maka dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pencapaian KB pria di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana Pria di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

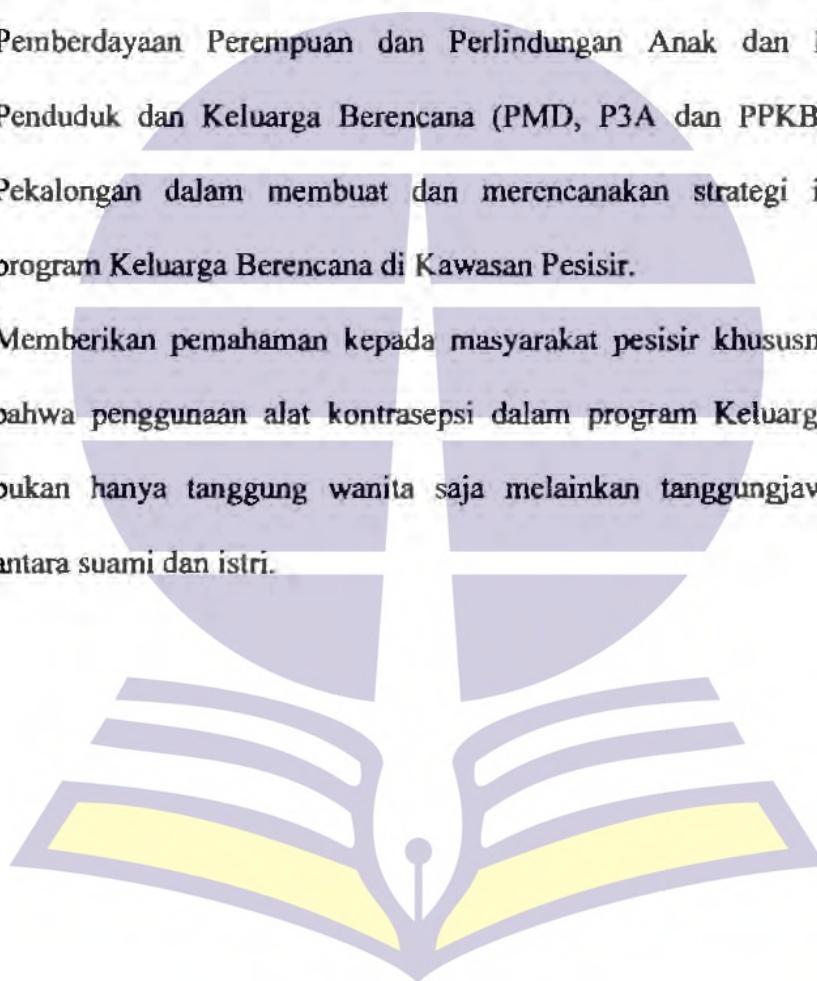
Setelah identifikasi dan perumusan masalah ditentukan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pencapaian KB Pria di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana Pria di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi ilmu Administrasi Publik yang secara khusus dalam implementasi kebijakan publik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber bagi peneliti lain dengan permasalahan serupa.
3. Sebagai masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD, P3A dan PPKB) Kabupaten Pekalongan dalam membuat dan merencanakan strategi implementasi program Keluarga Berencana di Kawasan Pesisir.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir khususnya para pria bahwa penggunaan alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana bukan hanya tanggung wanita saja melainkan tanggungjawab bersama antara suami dan istri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan fokus perhatian dari kajian ilmu administrasi publik. Kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah. Bagi pemerintah, kebijakan merupakan instrumen pokok yang dapat dipakai untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam upaya memecahkan berbagai persoalan publik (*public affairs*).

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2014:19). Dalam hal ini, kebijakan publik dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara (Anggara, 2014:33).

Agar lebih memahami definisi dari kebijakan publik, berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik dari beberapa tokoh. Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik diartikan sebagai :

“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) (Dye, 2013:3). Dari pengertian diatas, mengandung pengertian bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Suatu kebijakan yang harus dilakukan dan bermanfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warga masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Definisi lain diungkapkan oleh Dewey yang menyatakan bahwa kebijakan publik dititikberatkan pada “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Parsons, 2008).

Sedangkan menurut James E. Anderson (dalam Anggara, 2014:35) yang menyatakan bahwa, *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”* (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Dalam Winarno (2014:23), konsep kebijakan publik menurut Anderson mempunyai beberapa implikasi, yakni :

- 1) Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik.

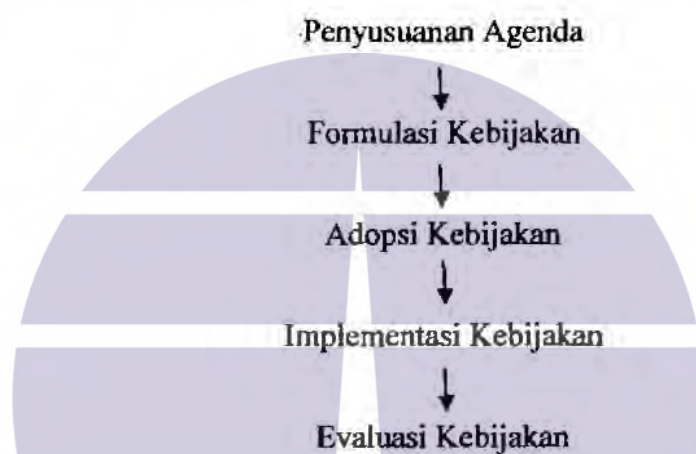
- 2) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan tersendiri.
- 3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
- 4) Kebijakan publik dalam bentuknya bisa bersifat positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat pemerintah, tapi tidak untuk mengambil tindakan.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keluaran atau *ouput* dari pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Dan hasil dari kebijakan publik adalah segala sesuatu yang berkaitan atau bermanfaat bagi masyarakat. Maka dalam Wahab (2015:16) menyatakan bahwa kebijakan dalam bidang apapun dan untuk merealisasikan tujuan apapun, akan diberi makna sebagai “kebijakan publik” jika sebagian atau seluruhnya digagas, dikembangkan, dirumuskan, atau dibuat oleh instansi-instansi, serta melibatkan (langsung atau tidak langsung) pejabat-pejabat pemerintah.

b. Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik

kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan dibawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Menurut Winarno (2013:35-37) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Tahap-Tahap Kebijakan Publik
(dalam Winarno, 2013:35)

Tahapan-tahapan diatas diadopsi dari pemikiran James E. Andersen, David W. Brady dan Charles Bullock II (1978) yang mereka sebut sebagai model "Policy Process as Linear Stages" (Proses Kebijakan sebagai Tahapan-Tahapan Linear) (Nugroho, 2014:112-113). Rincian dari tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

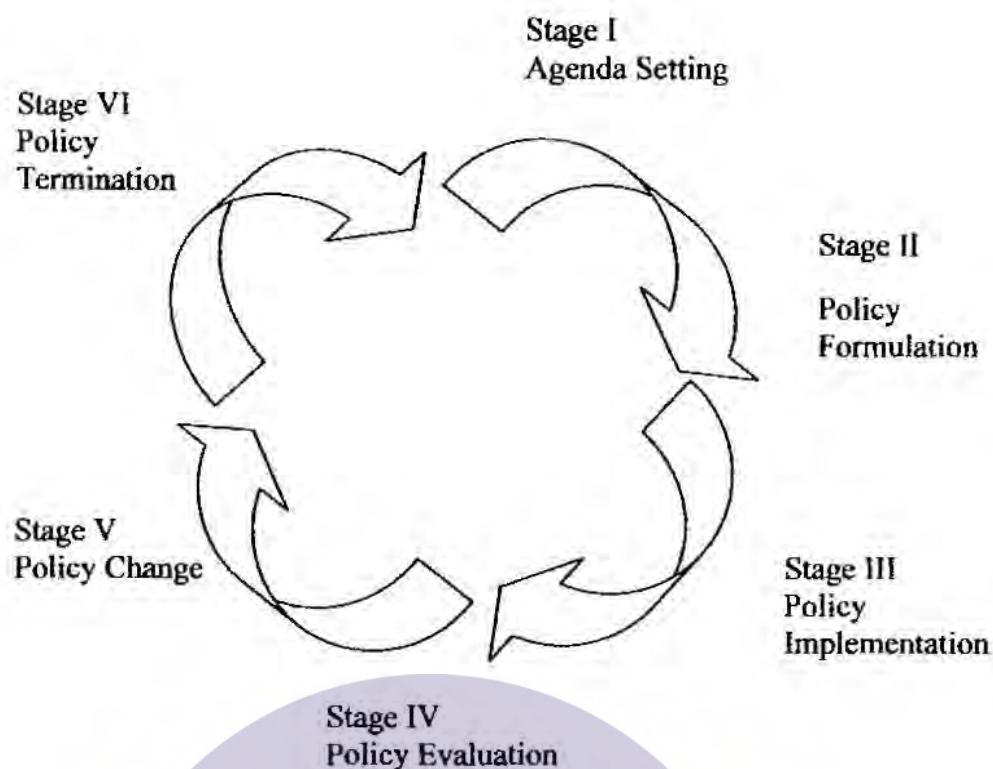
4) Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Selain itu menurut Lester dan Stewart (dalam Purwanto, 2015:23), tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :



Gambar 2
Tahapan Kebijakan Publik Menurut Lester dan Stewart
(dalam Purwanto, 2015:23)

Tahapan pertama dalam siklus ini adalah *agenda setting*. Setiap kebijakan publik yang dirumuskan memang akan selalu dimulai dari adanya suatu masalah publik yang mendapat perhatian luas yang menuntut tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut melalui suatu kebijakan. Karena masalah publik jumlahnya sangat banyak, maka untuk mendapat perhatian publik yang luas diperlukan kompetisi untuk membangun koalisi (dukungan) dari berbagai elemen atau kekuatan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika tahap *agenda setting* sering disebut sebagai tahapan politis dalam proses perumusan kebijakan. Setelahnya adalah formulasi kebijakan, yang merupakan proses penyusunan rencana serta metode untuk menyelesaikan permasalahan yang

ada dalam agenda setting. Tahap selanjutnya adalah implementasi. Tahap keempat dan kelima adalah evaluasi kebijakan dan penyempurnaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan akan dihentikan apabila tujuan yang diinginkan sudah berhasil dicapai.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dari tahapan-tahapan kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Setelah formulasi dan legitimasi dapat dipenuhi maka program harus dilaksanakan. Agar program dapat berjalan, maka dibutuhkan integrasi seluruh sumber daya dan suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Nugroho (2014:213-214), di negara-negara maju, ketika institusionalisasi masyarakat sudah mapan, keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar berasal dari perumusan kebijakan yang sangat bagus dan perencanaan. Namun hal tersebut berbeda dengan realitas di negara-negara berkembang. Dibawah konteks politik, konflik laten, institusionalisasi politik yang tidak matang, ditambah globalisasi “predator”, negara-negara berkembang harus lebih menyandarkan keberhasilan kebijakan publik pada sisi implementasi. Keberhasilan kebijakan publik di negara-negara berkembang, 20% berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus, 60% berkontribusi dari implementasi yang genius, dan 20% dari seberapa berhasil dalam kontrol implementasi. Inilah alasan mengapa studi implementasi kebijakan publik menjadi sangat penting untuk dipelajari. Ditegaskan pula oleh pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (dalam Wahab, 2015:126) dalam pernyataannya bahwa, “*the execution of policies is as*

important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unless they are implemented" (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Tachjan (2006:24), Pressman dan Wildavsky (1978) mengemukakan bahwa "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Yang maksudnya adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Secara etimologis itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Beranjak dari pengertian implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa mengimplementasikan berkaitan dengan suatu aktivitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pedoman Pelaksanaan, Sumberdaya dan lain-lain) sehingga dari aktivitas tersebut akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat (Anggara, 2014:232)

Dari rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan Pressman dan Wildavsky serta Mazmanian dan Sabatier diatas, maka implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan atau aktivitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak atau akibat bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan aktivitas atau kegiatan yang mengacu pada pedoman yang telah disusun. Pelaksanaan tersebut perlu dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Knoepfel (2007:188), menyatakan bahwa : "*policy implementation as the set of processes after the programming phase that are aimed at the concrete realisation of the objectives of a public policy*". Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya, Grindle dalam Winarno (2014:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara

umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Implementasi diartikan sebagai suatu proses *delivery system* dimana didalamnya mencakup *input* yang kemudian berproses untuk menghasilkan *output* kebijakan dan pada akhirnya kebijakan tersebut memberikan dampak (*outcome*) yang nyata pada masyarakat. Selain itu implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses dimana didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan dimana hasil akhirnya adalah perubahan ke arah perbaikan dari permasalahan yang terjadi sebelumnya. Maka menurut Parsons (2008:487) menyatakan bahwa fokus utama dari studi implementasi adalah persoalan tentang bagaimana organisasi berperilaku atau bagaimana orang berperilaku dalam organisasi. Akan tetapi, jika kita menerima bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan “jaringan” atau multiplisitas organisasi, pertanyaannya adalah bagaimana organisasi berinteraksi satu sama lain.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

Secara ontologis, *subject matter* studi implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti : (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah; (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Purwanto, 2015:18).

Upaya untuk memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi. Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ahli maka dapat dipetakan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Berbagai peta tentang faktor-faktor tersebut terakumulasi menjadi apa yang disebut sebagai model implementasi kebijakan. Model implementasi ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana yaitu sebagai hubungan sebab-akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut (Purwanto, 2015:18).

Model merupakan alat konseptual yang digunakan untuk menganalisis kebijakan sehingga mempermudah dalam memahami bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung. Dengan kata lain, untuk memudahkan pekerjaan analisis, dibutuhkan alat bantu konseptual (*conceptual tool*) yang berfungsi sebagai pembimbing langkah. Dalam Wahab (2015:153), sebuah model yang baik menurut Lester dan Stewart, pada derajat tertentu akan dapat memainkan peran kunci semacam penyedia hamparan lahan atau pemberi gambaran secara grafikal beberapa aspek penting dari proses kebijakan.

Berdasarkan cara peneliti memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu para pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* mengasumsikan bahwa hal-hal yang sudah diputuskan (*policy*) adalah alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil maka kontrol administrasi dalam pengimplementasiannya adalah hal mutlak (Anggara, 2014:237). Ciri dari pendekatan ini adalah memandang pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara rasional. Implementasi adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa setiap kegagalan kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan, harus dicari faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi membangun mata rantai hubungan sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak.

Pendekatan *Top Down* menggunakan logika berfikir dari “atas” kemudian melakukan pemetaan “kebawah” untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Dalam interpretasi Barrett (2004) studi implementasi yang menggunakan pendekatan *Top Down* tujuan utamanya adalah :

“to identify the cause of implementation problems or failure and suggest ways of enhancing the likelihood of obtaining compliance with policy objectives, generally focused on strategies for improved communication of intentions, coordination of the “links in the chain”, management of resources and control implementing agents”

Dari statement Barrett tersebut terlihat bahwa studi implementasi *Top Down* memiliki kecenderungan untuk menjelaskan persoalan-persoalan (hambatan atau kegagalan) yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan dan atas dasar faktor-faktor yang membuat implementasi gagal dan kemudian peneliti akan memberikan resep atau solusi atas persoalan tersebut (Purwanto, 2015:38). Beberapa ahli yang dapat digolongkan sebagai penganut pendekatan *Top Down* adalah : Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III (1980), Grindle (1980), Van Meter Van Horn (1975) dan Mazmanian dan Sabatier (1983).

1) Model George Edward III

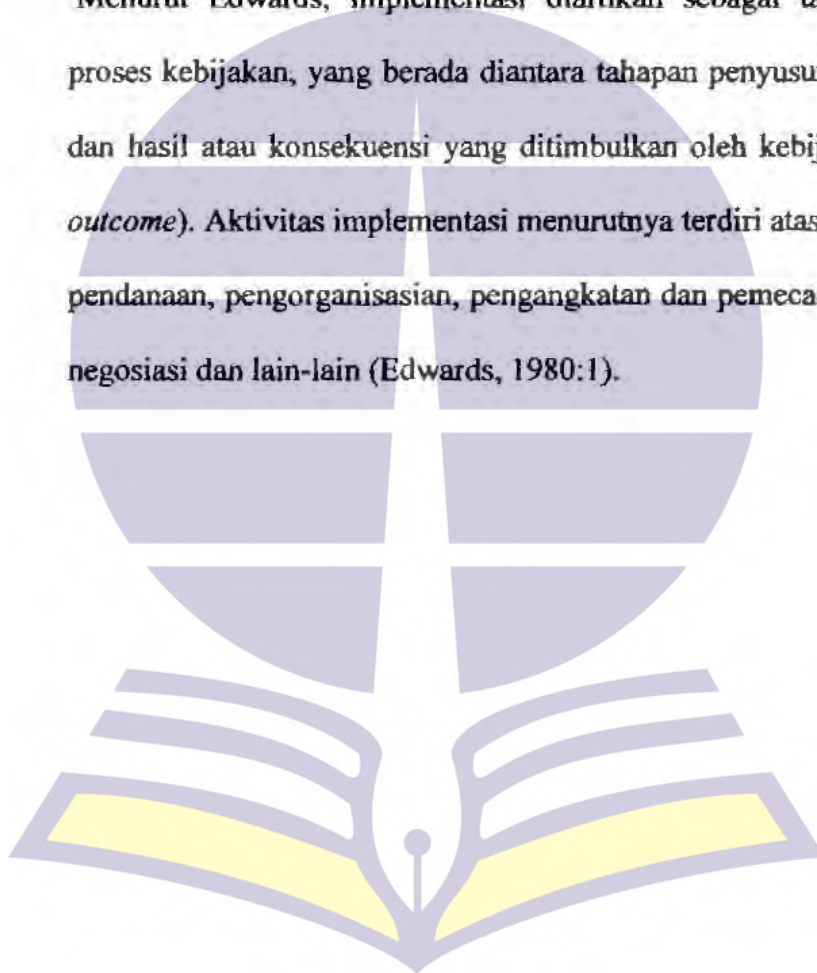
George Edward III, mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada

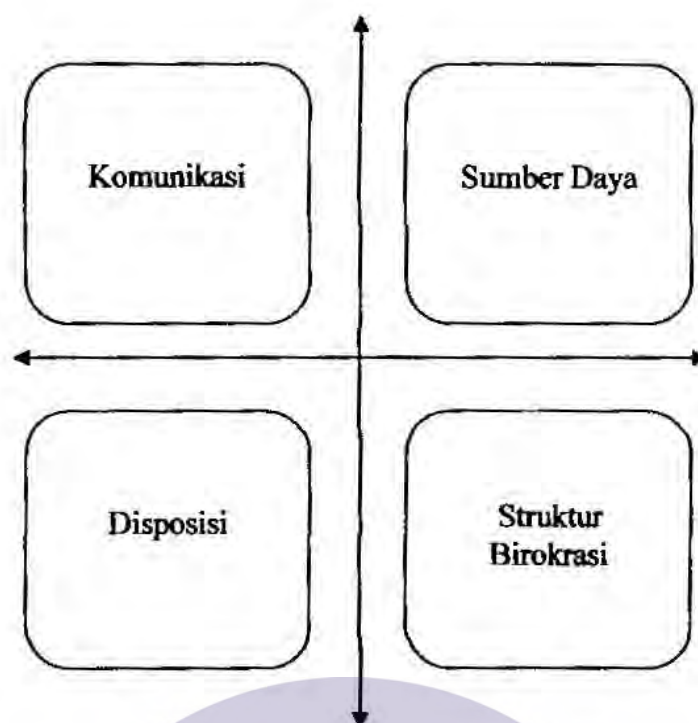
empat isu utama yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Sikap dan Struktur Birokrasi (Nugroho, 2014:225).

Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1980, Edwards III menyatakan bahwa proses implementasi sebagai :

".....the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect."

Menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain (Edwards, 1980:1).





Gambar 3
Model Implementasi Kebijakan Edward 3
(Anggara, 2014:249)

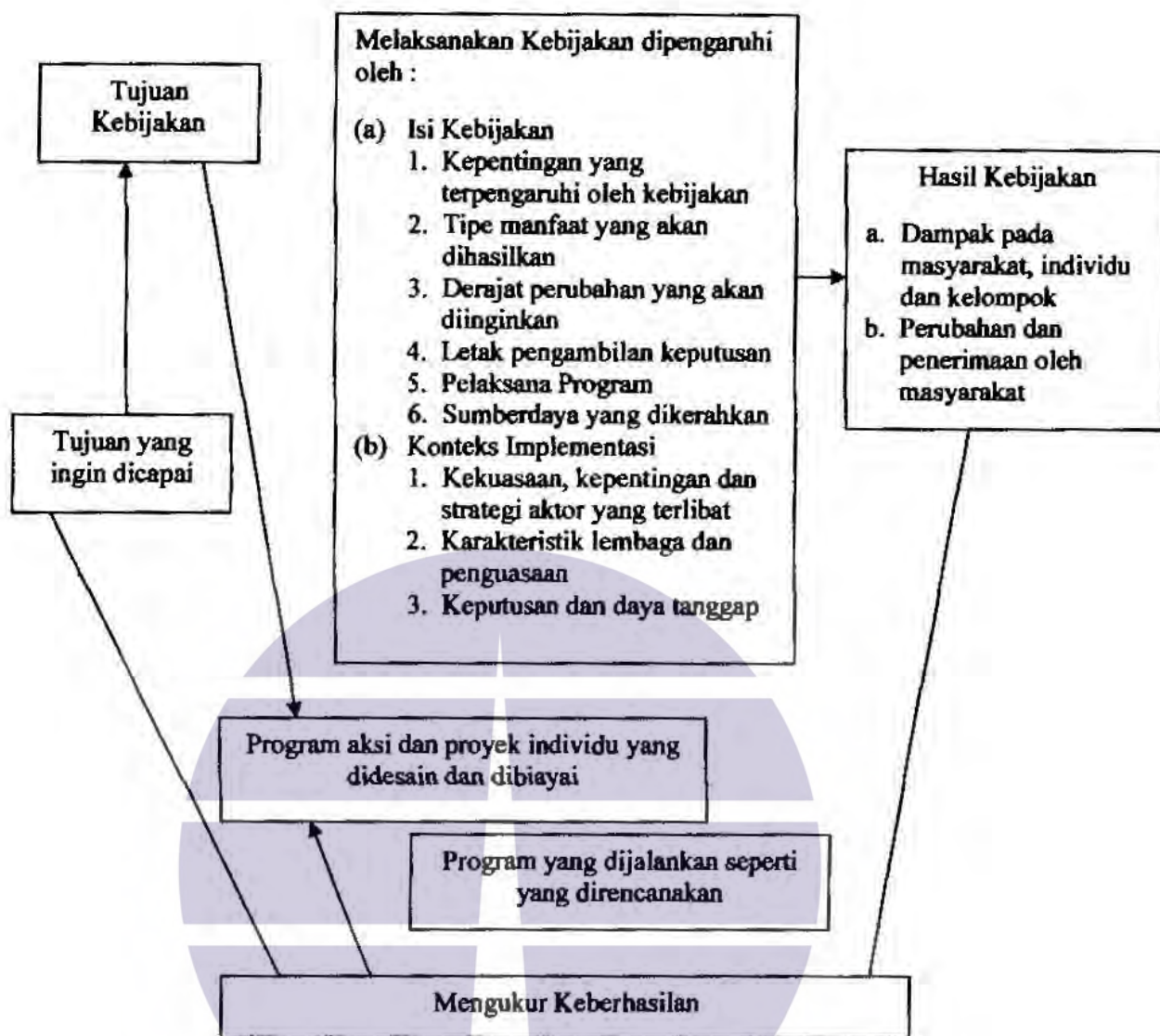
Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Sumber daya adalah menyangkut ketersediaannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Disposisi adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan. Disposisi adalah tentang komitmen, lebih dari kompetensi dan kapabilitas. Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena menurunkan efektivitas implementasi kebijakan (Nugroho, 2014:226).

2) Pendekatan Merilee S. Grindle : *Content of Policy and Context of Implementation* (1980)

Berbeda dengan Edward III yang lebih menitikberatkan pada sisi implementor kebijakan, Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in The Third World* (1980) mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context*-nya, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumberdaya implementasi yang diperlukan.

Grindle mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasi yang disebut sebagai *derajat kemampuan implementasi*. Dalam hal isi, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan; jenis keuntungan yang dihasilkan; derajat perubahan yang dimaksud; posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan serta sumber daya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang harus diperhatikan : Kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi dan tingkat kepatuhan (Nugroho, 2014:221).





Gambar 4
Implementation as a Political and Administrative Process
 (Anggara, 2014:254)

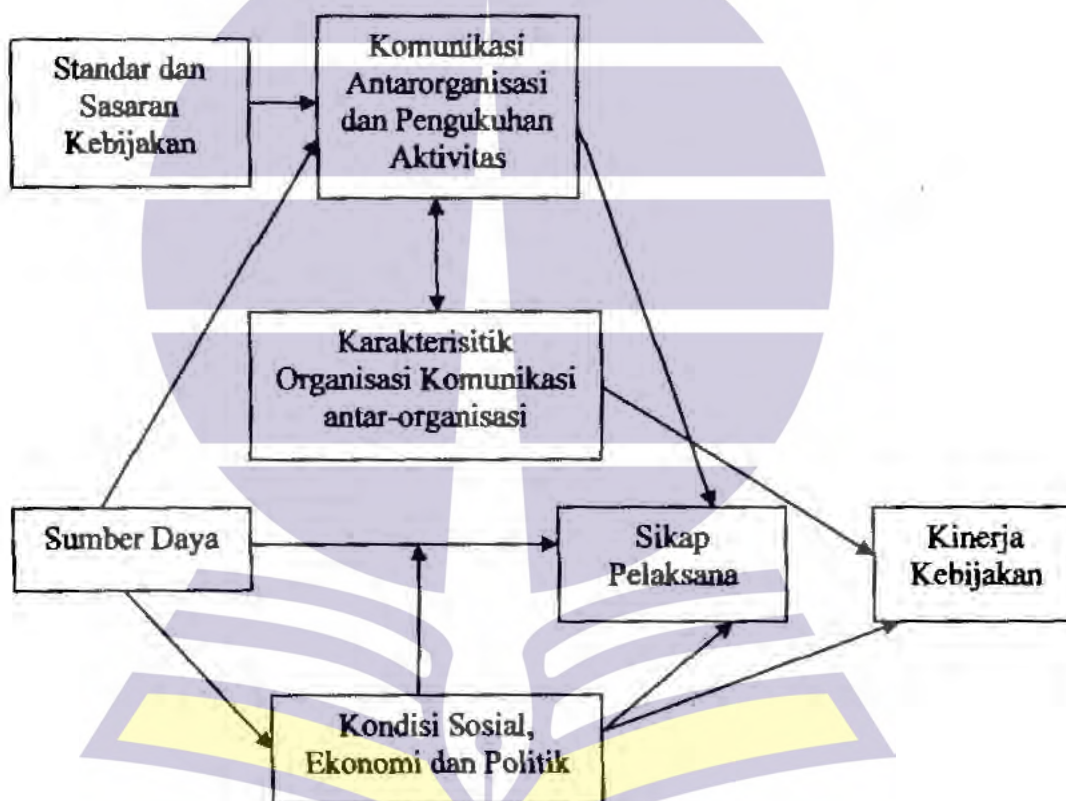
3) Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn : Perspektif Teoritis Proses Implementasi Kebijakan (1975)

Model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn bergerak dari pendekatan umum yang dikembangkan oleh pendahulunya yaitu Pressman dan Wildavsky menjadi sebuah model proses implementasi.

Pendekatan sebelumnya dianggap sangat membantu memahami proses implementasi namun sangat kurang dalam kerangka teoritis. Model yang mereka kembangkan bertumpu pada tiga pilar yaitu :

- a) Teori Organisasi, khususnya tentang perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh karya Max Weber
- b) Studi tentang dampak kebijakan publik, terutama kebijakan yang bersifat hukum
- c) Studi tentang hubungan interorganisasi, termasuk hasil studi Pressman dan Wildavsky.

(Indiahono, 2009:38-40)



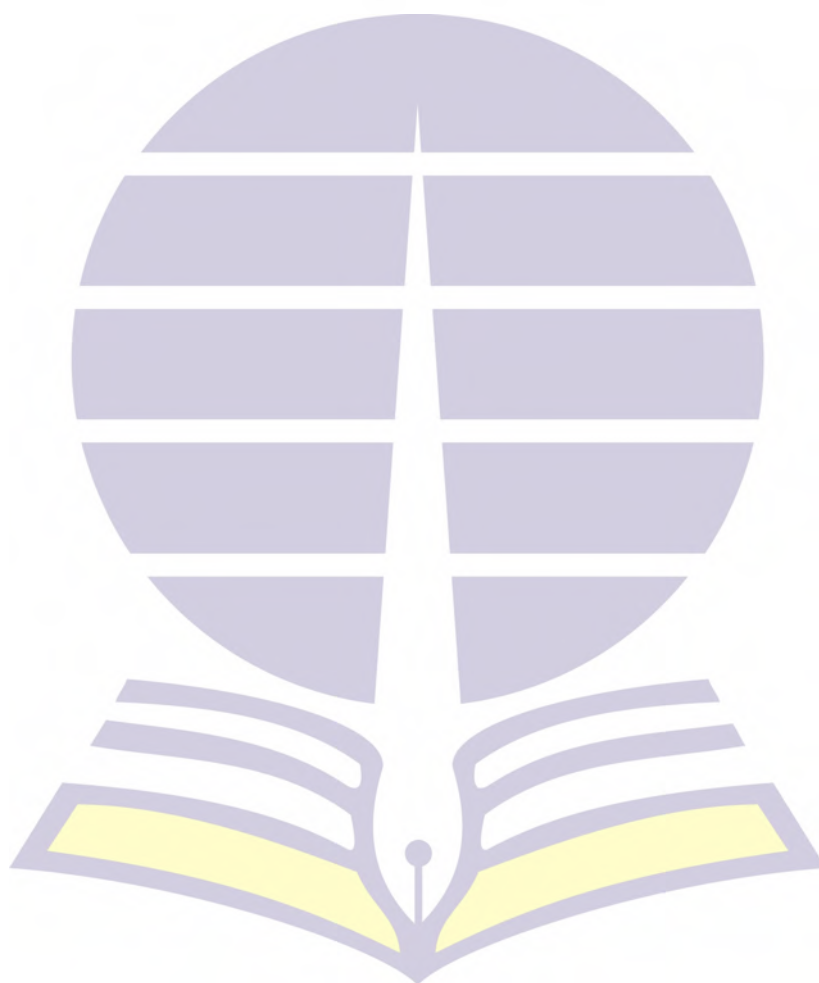
Gambar 5

Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

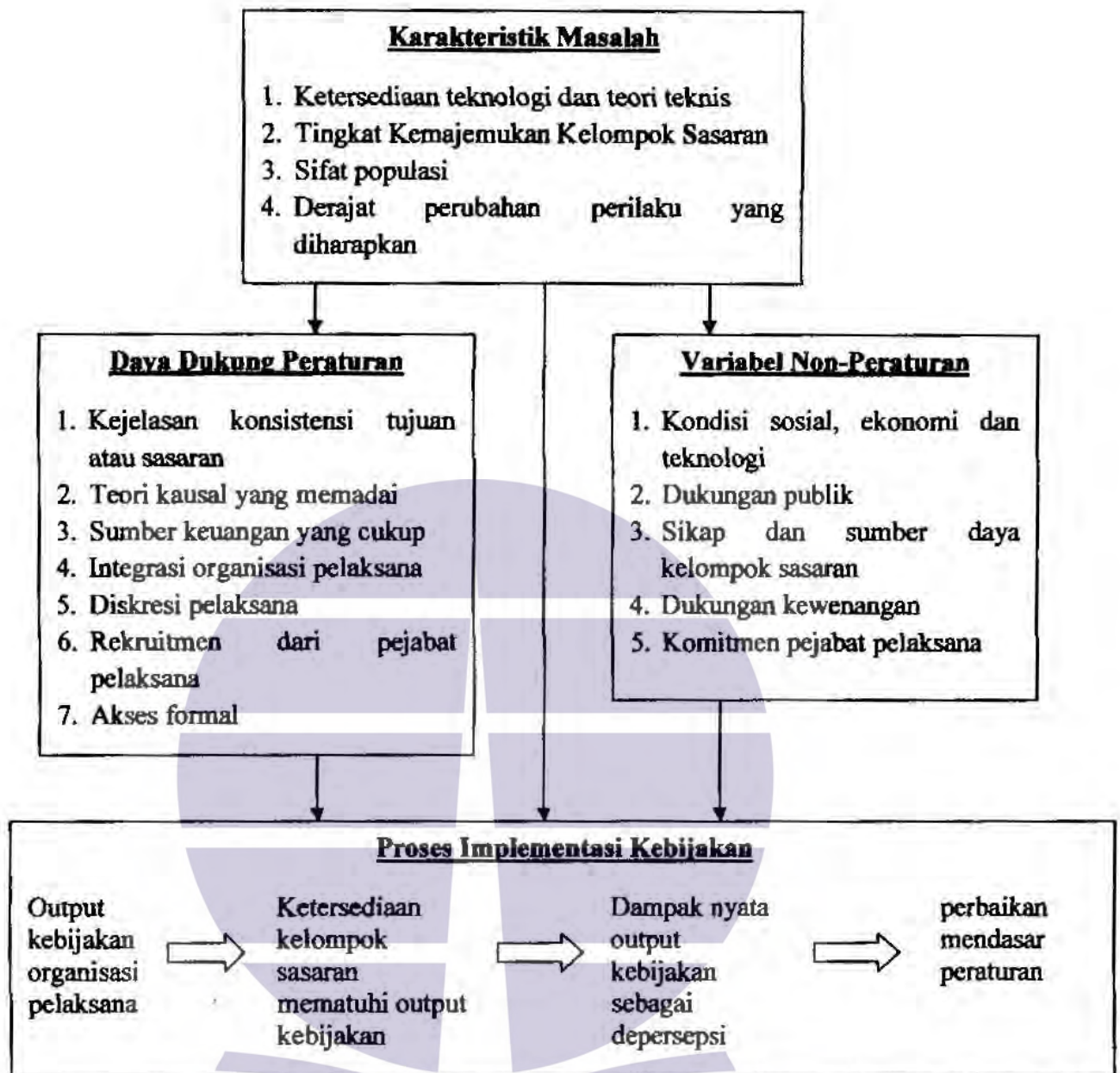
(Indiahono, 2009:40)

4) Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menggagas model implementasi kebijakan yang mereka sebut sebagai *A Frame Work for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi). Mereka berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik ialah berupaya mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi (Wahab, 2015:176).



KERANGKA ANALISIS IMPLEMENTASI



Gambar 6

Model Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier
(Wahab, 2015:178)

Dapat ditegaskan bahwa model implementasi *Top Down* atau Model Rasional dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang mampu membuat implementasi kebijakan berhasil. Dapat disimpulkan pula

bahwa model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang memandang bahwa implementasi perlu mempertimbangkan isi atau tipe kebijakan. Sedangkan Grindle (1980) lebih memandang implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) terpusat pada hubungan antara keputusan-keputusan dengan pencapaiannya, formulasi dengan implementasinya, serta bagaimana implementor melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Pada dasarnya model yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier tidak berbeda jauh dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn dalam hal perhatian terhadap kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hanya saja pemikiran Mazmanian dan Sabatier menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila implementor mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh peraturan (Pedoman Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis) (Putra, 2003:76). Dengan demikian, dapat dipahami jika model implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier lebih difokuskan pada kesesuaian antara apa yang telah ditetapkan atau dirumuskan dengan pelaksanaan program tersebut.

Dari beberapa model implementasi kebijakan dengan pendekatan *top-down* tersebut, ternyata mendapatkan kritik dari ahli-ahli yang kemudian menyebut diri dengan konsep pendekatan *bottom-up*. Mereka mengatakan bahwa suatu proses implementasi tidak hanya berfokus pada birokrasi atau implementor saja dalam upayanya mewujudkan tujuan kebijakan. Kemudian, para ahli *bottom-up* menekankan bahwa aktor lain yaitu aktor

lini bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran perlu memegang peranan penting.

Maka studi implementasi yang dilakukan Mazmanian dan Sabatier dianggap paling lengkap dalam “meramu” berbagai variabel dari peneliti sebelumnya yang menggunakan pendekatan *Top Down* menjadi sebuah model yang komprehensif (Purwanto, 2015:39-40). Hal tersebut dikarenakan dalam model yang ditawarkan oleh Mazmanian dan Sabatier memiliki variabel yang mampu menggabungkan antara kepentingan pemerintah dan bagaimana variabel didalamnya mampu menyoroti partisipasi masyarakat dan dukungan lingkungan kebijakan sebagai objek dari kebijakan.

Singkatnya studi yang dilakukan generasi pertama (*top-down*) dan kedua (*bottom-up*) berhasil memberi banyak pengetahuan tentang makna implementasi, deskripsi serta eksplanasi atas variasi yang terjadi dalam implementasi. Namun demikian bagi sementara kalangan ilmuwan studi implementasi masih merupakan “misteri”, terutama tentang cara memahami perbedaan tipe-tipe *outcomes* yang muncul dari implementasi berbagai program. Kritik tersebut mendorong para ahli untuk melakukan sintesa atas apa yang telah mereka pelajari dan berupaya memberi revisi-revisi yang menjanjikan bagi penelitian implementasi dimasa depan yang kemudian dinamakan pendekatan Hybrid (Kusumanegara, 2010:117-118).

Pendekatan Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara, 2014:257-260) yang menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1) Karakteristik Masalah

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan namun dipihak lain terdapat masalah-masalah yang sulit dipecahkan. Oleh sebab itu, sifat masalah akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Karakteristik masalah dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor berikut ini.

- a) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
- b) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- c) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif

akan mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik Kebijakan

- a) Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Bagaimanapun baiknya suatu Undang-Undang atau keputusan-keputusan kebijakan dasar lainnya menstrukturkan proses keputusan formal, upaya pencapaian tujuan resmi yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku kelompok sasaran tidak akan membawa hasil yang diharapkan, kecuali kalau para pejabat dalam badan-badan pelaksana memiliki kesepakatan atau komitmen yang tinggi terhadap upaya pencapaian tujuan tersebut.

- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

3) Lingkungan Kebijakan

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu proses keberhasilan implementasi program karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

- b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik.
- c) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, antara lain (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif.
- d) Dukungan kewenangan dari lembaga-lembaga atasan. Yang dimaksud lembaga atasan dari badan pelaksana disini adalah lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang kontrol terhadap kewenangan hukum, dan sumber-sumber keuangan badan pelaksana tersebut.
- e) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan konsep atau model implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier dikarenakan variabel-variabel didalamnya sangat memungkinkan untuk mengidentifikasi proses implementasi maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseluruhan proses implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana Pria di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya untuk menghindari analisis yang terlalu melebar, maka peneliti hanya akan menggunakan variabel-variabel yang sesuai untuk mengidentifikasi permasalahan sebagaimana tujuan dari penelitian ini.

B. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Akhmad Zaeni dengan judul penelitian "Implementasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing pada tahun 2006, menyebutkan bahwa rendahnya pencapaian kesertaan KB Pria dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : (i) Kemampuan Komunikasi (Konseling) KB bagi petugas masih rendah; (ii) Kualitas sumber daya yang rendah, yang berimbas pada rendahnya disposisi implementor dan (iii) Struktur organisasi di kecamatan yang bentuknya belum pasti. Studi yang dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ini lebih menitikberatkan sisi implementor kebijakan sesuai dengan teori yang dibangun oleh Edward III.

2. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ibu Fitria Ayuningtyas Putri juga menitikberatkan pada sisi implementor dengan menggunakan teori Edward III dengan judul penelitian “Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Porongpong Kabupaten Bandung Barat” pada tahun 2012. Penelitian yang dilakukan dengan metode *explanatory survey* memperoleh hasil apabila implementasi kebijakan KB oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan sebaik-baiknya menurut empat dimensi yang ada, maka secara simultan akan meningkatkan efektivitas kesertaan pria dalam kebijakan KB di Kecamatan Porongpong Kabupaten Bandung Barat.
3. Berbeda dari dua penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bapak Saptono Iman Budisantoso dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul” pada tahun 2008, menyebutkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, sikap, persepsi, sikap istri dan sikap teman dengan partisipasi pria dalam Program Keluarga Berencana. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan *cross sectional* dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini menitikberatkan pada bagaimana sikap pria sebagai kelompok sasaran dalam Program Keluarga Berencana.
4. Penelitian yang juga meneliti tentang bagaimana sikap pria terhadap Program KB dilakukan oleh Bapak Yudi Ardiana dengan judul penelitian “Penerimaan Kontrasepsi Vasektomi di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur” pada tahun 2015. Penelitian yang dilakukan dengan

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ini menunjukkan bahwa penerimaan vasektomi dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap pasangan, persepsi, manfaat vasektomi dan dukungan istri. Selain itu, pengaruh lain adalah peran tenaga kesehatan, penyuluh KB, Kader dan dukungan dari lingkungan masyarakat.

5. Selanjutnya penelitian yang juga meneliti bagaimana sikap pria terhadap Program Keluarga Berencana dilakukan oleh Bapak Agung Prabowo dan Ibu Dewi Kartika pada tahun 2011 dengan judul penelitian “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pria tentang Keluarga Berencana dengan Perilaku Pria dalam berpartisipasi Menggunakan Metode Kontrasepsi Keluarga Berencana di Desa Larangan Kabupaten Brebes”. Penelitian ini menggunakan metode *observational analitik* dengan rancangan *cross secyional* serta menggunakan Teori Green yang mengatakan bahwa perilaku manusia terbentuk dari tiga faktor yaitu Faktor Predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Kemudian Faktor Pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik serta tersedia atau tidaknya fasilitas dan sarana kesehatan dan Faktor Pendorong yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan.

Berbeda dari kelima penelitian diatas, fokus penelitian ini adalah tidak hanya dari sisi implementor saja yang dalam hal ini adalah pengendali program Keluarga Berencana di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tetapi juga masyarakat sebagai kelompok sasaran atau penerima kebijakan yaitu masyarakat pesisir.

C. Kerangka Berfikir

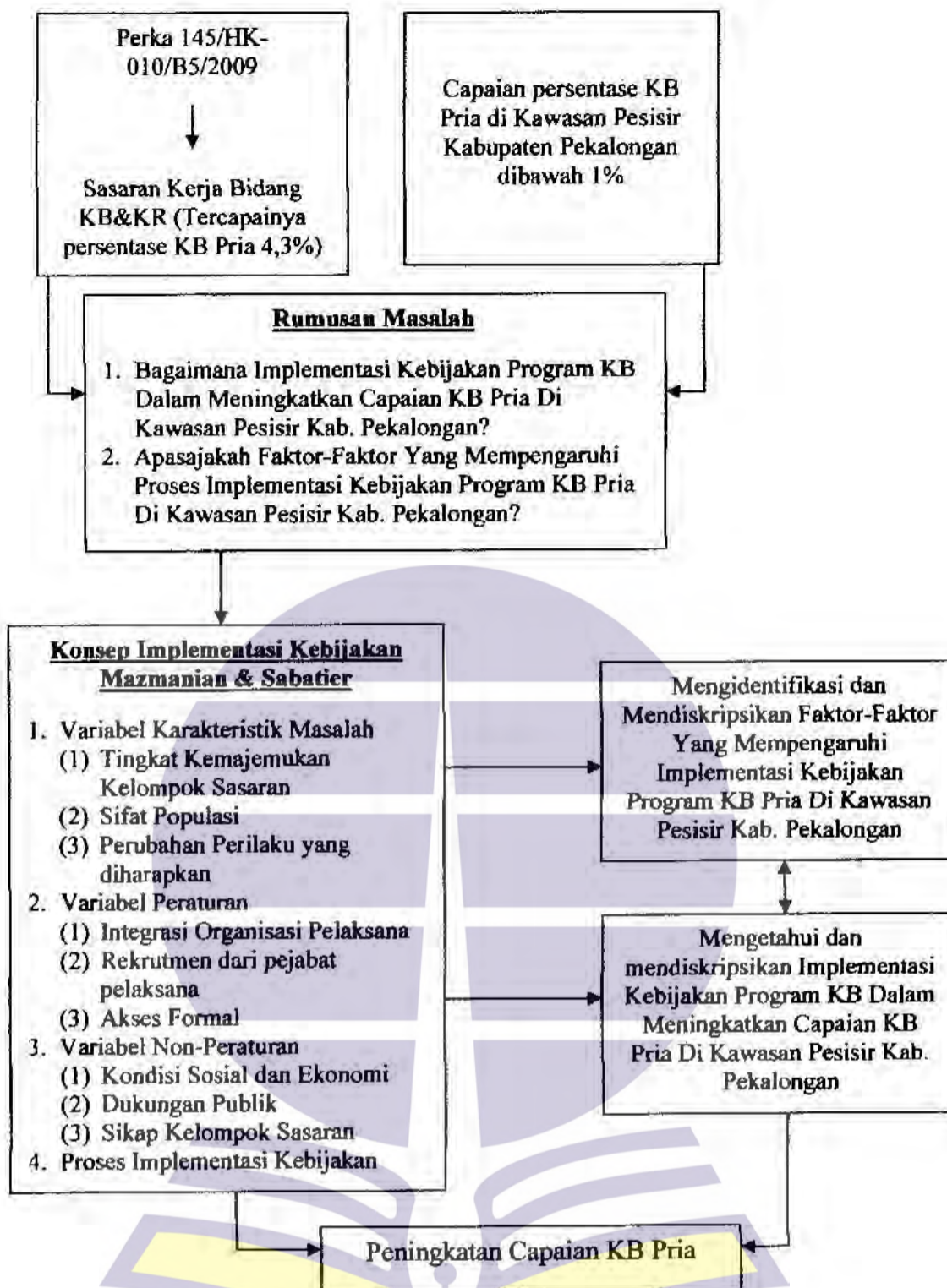
Kerangka pemikiran ini dimulai dengan adanya permasalahan rendahnya capaian KB pria di Kabupaten Pekalongan. Dari data yang telah disajikan, menunjukkan bahwa persentase capaian KB Pria di Kabupaten Pekalongan hanya mencapai sekitar 2%, sangat jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah melalui sasaran kerja bidang KB dan KR yaitu 5%. Salah satu kecamatan yang selama dua tahun berturut-turut menduduki peringkat terbawah atau dengan capaian kesertaan KB Pria paling rendah adalah Kecamatan Wonokerto.

Kecamatan Wonokerto adalah kecamatan yang terletak di daerah utara Kabupaten Pekalongan dimana bagian utaranya langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Dari total sebelas desa yang ada di Kecamatan Wonokerto ada lima desa yang termasuk desa pesisir dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Apabila dilihat data pencapaian KB Pria dan diperbandingkan antara desa pesisir dan desa non pesisir maka diperoleh hasil bahwa pencapaian KB Pria di desa-desa pesisir sangatlah rendah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan di masyarakat tentang apa itu KB Pria, karena selama ini para pria yang rata-rata bekerja sebagai nelayan ini menyerahkan persoalan KB kepada para istrinya. Kesimpulan awal dari penelitian ini adalah bahwa minat atau partisipasi pria di kawasan pesisir terhadap program Keluarga Berencana sangatlah rendah. Apabila dilakukan generalisasi di semua kawasan pesisir di Kabupaten Pekalongan maka terlihat hasil dari data yang sebelumnya telah disajikan bahwa ada sembilan desa pesisir dari tiga kecamatan di Kabupaten

Pekalongan selain Kecamatan Wonokerto yaitu Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Tirto dimana rata-rata hasil capaian KB Pria masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Kebijakan Keluarga Berencana merupakan kebijakan skala nasional dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perencanaan kehamilan dengan tujuan skala luasnya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali. Dalam upaya tersebut peran serta pria sebagai kepala keluarga seharusnya meningkat seiring dengan isu kesetaraan gender dalam kebijakan Program Keluarga Berencana. Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti memutuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan Keluarga Berencana dengan menggunakan Kerangka Analisis Implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Dalam konsep implementasi kebijakan yang mereka usung, bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu (1) karakteristik dari masalah; (2) karakteristik kebijakan atau Undang-Undang; dan (3) lingkungan (Anggara, 2014:257).

Dari pernyataan tersebut peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keluarga berencana dalam upaya meningkatkan capaian KB Pria di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan dengan melihat bagaimana karakteristik masalah yang ada, karakteristik kebijakan keluarga berencana dan bagaimana peran lingkungan kawasan pesisir dalam program keluarga berencana tersebut. Apabila digambarkan dalam bentuk bagan, maka alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 7

Alur Pemikiran Penelitian

D. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

1. Karakteristik Masalah

a. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Dalam penelitian ini, Tingkat kemajemukan dapat diukur dengan melihat apakah kelompok sasaran bersifat homogen atau heterogen. Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui karakter masyarakat secara umum maupun dari pemilihan profesi yang menjadi pilihan dari sebagian besar masyarakat pesisir Kecamatan Wonokerto.

b. Sifat Populasi

Sasaran program KB Pria adalah para pria yang termasuk dalam Pasangan Usia Subur, yaitu pasangan yang wanitanya berusia antara 15-49 tahun (BKKBN, 1995). Sifat populasi dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagaimana para pria usia subur mampu memahami manfaat dari program KB yang dapat diukur dari tingkat pendidikan. Berdasarkan survei SDKI 2012 Modul Pria, tingkat pendidikan mampu mempengaruhi para pria dalam memahami pemakaian alat kontrasepsi pria. Selain itu, sifat populasi juga dapat diidentifikasi dari kebiasaan kelompok sasaran di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto dalam hal penggunaan alat kontrasepsi.

c. Derajat Perubahan Perilaku Yang Diharapkan

Tujuan dari program Keluarga Berencana selain memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif juga bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat. Derajat perubahan perilaku yang diharapkan melalui program KB dapat diketahui dari tingkat pengetahuan kelompok sasaran tentang program KB dan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh melalui sosialisasi KB Pria maupun motivasi yang dilakukan oleh implementor program.

2. Daya Dukung Peraturan

a. Integrasi Organisasi Pelaksana

Sebagai kebijakan yang bersifat nasional atau yang bersumber dari pemerintah pusat, implementasi program Keluarga Berencana sangat tergantung pada kepatuhan pemerintah provinsi dan instansi-instansi teknis di kabupaten/kota, terutama dalam penjabaran lebih lanjut dalam bentuk program-program. Indikator keberhasilannya adalah kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana dan bagaimana koordinasi berjalan. Program Keluarga Berencana tidak akan terlepas dari kerjasamanya dengan beberapa dinas terkait.

Khusus dalam penelitian ini, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, integrasi organisasi pelaksana disini mencakup bagaimana koordinasi antar lembaga berjalan dalam implementasi Program Keluarga Berencana.

b. Rekrutmen dari Pejabat Pelaksana

Rekrutmen terhadap pejabat-pejabat pelaksana dari mulai level kabupaten/kota hingga petugas lapangan dalam program Keluarga Berencana diharapkan adalah orang-orang pilihan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keberhasilan program. Para pengendali program Keluarga Berencana adalah mereka yang mampu memberikan motivasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat sebagai penerima program.

Selain itu, rekrutmen pejabat pelaksana juga diharapkan menjangkau sampai ke lini bawah yaitu level desa hingga kelembagaan didalamnya misalnya RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga). Hal ini dikarenakan mereka inilah kepanjangan tangan dari Penyuluh Lapangan di tingkat kecamatan. Diharapkan pula, pejabat pelaksana tingkat desa juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program.

c. Akses Formal

Akses formal dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung program Keluarga Berencana. Adanya kelompok KB Pria yang dibentuk di desa sebagai wadah bagi akseptor-akseptor KB pria akan memudahkan program berjalan dengan baik. Testimoni langsung dari akseptor akan lebih mengena daripada penyuluhan atau motivasi dari petugas lapangan.

3. Variabel Non-Peraturan

a. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dari tingkat pendapatan kelompok sasaran, struktur kehidupan kelompok sasaran dan bagaimana kelompok sasaran dimobilisasi oleh suatu kelompok tertentu.

b. Sikap Kelompok Sasaran Sasaran

Beberapa penghambat keberhasilan program KB Pria adalah adanya sikap dari masyarakat terutama kaum pria yang mempercayai mitos bahwa menjadi akseptor MOP (Metode Operasi Pria) akan menyebabkan menurunnya “kejantanan” pria. Kuatnya mitos tersebut secara tidak langsung mempengaruhi minat pria terhadap program ini. Selain itu, sikap fanatisme terhadap agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang meyakini bahwa metode kontrasepsi mantap dalam program KB adalah haram menjadikan program ini sulit untuk diterima oleh masyarakat.

c. Dukungan Kewenangan

Program Keluarga Berencana merupakan suatu program yang menasar hingga level desa/kelurahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang atau kontrol di desa. Dukungan kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana dukungan kepala desa dalam menyediakan sumberdaya keuangan untuk pelaksanaan program KB di

desa dan bagaimana dukungan Tokoh agama dalam partisipasinya dalam Program KB.

4. Proses Implementasi

a. *Output* Kebijakan Organisasi Pelaksana

Output kebijakan organisasi pelaksana di tingkat kecamatan adalah bagaimana pengendali program dalam hal ini adalah Penyuluh Keluarga Berencana mampu mengimplementasikan program sesuai dengan Petunjuk Teknik dan Petunjuk Pelaksanaan yang ada. Dalam penelitian ini, yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria dan Buku Pedoman Operasional Gerakan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Daerah Pantai di Tingkat Lini Lapangan. Selain itu kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pengendali program yang mampu meningkatkan capaian kesertaan KB Pria di kawasan pesisir.

b. Kesiediaan Kelompok Sasaran Mematuhi *Output* Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Berencana memiliki hambatan dan tantangan ketika isu tentang Hak Azasi Manusia mulai dimunculkan. Keputusan untuk mengikuti program keluarga berencana tidak bisa lagi dipaksakan. Partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program KB diserahkan sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga. Kesiediaan kelompok sasaran dalam mematuhi *output* kebijakan akan terlihat dari variabel non-peraturan sub-variabel sikap kelompok sasaran dan dukungan kewenangan.

c. Dampak Nyata *Output* Kebijakan

Tujuan utama program Keluarga Berencana khususnya dalam penelitian ini adalah peningkatan capaian KB Pria yakni meningkatkan kesertaan pria dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam program Keluarga Berencana. Namun, kawasan pesisir merupakan suatu kawasan dengan perlakuan khusus dimana kaum laki-laknya memiliki karakteristik yang keras dan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Dampak nyata dari kebijakan Program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto adalah bagaimana sikap kelompok sasaran berdasarkan keragaman perilaku mereka yang didasari atas jenis pekerjaan, budaya yang berlaku serta kondisi sosial dan ekonomi di kawasan tersebut.

d. Perbaikan Mendasar Peraturan

Kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional seperti halnya program Keluarga Berencana, ternyata tidak dapat dilaksanakan secara “saklek” di semua daerah. Ada daerah-daerah khusus yang memiliki karakteristik tertentu harus dilakukan modifikasi terhadap kebijakan tersebut. Terkait dengan penelitian ini, kawasan pesisir merupakan daerah/kawasan yang memiliki karakteristik tertentu dimana berdasarkan data yang ada, para pria di kawasan ini sangat rendah kesertaannya dalam Program Keluarga Berencana. Perbaikan mendasar yang dapat dilakukan meliputi evaluasi secara komprehensif dalam pelaksanaan Program KB Pria di kawasan pesisir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan menggambarkan desain penelitian yang mengungkapkan jenis penelitian yang akan dilakukan, alasan pemilihan informan dalam penelitian, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data hingga metode analisis data.

A. Desain Penelitian

Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Untuk dapat menjelaskan pemahaman bagaimana implementasi kebijakan keluarga berencana dalam upaya peningkatan capaian KB Pria di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan diperlukan pendekatan penelitian yang sesuai yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman atas fenomena rendahnya capaian KB Pria dengan berfokus pada karakteristik masyarakat pesisir di Kabupaten Pekalongan. Penelitian kualitatif tepat digunakan dalam studi ini karena mempertimbangkan nilai-nilai, norma dan budaya serta faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan program Keluarga Berencana khususnya pada program KB Pria.

Berdasarkan pendekatannya, Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia atau

masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2007:18).

Menurut John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan” (2015:107-109), ciri utama dari studi fenomenologi adalah sebagai berikut :

1. Penekanan pada fenomena yang hendak dieksplorasi berdasarkan sudut pandang konsep atau ide tunggal.
2. Eksplorasi fenomena pada kelompok individu yang semuanya telah mengalami fenomena tersebut.
3. Pembahasan filosofis tentang ide dasar yang dilibatkan dalam studi fenomenologi. Pembahasan ini menelusuri pengalaman hidup dari individu dan bagaimana mereka memiliki pengalaman subjektif dari fenomena tersebut maupun pengalaman objektif dari sesuatu yang sama dengan orang lain
4. Peneliti hanya berfokus pada pengalaman partisipan tanpa memasukkan pengalaman dirinya dalam deskriptifnya.
5. Fenomenologi diakhiri dengan bagian deskriptif yang membahas esensi dari pengalaman yang dialami individu tersebut dengan melibatkan “apa” yang telah mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya. Esensi atau intisari adalah aspek puncak dari studi fenomenologis.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka menguasai atau memahami Program Keluarga Berencana di Kabupaten Pekalongan.
2. Mereka berkecimpung atau terlibat secara langsung dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Pekalongan.
3. Mereka memiliki cukup waktu untuk diwawancarai.
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan teknik *Purposive Sampling*, artinya dengan sengaja memilih narasumber yang benar-benar mengetahui Program Keluarga Berencana di Kabupaten Pekalongan. Untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Program KB Pria secara keseluruhan di Kawasan Pesisir maka informan dalam penelitian ini sejumlah 27 orang adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Penyuluh Keluarga Berencana | : 2 Orang |
| 2. PPKBD | : 6 Orang |
| 3. Kepala Desa | : 5 Orang |
| 4. Tokoh Agama | : 5 Orang |
| 5. Perangkat Desa | : 1 Orang |

6. Akseptor Pria	: 2 Orang
7. Masyarakat (PUS)	: 6 Orang
	<hr/>
	27 Orang

Lokus dalam penelitian ini adalah kawasan pesisir di wilayah Kabupaten Pekalongan yang akan difokuskan di desa-desa pesisir Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Hal ini dikarenakan dari data yang disajikan dalam latar belakang permasalahan, capaian kesertaan KB Pria di desa-desa pesisir di wilayah Kecamatan Wonokerto rendah dibandingkan dengan desa-desa pesisir di Kecamatan Siwalan maupun Kecamatan Tirto.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, akan tetapi dalam penelitian ini juga digunakan beberapa instrumen lain yaitu pedoman untuk wawancara dan observasi. Pedoman untuk wawancara dan observasi yang dibuat khusus pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum implementasi kebijakan program Keluarga Berencana dalam upaya peningkatan capaian KB Pria di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Lofland (1984) dalam Moleong (2007:201) mengatakan, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, holistik terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana dalam Upaya Peningkatan Capaian

KB Pria di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan, maka penelitian ini menggunakan prosedur sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Moleong (dalam Herdiansyah, 2010:143) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu dokumen harian yang berupa catatan harian, surat pribadi, autobiografi dan dokumen resmi yaitu data-data laporan tertulis. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari dokumen resmi berupa Peraturan-Peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh BKKBN sebagai lembaga penyelenggara program Keluarga Berencana dan laporan bulanan yang dibuat oleh pelaksana program di lokasi penelitian.

2. Wawancara Mendalam

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan adanya improvisasi terhadap pedoman wawancara sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

3. Pengamatan atau Observasi

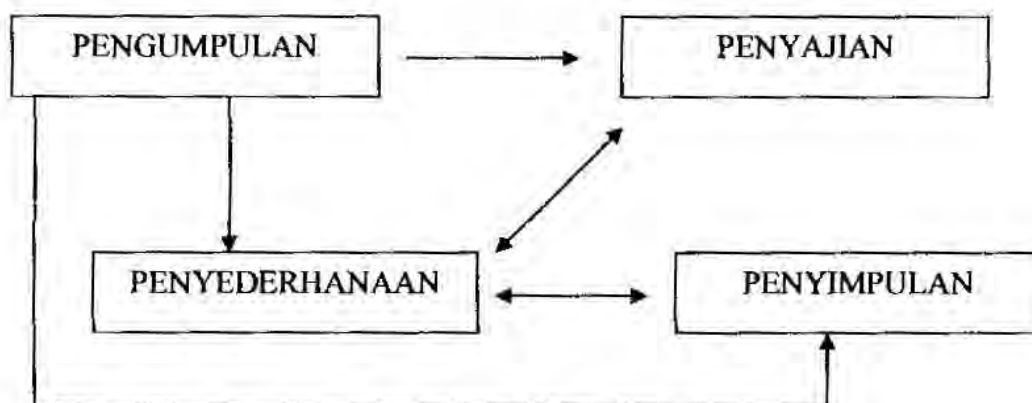
Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses implementasi kebijakan keluarga berencana dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke desa serta kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya capaian kb pria yang dapat mendukung hasil penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Moleong 2007:248).

Proses analisis pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verification* (Miles dan Huberman, 1992:15-20). Proses analisis data digambarkan sebagai berikut :

Komponen Analisis Data



Gambar 8

Sumber : Miles dan Huberman, 1992 : 15-20

Apabila dijabarkan maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2009:338). Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian (Moleong, 2007:247). Dengan kata lain proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Dengan demikian tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009:151) bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan yang menjadi lokus penelitian ini adalah Kecamatan Wonokerto yang difokuskan pada lima desa pesisir yaitu Desa Wonokerto Kulon, Desa Tratebang, Desa Api-Api, Desa Pecakaran dan Desa Semut.

Kecamatan Wonokerto merupakan kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari sebelas desa dan terbagi dalam dua wilayah yaitu Desa Pesisir dan Desa Non Pesisir. Kecamatan Wonokerto yang berjarak 22 Km dari Ibukota Kabupaten Pekalongan adalah pusat Kawasan Peruntukan Perikanan di Kabupaten Pekalongan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Secara astronomis Kecamatan Wonokerto terletak di 109'-110' BT dan 6'-7' LS dengan luas wilayah 15,91 Km². Bagian utara kecamatan ini adalah Laut Jawa, Kecamatan Tirto di sebelah timur, Kecamatan Wiradesa di sebelah selatan dan Kecamatan Siwalan di bagian barat.

2. Program Keluarga Berencana

Berdasarkan UU No 52 Tahun 2009, Keluarga Berencana adalah suatu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur

kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dari pengertian diatas terlihat bahwa Indonesia memiliki kepentingan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar terwujud keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Kebijakan Keluarga Berencana memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengatur kehamilan yang diinginkan
- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
- c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana
- e. Mempromosikan menyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan

Dalam perkembangannya, Program Keluarga Berencana mengalami “mati suri” setelah diberlakukannya otonomi daerah. Untuk itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan revitalisasi Program KB yang dilakukan secara fleksibel dan komprehensif sebagai berikut (BKKBN, 2013) :

a. **Pemerataan**

Percepatan pelaksanaan revitalisasi Program KB Nasional dilaksanakan dengan memperhatikan aspek geografis dan ketersediaan sarana/prasarana serta kondisi sosial budaya yang sulit dilakukan dengan cara-cara konvensional, sehingga kegiatan dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah nasional Indonesia.

b. **Keterpaduan**

Merupakan usaha yang dilakukan dengan memantapkan koordinasi dan keterpaduan khususnya pada aspek-aspek peningkatan ketahanan keluarga dan masyarakat terutama yang berada pada daerah-daerah pulau terluar, terpencil, tertinggal, kumuh perkotaan, perbatasan dan wilayah kepulauan, DAS dan pesisir pantai.

c. **Kualitas**

Merupakan usaha membangun keluarga kecil bahagia sejahtera yang memiliki rasa aman, tenang dan mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, bercirikan kemandirian dan keselarasan hidup dalam lingkungan masyarakat.

d. **Prioritas**

Percepatan pelaksanaan revitalisasi Program KB Nasional dilaksanakan dengan memperhitungkan anggaran dan sumber daya yang tersedia sehingga perlu dilakukan skala prioritas dengan tujuan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

3. Kesehatan Reproduksi Pria

a. Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria, Pasal 1 point 4 menyebutkan bahwa Peningkatan partisipasi pria adalah bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab para pria/suami dalam pelaksanaan Program KB dan Kesehatan Reproduksi. Selanjutnya di sebutkan bahwa hak reproduksi adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang kelas sosial, suku, umur dan agama mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai jumlah anak, jarak antara anak, serta menentukan kelahiran anak dan dimana akan melahirkan (BKKBN, 2009).

Masih tingginya tingkat kematian ibu melahirkan dan kehamilan yang tidak diinginkan (KDT) menjadi alasan utama perlunya kaum pria dilibatkan dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi. Data SDKI 2012 menunjukkan bahwa partisipasi kaum pria dalam ber KB masih sangat rendah, hanya 2 persen, terdiri dari kondom 1,8 persen dan vasektomi 0,2 persen. Kaum pria memegang peranan penting dalam keluarga, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi, menyangkut pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Upaya meningkatkan peran pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.

Namun salah satu permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kesertaan KB Pria adalah terbatasnya pilihan alat maupun obat kontrasepsi yang dapat digunakan oleh pria. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kirsten – M. Vogelsong dalam Training Courses Research Area For Male Fertility Regulation di Geneva sebagai berikut :

“very few options for men to initiate fertility control are currently available. Because of the potential for tremendous impact of a novel method of contraception for men in the developed and developing world, a number of organizations are conducting or supporting studies which focus on the male contraceptive aspect of reproductive health.”

Dari pernyataan tersebut Kirsten juga menyampaikan bahwa sejumlah organisasi sedang melakukan atau mendukung penelitian yang berfokus pada aspek kontrasepsi pria dan kesehatan reproduksi. Lebih lanjut, akan diagendakan penelitian yang komprehensif dalam aspek kontrasepsi pria yang membahas topik-topik berikut :

- 1) Peningkatan teknologi untuk vasektomi;
- 2) Peningkatan teknologi baru untuk kondom;
- 3) Kontrasepsi hormonal pria;
- 4) Imunokontrasepsi;
- 5) Keamanan metode kontrasepsi jangka panjang;
- 6) Penelitian fisiologi reproduksi pada laki-laki diarahkan untuk mengidentifikasi pengguna baru untuk pengaturan kesuburan.

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan akan menghasilkan temuan baru yang akan memberikan pilihan kontrasepsi bagi para pria

yang pada akhirnya mampu meningkatkan partisipasi pria dalam Program Keluarga Berencana.

Kebijakan peningkatan partisipasi pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi diarahkan untuk mendukung dan memperluas akses informasi, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi kaum pria sekaligus memperluas akses pelayanan KB Pria yang berkualitas. Beberapa kegiatan strategis yang dilakukan untuk mendukung peningkatan partisipasi pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi antara lain (BKKBN, 2014) :

- 1) Memberi pemahaman kepada kaum pria bagaimana gender dan norma-norma sosial dapat menempatkan mereka dan pasangan menikmati kesehatan reproduksi yang optimal, sehingga dapat menjadi sarana promosi alternatif untuk meningkatkan pola hidup sehat.
- 2) Menciptakan iklim yang kondusif serta memberi dukungan bagi pasangan dan keluarga untuk mendapat akses informasi serta pelayanan KB Pria yang berkualitas.

b. Metode Kontrasepsi Pria

Metode atau cara pria dalam ber KB memang tidak selengkap metode kontrasepsi pada wanita. Dalam metode kontrasepsi pria saat ini hanya dikenal Kondom dan Vasektomi (Medis Operasi Pria). Adapun cara lain yang lebih alami yaitu Senggama Terputus (*coitus interruptus*), namun metode ini masih diperdebatkan untuk dijadikan metode yang pasti.

1) Kondom

Menurut sejarah, kondom sudah diketahui sejak zaman mesir kuno yang dibuat dari kulit atau usus binatang. Atas perintah Raja Charles II di Inggris, dokter Condom membuat kondom dari kulit binatang dengan panjang 190 mm, diameter 60 mm, dan tebalnya 0,038 mm. Teknik dan biaya pembuatannya cukup mahal dan keberhasilannya masih rendah sebagai alat kontrasepsi.

Dokter Fallopio dari Italia membuat kondom dari linen dengan tujuan utama untuk menghindari infeksi hubungan seks pada tahun 1564. Dokter Hercule Saxonia pada tahun 1597 membuat kondom dari kulit binatang yang bila hendak dipakai direndam dulu. Kondom terbuat dari karet dikembangkan oleh dokter Hancock pada tahun 1944 dan Goodyer 1970.

Cara kerja kondom adalah menampung spermatozoa sehingga tidak masuk kedalam kanalis serviks. Diseluruh dunia dengan makin meningkatnya perkembangan penyakit hubungan seks, pemakaian kondom semakin meningkat.

Konsep kerja kondom adalah menghalangi tumpahnya sperma kedalam vagina sehingga spermatozoa tidak mungkin masuk kedalam rahim. Kegagalan kondom terjadi apabila karet kondom bocor atau robek dan menarik penis setelah lemah sehingga sebagian sperma dapat masuk vagina.

Keuntungan kontrasepsi kondom adalah murah, mudah didapatkan, tidak memerlukan pengawasan medis, berfungsi ganda dan dipakai oleh kalangan yang berpendidikan. Sedangkan kerugiannya adalah kenikmatan terganggu, mungkin alergi terhadap karet atau jellinya yang mengandung spermiside, dan sulit dipasarkan kepada masyarakat dengan pendidikan rendah (Manuaba,1998:478-479).

2) Vasektomi

Operasi pria yang dikenal dengan nama vasektomi merupakan operasi ringan, murah, aman dan mempunyai arti demografis yang tinggi, artinya dengan operasi ini banyak kelahiran dapat dihindari. Perkembangan metode operasi pria ini berkembang dan dapat diterima secara masal dengan hitungan satu metode operasi pria berbanding tujuh sampai delapan operasi wanita. Dimasa yang akan datang diharapkan Metode Operasi Pria akan terus berkembang dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat satu yaitu puskesmas.

4. Program Keluarga Berencana di Kawasan Pesisir

a. Pengertian Kawasan Pesisir

Menurut Dahuri (2000), wilayah pesisir adalah wilayah peralihan daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai.

Sedangkan menurut Bengen (2000:3) wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan lautan yaitu batas kearah daratan meliputi wilayah-wilayah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih terpengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam. Sementara batas kearah lautan adalah daerah yang terpengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar kelaut serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.

Dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Dari beberupu pengertian wilayah pesisir yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara wilayah darat dan wilayah laut dimana didalamnya terdapat aktifitas manusia yang memiliki karakteristik tersendiri yang terbentuk karena faktor sumber daya alam yang dihadapinya serta potensi kekayaan

alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan berkaitan dengan keberlangsungan sumber daya alam tersebut.

b. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang direpresentasikan oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi. Sifat produksi yang demikian memungkinkan tetapan lokasi produksi. Ini menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan elemen resiko pun tidak besar. Berbeda dengan masyarakat pesisir yang identik dengan nelayan, mereka menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka (*open access*). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang beresiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas dan terbuka (Satria, 2015:7-8).

Karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek yang telah diuraikan Satria (2015:16-26) sebagai berikut :

1) Sistem Pengetahuan

Kawasan pesisir yang diidentikkan dengan kawasan desa terisolasi cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Terkait dengan pengetahuan mereka dalam pekerjaan yaitu sebagai nelayan

umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan.

2) Sistem Kepercayaan

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Ritual-ritual yang dilakukan para nelayan antara lain dengan melakukan “*sowan*” atau mendatangi dukun atau suhu untuk memperoleh keselamatan ketika akan melaut, selain itu mereka juga melakukan tradisi “*cadranan*” yakni upacara rutin yang dilakukan setiap pertengahan bulan *Suro* (Muharram) untuk memberikan sesajian bagi “penghuni” pantai utara Jawa.

3) Peran Perempuan

Sebagian besar masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai buruh nelayan terjebak dalam kondisi kemiskinan yang bersifat struktural dimana mereka memiliki posisi yang lemah dalam pemasaran hasil laut. Hal tersebut mengharuskan para istri nelayan harus ikut menjalankan fungsi ekonomi baik dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan.

4) Posisi Sosial Nelayan

Salah satu penyebab rendahnya posisi sosial nelayan adalah keterasingan mereka yang tidak diketahui oleh orang luar. Keterasingan tersebut menyebabkan masyarakat non nelayan tidak mengetahui lebih jauh bagaimana dunia nelayan itu serta sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Apabila dilihat dari kacamata yang lebih luas, mengutip tesis yang dikemukakan oleh Goodwin (1990) yakni salah satu penyebab rendahnya posisi sosial nelayan karena ketiadaan kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik. Akibatnya nelayan terus dalam posisi dependen dan marginal. Tesis ini mengimplikasikan kapital menjadi sangat dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital maka semakin besar pula kesempatan untuk mempengaruhi proses kebijakan.

c. Program KB di Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir merupakan salah satu prioritas program KB Galciltas (Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan). Wilayah Galciltas identik dengan wilayah yang rentan terhadap kemiskinan, untuk itu diperlukan perlakuan khusus dalam penggarapan Program KB. Untuk memenuhi target pencapaian Program KB, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan perluasan wilayah program. Salah satu peluang yang sangat potensial untuk digarap adalah dengan menggarap Program KB di wilayah Galciltas. BKKBN sebagai lembaga pelaksana Program

Keluarga Berencana telah menetapkan suatu pedoman bagi Petugas Lini Lapangan atau PLKB yang mampu menjadi landasan operasional penggarapan daerah pantai yaitu Pedoman Operasional Gerakan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Daerah Pantai Di Tingkat Lini Lapangan. Sebuah buku yang di cetak pada tahun 1995 ini memuat langkah-langkah kegiatan mulai dari persiapan, langkah operasional, hingga evaluasi penggarapan KB di daerah pantai.

Meningkatkan kesertaan KB miskin merupakan prioritas dari upaya merevitalisasi Program KB melalui pelayan KB secara optimal. Hal ini tidak terkecuali wilayah Galciltas. Daerah Galciltas dipahami sebagai daerah atau wilayah di kabupaten yang relatif kurang berkembang dibanding daerah lain dan berpenduduk relatif tertinggal dalam skala nasional. Wilayah kabupaten digunakan sebagai unit terkecil daerah Galciltas karena sesuai kewenangan otonomi daerah yang sepenuhnya diberikan kepada pemerintah kabupaten. Penetapan daerah Galciltas memperhitungkan enam kriteria dasar yaitu sumber daya manusia (SDM), prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan, perekonomian masyarakat, aksesibilitas dan karakteristik daerah serta berdasarkan keberadaannya di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah pesisir (BKKBN, 2011).

Hal senada diungkapkan oleh Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dalam sambutannya di kegiatan yang bertajuk Refreshing Pelayanan KB Bergerak bagi Pengelola Mobil Unit Pelayanan (Muyan) di Bandung 2 Mei 2016 bahwa menjadikan pembinaan KB jalur wilayah

tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciltas) serta kepulauan dan kawasan pesisir merupakan salah satu kegiatan yang diprioritaskan. Hal tersebut sejalan dengan Agenda Prioritas Pembangunan ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (www.okezone.com, diunduh pada 28 Oktober 2016). Wilayah Galciltas dan kepulauan memiliki hambatan berupa terbatasnya akses terhadap pelayanan yang berkualitas karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, terutama fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis.

Salah satu studi yang dilakukan di Pakistan, dimana kesertaan KB baik itu oleh wanita maupun pria sangat rendah, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai di dekat tempat tinggal mereka, berikut ini adalah kutipannya.

“Absence of Family Planning/Reproductive Health accross the regions was prevailing in the same intensity. The majority of men and women have to travel outside in case of emergency roomates in a way Affect the choice of availing of Family Planning methods. A male from Sindh said “there is no such facility in our village to provide services on birth spacing or birth related complication. We have to go to the main city Sakrand the which is 14-16 kilometers away from our village”” (Mustafa, 2015).

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa hambatan program Keluarga Berencana bagi daerah-daerah yang masih tertinggal adalah tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh calon akseptor. Oleh sebab itu, BKKBN melakukan inovasi dengan Pelayanan KB Bergerak yang dapat dijadikan pilihan alternatif bagi pemerintah kabupaten dimana memiliki wilayah Galciltas, Kepulauan dan Kawasan pesisir dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan

KB dan kesehatan reproduksi (www.okezone.com , diunduh pada 28 Oktober 2016).

B. Hasil

1. Hasil Observasi Wilayah Penelitian

a. Desa Wonokerto Kulon

Desa Wonokerto Kulon merupakan salah satu desa pesisir yang merupakan pintu gerbang utama dari jalur pantura. Berdasarkan cerita sejarah, nama desa ini berasal dari Babadan Gambiran yang merupakan salah satu dukuh di Desa Wonokerto Kulon. Berdasarkan data BPS, luas tanah di Desa Wonokerto Kulon adalah 147.776 Ha dimana 4.451 Ha adalah tanah sawah dan 143.325 Ha adalah tanah kering, namun tanah sawah di desa ini dinilai tidak produktif. Pemukiman di Desa Wonokerto Kulon hanya 11% dari total luas tanah kering yang ada, sebagian besar digunakan untuk kolam atau tambak yang luasnya mencapai 65% dari total luas tanah kering.

Desa Wonokerto Kulon terdiri dari tiga dusun, enam RW dan 31 RT dengan jumlah penduduk 6.279 jiwa yang terdiri dari 3.196 laki-laki dan 3.083 perempuan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Desa Wonokerto Kulon Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
0-4	270	263
5-14	532	502
15-49	1850	1730
50-69	446	438
70+	80	129

Sumber : BPS Kab. Pekalongan

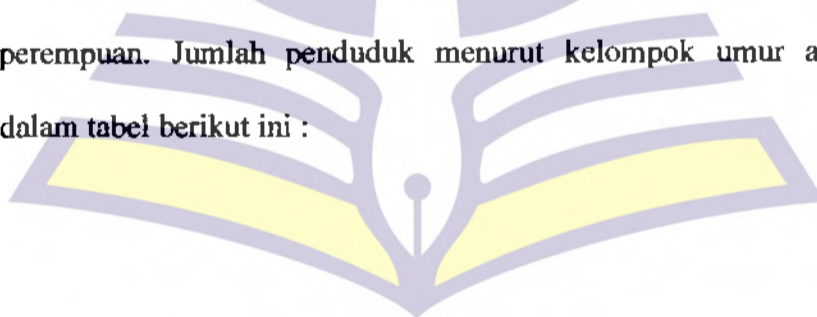
Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa di Desa Wonokerto Kulon didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu pada rentang usia 15-49 tahun. Diantara kelima desa pesisir di Kecamatan Wonokerto, Desa Wonokerto Kulon merupakan desa pesisir terpadat dengan jumlah rumah tangga 1.616 (BPS Kab. Pekalongan). Dari data mata pencaharian penduduk usia 15 tahun keatas, sekitar 45% (1.619 orang) penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan atau dalam bidang perikanan. Sedangkan yang bekerja dalam bidang pertanian padi dan palawija 33 orang, hortikultura 2 orang, perkebunan 206 orang, peternakan 7 orang, pertambangan 1 orang, industri 1.053 orang, listrik gas 1 orang, konstruksi 13 orang, perdagangan 385 orang, hotel/restaurant 90 orang, transportasi 41 orang, komunikasi 11 orang, keuangan 8 orang, jasa pendidikan 31 orang, jasa kesehatan 16 orang, dan jasa kemasyarakatan 77 orang. Sedangkan dari data pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagian besar penduduk di desa ini hanya tamat SD yaitu sebanyak 2.259 (40%).

Sejak terjadinya bencana rob pada akhir tahun 2015, lingkungan di desa Wonokerto Kulon menjadi sangat kumuh, jalanan menjadi becek, dan sebagian besar rumah tidak layak huni. Selain itu, terjadi peningkatan penganguran dikarenakan lahan tempat mereka bekerja seperti perkebunan dan kolam tambak terendam air rob.

b. Desa Api-Api

Desa pesisir selanjutnya adalah Desa Api-Api. Secara administratif, desa Api-Api terdiri dari 16 RT, 6 RW dan 2 Dusun. Kondisi sumberdaya pesisir desa Api-Api dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tambak bandeng. Luas lahan tambak untuk budidaya adalah sebesar 128.028 Ha. Komoditas unggulan desa ini adalah Bandeng dengan hasil yang dipasarkan sampai ke kabupaten lain. Selain itu, di desa ini terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Pekalongan.

Luas tanah di desa Api-Api adalah 221.053 Ha yang terdiri dari tanah sawah dengan luas 19.319 Ha dan tanah kering dengan luas 201.734 Ha. Penggunaan tanah kering sebagian besar adalah untuk kolam atau tambak yang mencapai 63% dari total tanah kering yang ada. Jumlah penduduk desa Api-Api adalah 4.818 Jiwa yang terdiri dari 2.432 laki-laki dan 2.386 perempuan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur akan terlihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Desa Api-Api Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
0-4	180	184
5-14	409	394
15-49	1384	1384
50-69	387	313
70+	55	90

Sumber : BPS Kab. Pekalongan

Dari tabel diatas, terlihat pula bahwa di desa Api-Api didominasi oleh penduduk dengan usia produktif dengan perbandingan yang cukup tajam. Masih dalam ciri sebagai desa pesisir, sebagian besar penduduk di desa Api-Api bekerja sebagai nelayan yaitu sebesar 46% dari jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 tahun ke atas. Sedangkan dilihat dari data jumlah penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan, sekitar 44% dari penduduk desa Api-Api hanya tamat sekolah dasar.

Seperti halnya dengan desa Wonokerto Kulon, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi banjir rob yang menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana tersebut.

c. Desa Pecakaran

Desa Pecakaran merupakan desa pesisir yang letaknya di bagian timur Kecamatan Wonokerto dan berbatasan dengan Kecamatan Tirto. Kondisi wilayah di Desa Pecakaran sangatlah gersang dengan kondisi jalanan yang

bergelombang. Secara administratif wilayah Desa Pecakaran terdiri dari tiga dusun. Jumlah RW sebanyak 8 RW dan terbagi menjadi 18 RT. Sumberdaya pesisir di Desa Pecakaran hampir sama dengan Desa Api-Api yakni berupa tambak dan persawahan. Pesisir Desa Pecakaran mengalami abrasi yang cukup parah sehingga banyak tambak warga yang hilang terkena genangan air Rob. Begitu juga dengan lahan pertanian yang menjadi tidak produktif dan memberikan dampak meningkatnya pengangguran di desa ini.

Luas lahan kering di Desa Pecakaran adalah 158.212 Ha dengan penggunaan terbanyak adalah tambak dengan luas sekitar 70%. Sedangkan luas bangunan atau pemukiman hanya 12% dari total penggunaan lahan kering.

Jumlah penduduk Desa Pecakaran adalah 3.825 jiwa yang terdiri dari 1.990 jiwa laki-laki dan 1.835 jiwa perempuan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Desa Pecakaran Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
0-4	178	155
5-14	377	328
15-49	1.129	1.045
50-69	251	233
70+	40	59

Sumber : BPS Kab. Pekalongan

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa Desa Pecakaran didominasi oleh penduduk usia produktif. Pekerjaan yang mereka jalani lebih banyak berkecimpung dalam bidang perikanan seperti nelayan sebanyak 830 orang atau sekitar 38%, pertanian 122 orang, hortikultura 52 orang, perkebunan 17 orang, peternakan 4 orang, kehutanan 1 orang, pertambangan 1 orang, industri 582 orang, listrik dan gas 3 orang, konstruksi 29 orang, perdagangan 439 orang, hotel dan restaurant 29 orang, transportasi 14 orang, komunikasi 3 orang, keuangan 2 orang, pendidikan 24 orang, kesehatan 7 orang dan jasa kemasyarakatan 38 orang. Sedangkan dalam hal pendidikan, sama halnya dengan desa pesisir lainnya, pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih didominasi oleh lulusan setingkat Sekolah Dasar.

d. Desa Tratebang

Desa Tratebang merupakan desa terkecil diantara desa-desa pesisir di Kecamatan Wonokerto. Sebagai desa pesisir, desa Tratebang memiliki lingkungan yang sangat gersang. Di desa ini terdapat sungai tempat berlabuh perahu-perahu nelayan dan terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai Kabupaten Pekalongan yang dapat ditempuh dari jalur pantura depan pasar wiradesa sekitar 7 Km ke arah utara. Desa Tratebang terdiri dari tiga RW, 11 RT dan 2 Dusun.

Luas lahan kering di Desa Tratebang adalah 107.726 Ha dengan penggunaan terbesar adalah untuk kolam atau tamhak seluas sekitar 80% dari total lahan kering yang ada. Sedangkan luas pemukiman warga hanya sekitar 12% dari total lahan kering yang ada.

Jumlah penduduk di Desa Tratebang adalah 2.260 jiwa yang terdiri dari 1.141 jiwa penduduk laki-laki dan 1.119 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur akan terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Desa Tratebang Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
0-4	83	92
5-14	209	175
15-49	670	664
50-69	150	153
70+	21	43

Sumber : BPS Kab. Pekalongan

Dari segi mata pencaharian, Desa Tratebang didominasi oleh para nelayan sekitar 43% atau 590 orang dan perdagangan maupun sektor industri yang menjadi pilihan warganya (data BPS Kab. Pekalongan Tahun 2015). Sedangkan dari tingkat pendidikan, masih sama dengan desa pesisir yang sebelumnya yaitu pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah setara Sekolah Dasar.

e. Desa Semut

Secara geografis Desa Semut berbeda dengan desa-desa pesisir lainnya. Penggunaan lahan kering di desa Semut didominasi perkebunan melati dimana menjadi pemasok bunga melati untuk pabrik teh di Kota Pekalongan. Ada dua RT di desa Semut yang terletak di bibir pantai dan

hanya bisa diakses dengan perahu karena lokasinya yang dipisahkan oleh muara sungai.

Desa yang memiliki 6 RW, 15 RT dan 4 Dusun ini memiliki lahan pertanian yang potensial namun semuanya menjadi tidak produktif ketika bencana Rob pada tahun 2015 dan merupakan bencana Rob terparah sepanjang tahun. Jumlah penduduk desa Semut adalah 1.825 jiwa yang terdiri dari 871 jiwa laki-laki dan 954 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 9

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Desa Semut Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
0-4	69	73
5-14	158	175
15-49	430	484
50-69	153	143
70+	54	72

Sumber : BPS Kab. Pekalongan

Tidak seperti desa pesisir lainnya, mayoritas penduduk di Desa Semut lebih memilih merantau ke luar daerah sedangkan profesi nelayannya hanya sekitar 15% (data BPS Kab. Pekalongan Tahun 2015). Dari tingkat pendidikan, Desa Semut cukup tertinggal diantara desa-desa pesisir, pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah setara Sekolah Dasar.

2. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari implementor program Keluarga Berencana (*Key Informan*) dan masyarakat sebagai penerima program. Implementor program KB dalam hal ini adalah Penyuluh KB, Kader KB desa (PPKBD) dan pemangku kepentingan di tingkat desa. Sedangkan masyarakat yang dipilih adalah para pria baik yang telah menggunakan alat kontrasepsi pria maupun yang belum menggunakannya. Data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Data Informan Penelitian

No	Kode Informan	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Status Informan
1	IP 1	43	Kader	SMP	Key Informan
2	IP 2	39	Kader	SMA	Key Informan
3	IP 3	58	PNS	SMA	Key Informan
4	IP 4	50	Nelayan	SD	Informan Biasa
5	IP 5	35	Wiraswasta	SMA	Informan Biasa
6	IP 6	52	Nahkoda	SD	Informan Biasa
7	IP 7	37	Nelayan	SMP	Informan Biasa
8	IP 8	42	Buruh	SD	Informan Biasa
9	IP 9	43	Nelayan	SMP	Informan Biasa
10	IP 10	68	Petani	SD	Informan Biasa
11	IP 11	30	Perangkat Desa	SMA	Key Informan
12	IP 12	38	Perangkat Desa	SMA	Key Informan

13	IP 13	39	Kader	SMA	Key Informan
14	IP 14	38	Kader	SMA	Key Informan
15	IP 15	48	PNS	SMA	Informan Biasa
16	IP 16	27	Kades	SMA	Key Informan
17	IP 17	42	Kades	SMA	Key Informan
18	IP 18	49	Perangkat Desa	SMP	Key Informan
19	IP 19	62	Kades	SD	Key Informan
20	IP 20	52	Kader	SMP	Key Informan
21	IP 21	60	Perangkat Desa	SD	Key Informan
22	IP 22	35	Perangkat Desa	SMA	Key Informan
23	IP 23	39	Kades	S1	Key Informan
24	IP 24	44	Perangkat Desa	SMA	Key Informan
25	IP 25	54	PNS	SMA	Key Informan
26	IP 26	48	Kader	SMA	Key Informan
27	IP 27	43	PNS	SMA	Key Informan

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Program KB Pria Di Kawasan Pesisir

Sebagaimana disebutkan dalam kajian teori, bahwa model yang digunakan untuk meneliti bagaimana implementasi Program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto adalah Model implementasi yang dikenal dengan Kerangka Analisis Implementasi yang digagas oleh Daniel

Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Dalam model tersebut ada 16 faktor yang terumuskan dalam tiga kategori atau variabel utama yang merupakan faktor-faktor atau sub-variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi secara keseluruhan. Namun untuk menghindari analisis yang terlalu luas maka peneliti hanya menggunakan beberapa sub-variabel saja yang dinilai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Program KB Pria di tingkat desa.

a. Karakteristik Masalah

Program Keluarga Berencana yang telah berjalan di Indonesia tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Berbagai permasalahan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari sasaran program yaitu masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa karakteristik masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi wilayah tempat tinggal mereka. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan jelas memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Untuk itu, penggarapan Program Keluarga Berencana haruslah diawali dengan mengidentifikasi karakter dari masyarakat sebagai penerima program sehingga program dapat diterima dengan baik. Gambaran mengenai karakteristik masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) **Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran di daerah pantai Kecamatan Wonokerto bersifat homogen dikarenakan para pria di daerah tersebut sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari informan IP 16 sebagai berikut :

“Tratebang 90% nelayan mbak, lokal maupun yang besar istilahe sampe keluar propinsi itu 90% nelayan karena yang 10% itu daratan seperti buruh trus guru, TNI juga ada disini” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Hal senada diungkapkan oleh informan IP 17 :

“mayoritas nelayan, kira-kira 85%” (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 19.30 WIB)

Begitu juga dengan pernyataan informan IP 23 :

“Sekitar 70% nelayan, kalo petani tambaknya 30%” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya pernyataan informan IP 19 :

“Semua nelayan, tani ne ki sitik (taninya sedikit). Ini ya, generasi yang ini itu semuanya masuk ke nelayan semua. Paling nggak 70%, pokoknya kita sudah ngalih ke arah situ semua” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Namun ada satu desa di wilayah pesisir Kecamatan Wonokerto dimana sedikit berbeda dengan desa-desa pesisir lainnya. Desa Semut merupakan desa yang terletak di bagian barat Kecamatan Wonokerto yang mata pencaharian utama warganya bukanlah nelayan, hal tersebut disampaikan oleh informna IP 12 sebagai berikut :

“Yo campur-campur. Sebagian besar malah perantauan, hampir 50% perantauan. Petani paling 25% tapi yowes berkurang, wong sawahe keno Rob si. Kalo nelayannya sedikit, paling 10%” (Wawancara : 8 Maret 2017 Pukul 08.30 WIB).

(Ya campur-campur, sebagian besar adalah perantauan, hampir 50% perantauan. Petani paling 25% tapi ya sudah berkurang karena lahan persawahan terkena banjir rob. Kalau nelayannya sedikit, paling 10%).

Hal tersebut dikarenakan penggunaan tanah kering di Desa Semut sebagian besar digunakan untuk pertanian atau kebun yaitu sekitar

43% dan kolam atau tambak sekitar 34%. Sedangkan untuk bangunan pemukiman hanya sekitar 20% (BPS Kab. Pekalongan).

Jumlah nelayan di Kecamatan Wonokerto meningkat tajam dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan bencana air rob yang tidak kunjung surut yang melanda hampir seluruh wilayah pesisir Kecamatan Wonokerto. Lahan pertanian menjadi tidak produktif dan lahan tambak menjadi rusak sehingga banyak petani darat beralih profesi menjadi nelayan, baik itu nelayan tradisional maupun nelayan kapal besar. Sesuai dengan pernyataan informan IP 19 sebagai berikut :

“Waktu ekonomi itu terbagi dari tambak, sekarang tambak mati kena rob, pertaniannya juga kena rob, jadi anak-anak kami yang muda itu masuk semua jadi nelayan” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Alasan utama mengapa mereka tidak memilih mencari pekerjaan di darat diungkapkan oleh informan IP 20 :

“Gampang bu, tanpa modal, Cuma modal tenaga sehat” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.00).

Hal senada juga disampaikan oleh informan sebagai berikut :

IP 26 :

“Gampang Bu, pergi gak bawa apa-apa, pulang bawa uang” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 10.30 WIB).

IP 23 :

“Kebanyakan karena terpengaruh, biasanya kan gini Bu ceritanya itu yang bagus-bagus, bukan jeleknya. Sedangkan melihat hasilnya kalo pulang bawa uang bisa mau beli apapun” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Sebagai nelayan, mereka terkenal dengan karakternya yang keras, hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan IP 16 “

“Kalo secara karakter umum kepribadian mereka kadang keras, yang jelas keras untuk perihal kekeluargaan itu kadang keras dan juga ya...kesannya aja. Tapi ndak, karakter mereka ada yang baik ada yang kurang lah istilahe. Ndak semua” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Selain itu diungkapkan pula oleh informan IP 19 :

“Karakteristik nya orang sini itu orang nelayan semua ya, orangnya keras. Kalo saya langsung ke masyarakat nelayan itu agaknya ya diterima tapi ya iya tok. Jadi betul kalo dipandang jauh-jauh itu keras-keras kalo nggak pernah ketemu ya wah ngeri sekali. Tapi kalo kita menelusuri setiap hari ya ndak papa. Nyatanya kegiatan apa disini ndak ada yang negatif” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Pernyataan informan IP 23 :

“Karena masyarakat Api-Api itu terdiri dari beberapa elemen ya, diantaranya nelayan, kalo nelayan kan njenengan tau sendiri kan katanya keras. Kalo karakter yang agak condong ke agama itu masyarakatnya yo biasa-biasa aja, dalam artian kalo yang agama ngurusi agama dan sosialnya. Kalo nelayan keras, dia kerasnya keras baik Bu, bukan keras yang jelek tapi keras yang kompak” (Wawancara : 17 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Namun kesan keras yang sebenarnya dari para nelayan dijelaskan oleh informan IP 17 sebagai berikut :

“InshaAllah sebetulnya Wonokerto Kulon itu karakternya lemah lembut mbak, hanya karena mereka itu melaut, gitu kan, nelayan itu ketika dilaut itu kan suara..kalo saya di darat bisa dengan suara seperti ini tetapi di laut nggak bisa,..

Ya, akhirnya ya kebawa ke darat karena mereka hampir 90% hidupnya kan ada dilaut. Jadi ketika mereka bicara kayak gini dilaut itu kan pada kenceng akhirnya juga sama-sama ketika di darat ya kayak gitu. Jadi nanti orang yang melihat orang lain atau orang luar Wonokerto yang melihat orang-orang nelayan saling berbicara ketika didarat itu kayak orang bertengkat itu karena suaranya kenceng-kenceng padahal mereka bicara biasa karena mungkin juga gurauan-gurauan ketika dilaut karena semuanya laki-laki kan karena di laut

bebas bergurau kan mungkin ya terbawa kebiasaan itu di darat. InshaAllah ya masyarakat pantai itu masyarakat Wonokerto Kulon itu ya lemah lembut, gotong royongnya bagus apalagi dengan kondisi desa yang seperti ini memang dibutuhkan semangat kebersamaan itu” (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Informan berikut ini :

Informan IP 27 :

“Walaupun mereka bahasanya kasar, tapi sebenarnya hatinya baik suara keras karena terpengaruh dari suara mesin, karena tidak ada pantulan. Jadi mereka itu kalo ngomong keras tapi sebenarnya hatinya juga ndak keras seperti pembicaraannya” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.30 WIB).

Informan IP 25 :

“Karakteristik masyarakat desa Api-Api dan desa Pecakaran karena itu berbatasan dengan laut dan pesisir, dia itu kebanyakan orangnya orang nelayan semua. Kebanyakan orang nya tidak dirumah, jarang dirumah bapak-bapaknya, dan dia itu karena biasa dilaut orangnya keras, kalo bicara nadanya tinggi, kenceng karena biasa di lepas pantai. Orange ki nek didelok (Orangnya kalau dilihat) lebih keras kalo dibandingkan dengan yang bukan nelayan. Koyok sangar-sangar (kelihatan keras-keras) padahal ya tidak” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.30 WIB).

Dari deskripsi diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto didominasi oleh masyarakat nelayan dimana rata-rata tiap desa mencapai diatas 70%. Sama halnya dengan kawasan pesisir lainnya, dominasi profesi nelayan disebabkan karena sumber daya alam yang tersedia sangat memungkinkan bagi mereka untuk memanfaatkannya. Namun di lokasi penelitian diketahui bahwa terdapat alasan lain yang membuat mereka akhirnya memilih menjadi nelayan antara lain adanya musibah banjir rob yang telah merusak lahan pertanian dan tambak di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto. Selain itu, angkatan muda di lokasi penelitian tergiur menjadi nelayan dikarenakan pengaruh lingkungan sekitarnya.

Pekerjaan yang dinilai tanpa modal finansial ini membuat mereka memilih menjadi nelayan di usia yang masih sangat muda.

Masyarakat pesisir dikenal sebagai masyarakat yang sangat keras. *Stereotype* ini sangat terlihat jelas dari nada bicara mereka yang sangat tinggi. Namun dari hasil wawancara dengan para informan, mereka menjelaskan bahwa suara yang keras atau bernada tinggi diakibatkan karena kebiasaan komunikasi yang dilakukan di lepas pantai harus dengan suara yang lantang karena tidak adanya pantulan suara. Selain itu suara mesin kapal yang bising pun membuat mereka harus berbicara dengan keras agar di dengar oleh lawan bicaranya.

2) Sifat Populasi

Populasi dalam penelitian ini difokuskan pada pria di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto yang masih masuk dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS). Hal ini dikarenakan para pria sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan terhadap pemakaian alat kontrasepsi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan mereka yang bisa dilihat dari tingkat pendidikan serta budaya yang berlaku dalam keluarga masyarakat pesisir.

Tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Kecamatan Wonokerto masih terbilang rendah, pernyataan tersebut disampaikan oleh informan IP 17 :

"Nelayan itu rata-rata SMP, karena melaut itu tidak butuh ketrampilan khusus kayak bekerja di darat" (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Begitu juga dengan pernyataan informan IP 19 :

"Tamat SMP sudah melaut bu, la gimana lapangan kerja disini nggak ada, adanya Cuma itu" (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Bahkan informan IP 16 menyatakan demikian :

"Kalo nelayan yang tua SD nggak lulus" (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB)

Sekalipun tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kecamatan Wonokerto sudah meningkat, namun tetap saja untuk berprofesi sebagai nelayan mereka merasa tidak perlu melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti pernyataan informan IP 20 sebagai berikut :

"Saiki (sekarang) sekolah SMA banyak, kalo yang perguruan tinggi bisa dihitung pake jari. Kalo nelayan SD, SMP. Yang nahkoda SD tidak tamat bu"

(Sekarang sekolah SMA banyak, kalau yang perguruan tinggi bisa dihitung pakai jari. Kalau nelayan SD, SMP. Yang nahkoda SD tidak lulus bu). (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB).

Bahkan beberapa diantara mereka ada yang mengikuti orang tuanya melaut sejak usia dini, berikut yang disampaikan informan IP 1 :

"Pokokke 15 taun bu, wong lulus SD kadang melu wong tuwone ngelaut" (Pokoknya 15 tahun bu, lulus SD kadang ikut orang tuanya melaut). (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Begitu juga yang disampaikan oleh informan IP 23 :

"Minimal SMP. Biasanya kalo SMP sudah lulus, nganggur dulu nunggu usia 17 tahun terus ikut melaut" (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Selain tingkat pendidikan, hal yang dapat mempengaruhi pemakaian alat kontrasepsi adalah budaya atau kebiasaan. Nelayan-nelayan yang ikut kapal besar, biasanya akan meninggalkan keluarganya antara 3-6 bulan, dalam setahun mereka hanya pulang dua kali. Jadi sebagian besar masyarakat di desa pesisir Kecamatan Wonokerto pada waktu-waktu tertentu didominasi oleh kaum perempuan, seperti halnya pernyataan informan IP 16 sebagai berikut :

“Kalo pekerja nelayan yang katakan besar, 4 bulan atau 3 bulan sekali pulang ataupun yang luar propinsi itu bisa dibilang kalo habis idul fitri desa ki desa rondo, karena semua bapak-bapaknya melaut”
(Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Hal senada diungkapkan oleh informan IP 1 :

“Wong nek ngambeng utowo walimahan sakniki ibu-ibu. Kadang-kadang lebaran bek orak ono, do melu kontrak”
(Kalau acara selamatan atau walimahan sekarang yang ikut ibu-ibu. Kadang lebaran saja tidak ada orang, semua ikut kontrak).
(Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Itulah mengapa para pria menyerahkan urusan KB kepada para istrinya, seperti yang disampaikan informan IP 9 :

“Kalo nelayan nggak KB ndak papa, masalahe pertemuane jarang”
(Wawancara : 3 Maret 2017 Pukul 17.00 WIB).

Begitu juga pernyataan informan IP 3 :

“Untuk partisipasi kb pria memang sangat kurang sekali. Dia memang cenderung kalo kb yang disuruh KB ya wanitanya kecuali kalo memang wanitanya itu sudah punya anak banyak kemudian tidak bisa menggunakan kontrasepsi yang lain mungkin kondom dia masih mau, kalo MOP memang kurang diminati” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Dalam hal pemilihan alat kontrasepsi, para wanita di desa-desa pesisir Kecamatan Wonokerto cenderung memilih kontrasepsi jangka pendek, seperti suntik dan pil. Seperti pernyataan informan IP 20 :

“Sini banyaknya suntik bu, kesadaran sendiri. Kalo implant sama MKJP harus dioprak-oprak. Disini kalo habis melahirkan langsung suntik bu, tapi nanti berhenti, “aku tak mendeg bu, bojoku urung muleh, nelayan, pak melu meneh nek bojoku pak bali”. Wong kene ki kokui bu, nek melu suntik mengko leren, ngko pan bojone pak bali, mboh tengah wengi bidane di dodog nyong pak suntik KB, bojoku pak bali”

(Disini banyaknya suntik bu, kesadaran sendiri. Kalau implant sama MKJP harus disuruh-suruh. Disini kalau habis melahirkan langsung suntik bu, tapi nanti berhenti. “saya mau berhenti suntik bu, suami saya belum pulang, nelayan, nanti saya suntik lagi kalau suami saya mau pulang”. Orang sini seperti itu bu, kalau suntik nanti berhenti, nanti kalau suaminya mau pulang, sekalipun tengah malam mengetuk rumah bu bidan untuk suntik KB).

(Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan IP 26 :

“Kalo suaminya pergi ya nggak KB. Nanti kalo pulang kurang seminggu kan sudah bel-bel an ra (telepon) baru ikut suntik”
(Wawancara : 18 April 2017 Pukul 10.30 WIB).

Dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran dari program KB Pria adalah pria yang masih masuk dalam kelompok Pasangan Usia Subur (PUS). Sifat dari kelompok sasaran dapat dilihat dari tingkat pendidikan mereka sebagai dasar untuk menerima atau menyerap informasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata pendidikan para nelayan masih sangat rendah. Mereka beranggapan bahwa menjadi seorang nelayan tidak membutuhkan jenjang pendidikan formal yang tinggi, mereka hanya butuh keberanian dan pengalaman.

Mayoritas pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto memilih menjadi nelayan kontrak yang melaut hingga 3-6 bulan

lamanya. Hal tersebut membuat pengalihan tanggungjawab rumah tangga dibebankan kepada para istri termasuk dalam hal penggunaan alat kontrasepsi. Mereka beranggapan bahwa rendahnya frekuensi pertemuan dengan pasangan sama halnya dengan KB secara alami.

3) Derajat Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Perubahan perilaku masyarakat pesisir dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana khususnya untuk para pria bisa dilakukan dengan mengidentifikasi pengetahuan mereka tentang program KB itu sendiri maupun bagaimana implementor program dalam hal ini Penyuluh KB secara intensif melakukan penyuluhan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diperoleh hasil bahwa mereka sudah mengetahui dengan benar apa manfaat program KB. Berikut pernyataan informan :

Informan IP 7 :

“Yo ora kائي nggo nggawe ngarang-ngarangi peranakan jare. Kekerepen do bae bebane tambah akeh”

(Ya tidak apa-apa untuk mengurangi kehamilan katanya, terlalu sering juga bebannya tambah banyak). (Wawancara : 2 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 4 :

“Wong niku kangge pengaturan lare. Umpami gadhah lare kathah tapi nopo niku nek masalah pangan nggeh saget siyam tapi kan perawatane niku seng angel”

(Itu untuk pengaturan anak. Kalau punya anak banyak tapi kalau masalah makan kan bisa puasa tapi kan kalau perawatannya kan susah). (Wawancara : 1 Maret 2017 Pukul 16.30).

Begitu juga dengan pernyataan informan IP 23 :

“Jaga Jarak kelahiran” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Sama halnya dengan yang diungkapkan informan IP 24 :

“Denger-denger manfaatnya ya untuk mengatur kelahiran, untuk kesehatan, tapi itu kan cuman analisa ya, tapi semua kan Allah yang ngatur” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 10.30 WIB).

Menurut keterangan informan berikut ini, penyuluhan yang intensif mampu merubah perilaku maupun persepsi para pria terhadap alat kontrasepsi pria, berikut pernyataan informan IP 3 :

“Yo banyak-banyak penyuluhan mbak, tentunya kepada calon akseptor nggeh. Penyuluhan tentang MOP itu tidak menyebabkan lemes dan nanti diceritakan memakai KIE kit itu, kemudian motivasinya itu bersama-sama dengan orang yang sudah ikut MOP dan tidak terjadi kasus apa-apa, karena yang sudah melaksanakan kan luweh enak daripada saya petugas” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Namun hal yang berbeda ditemukan di tingkat desa. Sesuai hasil wawancara dengan informan IP 1 :

“Mboten nate penyuluhan seng jaler, wong ora mesti ketemu bapak-bapak. Soale nek nelayan ki do sibuk sendiri-sendiri”
(Tidak pernah penyuluhan kepada bapak-bapak, karena tidak selalu ketemu. Karena mereka nelayan jadi sibuk sendiri-sendiri).
(Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Hal serupa disampaikan oleh informan IP 2 :

“Selama ini saya belum pernah, wong ngumpulin orange susah, jarang dirumah. Kalo ABK selama dirumah ya cari kerjaan lain”
(Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Kalaupun dilakukan penyuluhan, kegiatan tersebut tidak bersifat formal, berikut pernyataan informan IP 26 :

“Ndak khusus dikumpulkan, paling guyon-guyon, kae wedokmu penyakiten varises, mbok kowe po'o seng metu”
(Tidak khusus dikumpulkan, paling cuma bercanda, itu istriku kena penyakit varises, kamu saja yang ikut KB). (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 10.30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kelompok sasaran tentang manfaat program KB sudah cukup bagus. Hal tersebut sebenarnya bisa dijadikan peluang untuk merubah perilaku pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto untuk berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi pria. Namun dari wawancara dengan *key informan*, sosialisasi KB Pria jarang dilakukan yang pada akhirnya pencapaian KB Pria di lokasi penelitian sangat rendah.

Karakter dari masalah rendahnya capaian KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto adalah kondisi masyarakat di lokasi penelitian terutama kelompok sasaran yaitu para pria yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melaut sehingga mereka beralasan tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Selain itu, masalah yang paling krusial adalah minimnya sosialisasi khusus KB Pria yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh KB (PKB). Hal tersebut membuat kelompok sasaran mendapatkan informasi yang kurang akurat mengenai KB Pria.

b. Daya Dukung Peraturan

Dalam hal variabel daya dukung peraturan, implementor program KB mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa memiliki peranan yang sangat penting. Upaya ini berkaitan dengan bagaimana mereka mampu mengintegrasikan semua mitra yang berkepentingan hingga memantapkan komitmen terhadap pelaksana program di tingkat desa.

1) Integrasi Organisasi Pelaksana

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana, Penyuluh KB tidak dapat bekerja sendiri. Seperti misalnya dalam pelayanan KB, mereka harus bekerjasama dengan Puskesmas. Di Kecamatan Wonokerto, kerjasama dengan Puskesmas yang berjumlah dua unit sudah berjalan dengan sangat baik. Berikut pernyataan informan IP 3 :

“Kerjasama dengan puskesmas untuk pelayanan KB itu sudah ada jadwalnya tiap hari rabu baik di KKB 1 dan 2 untuk MKJP. Tapi untuk yang Pil, Kondom dan Suntik bisa setiap hari. Kalo untuk MOP, belum ada tenaga atau dokter yang dapat melayani MOP” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Selain itu, berikut pernyataan informan IP 25 :

“Yo kalo ada pelayanan yo, sebelumnya kami harus konsultasi kesana dulu, karena disini Puskesmasnya itu kondisinya itu ijek didandani, kondisinya banjir. Jadi siap tidaknya di Puskesmas kita harus kesana dulu untuk menyiapkan, kalo bidannya sudah siap baru akseptornya kita calling” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Untuk pelayanan MOP atau Vasektomi memang belum bisa dilayani di Puskesmas Kecamatan Wonokerto. Kemudian selain dengan Puskesmas, Penyuluh KB Kecamatan Wonokerto telah melakukan koordinasi rutin dalam hal memantapkan komitmen terhadap keberhasilan Program KB. Dari koordinasi dengan Camat, Kepala Desa hingga Tokoh Agama di Desa. Hal tersebut diungkapkan oleh informan IP 3 :

“Dengan Pak Camat, tentunya kita setiap ada kegiatan mesti koordinasi dengan Pak Camat, begitu juga ke Desa, kalo ada moment-moment tertentu atau kegiatan sesuatu apapun mesti koordinasi dulu dengan kepala desa. Tokoh agama itu kita koordinasi istilaha advokasi ya memberikan biar dia itu mendukung program KB, kita pendekatan untuk dia misalnya didalam tokoh agama itu kan misalnya kegiatan di Mushola

itu dia bisa menyampaikan tentang program KB, kemudian di acara hajatan.

Untuk kelompok keagamaan setiap tahun kita laksanakan dalam moment-moment seperti Bhaksos Muslimat dan Aisyiyah.

Koramil itu biasanya pada waktu bhaksos TNI kemudian Polsek pada waktu Bhayangkara itu tiap tahun sekali nggih” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Terkait dengan Kegiatan Rakordes dan Rakorcarn, hal senada disampaikan oleh informan IP 25 :

“Ya kita selalu koordinasi dengan Pak Camat, selaku kepala wilayah di kecamatan sini, sebulannya ya kita ada Rakor bersamaan dengan rapat dinas, dari situ kita menyampaikan program kami”

“Kalo Rakordes, itu dari kecamatan kita bawa ke desa. Nanti di desa, masalah-masalahnya kan berbeda-beda itu, nanti dipecahkan di Rakordes masing-masing” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Namun untuk koordinasi maupun pendekatan dengan tokoh informal nelayan di Kecamatan Wonokerto nampaknya belum tersentuh oleh Penyuluh KB, hal tersebut sesuai dengan pengakuan informan IP 3 :

“Terus terang saja untuk di Kecamatan Wonokerto yang saya alami memang untuk tokoh nelayan nya saya belum begitu ada koordinasi ke tokoh nelayan” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan informan IP 25 :

“Selama ini kok kami belum pernah mendekati pada kelompok-kelompok nelayan yang ada karena kelompok nelayan itu kan menemuinya sulit, soalnya beberapa bulan mau pulang nya kan belum tentu, jadwalnya itu yang sulit” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Integrasi Organisasi Pelaksana Program KB di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto dapat dikatakan sudah bagus. Kerjasama dengan mitra pelayanan program serta koordinasi vertikal dan horisontal sudah berjalan dengan baik. Namun pelayanan KB Pria di Kawasan Pesisir belum maksimal, sekalipun pelayanan alat

kontrasepsi kondom dapat dilakukan setiap hari akan tetapi mitra pelayanan yaitu Puskesmas belum mampu untuk melayani MOP.

Dalam pendekatan maupun koordinasi dengan tokoh informal, pelaksana program belum menasar kelompok nelayan ataupun tokoh nelayan. Dalam penggarapan wilayah pantai tokoh nelayan merupakan tokoh informal yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto menganut budaya paternalistik dimana pimpinan menjadi tokoh panutan.

2) Rekrutmen dari Pejabat Pelaksana

Pejabat pelaksana Program KB di Kecamatan Wonokerto meliputi Penyuluh KB di tingkat kecamatan dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di tingkat desa yang terdiri dari kelompok PPKBD untuk level desa, Sub-PPKBD di level RW dan Kelompok KB di level RT. Orang-orang yang masuk dalam pelaksana program KB di tingkat desa di rekrut oleh Penyuluh KB dengan melalui persetujuan Kepala Desa. Mereka diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang program KB itu sendiri sehingga mampu menjadi kepanjangan dari Penyuluh KB. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa beberapa PPKBD telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program KB, seperti terlihat dari pernyataan informan berikut ini :

- Informan IP 20 :

“KB kui jareku biso nggo ngatur ekonomi, anak sedikit bisa nyekolahke sampe perguruan tinggi ngaten”

(KB itu kalau menurut saya bisa buat mengatur ekonomi, kalau anaknya sedikit bisa menyekolahkan samapai perguruan tinggi). (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

- Informan IP 14 :

“KB niku kangge ncegah kelahiran untuk jangka panjang” (KB itu untuk mencegah kelahiran jangka panjang). (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB).

- Informan IP 26 :

“Yo meringankan beban, kayomono meringankan beban keluarga biar lebih sejahtera”
(Ya meringankan beban, maksudnya meringankan beban keluarga agar lebih sejahtera). (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 10.30 WIB).

- Informan IP 13 :

“Kalo KB menurut saya wong itu mengatur jarak kelahiran si bukan apa berarti mencegah seseorang itu mempunyai anak, cuman mengatur jarak kelahiran supaya mereka itu bisa ngopeni (merawat) yang besar, kalo pingin punya anak lagi kan sudah siap segala sesuatunya, kayak gitu” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Selain pengetahuan dasar, para SKD juga diharuskan dapat mengetahui tugas-tugasnya dengan pasti yang mampu menunjang tercapainya keberhasilan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para SKD hanya mengetahui tugas untuk meningkatkan capaian kesertaan KB dalam penggunaan alat kontrasepsi. Berikut hasil wawancaranya :

- Informan IP 14 :

“Yaa pendataan, mencari akseptor baru, penyuluhan masalah KB dan Posyandu” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB).

- Informan IP 20 :

“Tugasnya untuk mencari akseptor baru, la kui karo ngoprak-oprak yang belum ikut saya ajak ikut KB”

(Tugasnya untuk mencari akseptor baru, ya itu sekalian menyuruh yang belum ikut KB). (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

- Informan IP 26 :

“Pendataan dan menulis laporan R/I/PUS” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 10.30 WIB).

- Informan IP 13 :

“Ya..memotivasi seseorang untuk ikut KB, untuk mengatur jarak kelahiran itu tadi. Kalo KB kan tidak hanya meliputi KB tok yo, disitu kan mencakup keseluruhan, pendidikannya ada, tentang balitanya ada, lansi, remajanya, bumilnya disitu kadang disinggung juga kan, semuanya..bagaimana dia setelah melahirkan harus ikut KB apa” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Dalam mengelola Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Penyuluh KB harus secara rutin melakukan pembinaan untuk memantapkan komitmen mereka agar program dapat berjalan baik. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin seperti yang diungkapkan oleh informan IP 3 :

“SKD tiap bulan ada pertemuan rutin, biasanya kegiatannya sesudah tanggal 25 nggeh. Kemudian pertemuannya itu bergilir ke desa-desa, kegiatan tersebut biasanya SKD memberikan laporan hasil akseptor baru pada bulan itu nggeh, kemudian kegiatan kami juga mengevaluasi hasil-hasil kegiatan dari bulan tersebut kemudian merencanakan akan ada kegiatan apa untuk bulan yang akan datang” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Begitu juga yang disampaikan oleh Informan IP 25 :

“Pertemuan SKD setiap bulan di kecamatan. Isinya ya evaluasi, rencana kegiatan bulan ini dan menanggulangi masalah-masalah di desa masing-masing” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Bentuk pembinaan yang dilakukan Penyuluh KB kepada SKD di ungkapkan secara beragam oleh informan berikut ini, antara lain :

- Informan IP 13 :

“Diberi target, harus mencapai target berapa, untuk e..apa ya..kan misale yang suntik harus dapat berapa, di evaluasi, tapi paling tinggi juga paling 75 atao 80, itupun KB-KB tertentu”
(Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

- Informan IP 20 :

“Yo apan Bu Susi dapat laporan dari Kabupaten pokokke disampaikan karoan SKD. Trus dievaluasi”
(Kalau Bu Susi mendapat laporan dari Kabupaten nanti disampaikan kepada SKD. Terus di evaluasi). (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

- Informan IP 26 :

“Kalo ada informasi dari Kabupaten disampaikan dan evaluasi” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 10.30 WIB).

- Informan IP 14 :

“Ngisi laporan C1, nyuwun potokopi saking PLKB, laporan tiap bulan pas pertemuan”
(Mengisi laporan C1, minta fotokopi ke PLKB, laporan setiap bulan waktu pertemuan). (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa rekrutmen Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang salah satunya adalah PPKBD atau lebih dikenal dengan SKD telah berjalan dengan baik. Mereka telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program dan deskripsi tugas masing-masing. Dari hasil wawancara pula dapat disimpulkan bahwa pemantapan komitmen terhadap para SKD dilakukan melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan secara rutin sebulan sekali oleh Penyuluh Keluarga Berencana.

3) Akses Formal

Program Keluarga Berencana tidak akan berhasil apabila tidak ada partisipasi masyarakat didalamnya. Dalam implementasi program KB Pria, partisipasi para pria yang telah menjadi akseptor KB baik itu Kondom maupun MOP diakomodasi dalam suatu wadah atau kelompok yang bernama Prio Utomo. Dalam prakteknya, Penyuluh KB harus melakukan pembinaan yang rutin kepada kelompok Prio Utomo agar para akseptor tersebut merasa terayomi. Di Kecamatan Wonokerto, pembinaan kelompok Prio Utomo tampak dalam pernyataan Informan IP 3 dibawah ini :

“Ya mestinya yang ikut KB Pria itu dikumpulkan kemudian tidak menutup kemungkinan dengan orang-orang yang belum ikut KB Pria juga karena disitu kan bisa ngomong-ngomong bertukar pengalaman nantinya bisa sampe kesitu. Yang belum ikut MOP misalnya atau yang belum pernah pake Kondom biar mengikuti KB Pria tersebut”
(Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Testimoni para akseptor KB Pria diharapkan dapat membantu Penyuluh KB dalam memotivasi para pria yang belum menjadi akseptor. Hal tersebut diyakini mampu memberikan gambaran yang nyata sehingga calon akseptor KB Pria percaya.

Namun dari hasil penelitian didapatkan bahwa kelompok Prio Utomo di Kecamatan Wonokerto tidak berjalan maksimal, berikut pengakuan informan IP 3 :

“Untuk di Kecamatan Wonokerto karena memang peran prianya itu sangat minim jadi untuk Prio Utomo itu sementara tidak berjalan dengan baik mba karena memang peserta prianya itu sangat sedikit”
(Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Lain halnya dengan pernyataan informan IP 25, sebagai berikut :

“Desa Api-Api sama Desa Pecakaran itu Prio Utomo nggak ada soalnya disana peserta KB nya jarang, jadi belum terbentuk”
(Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Dari deskripsi diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program belumlah maksimal. Kelompok Prio Utomo yang merupakan kumpulan dari para akseptor yang telah terlayani belum bisa dibentuk dikarenakan sedikitnya jumlah akseptor pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto.

Variabel ini dapat pula disebut variabel isi kebijakan dimana dalam variabel ini memuat peran pelaksana program dalam mengimplementasikan kebijakan. Dari hasil penelitian, pelaksana program menggunakan strategi penggarapan lini lapangan dalam konteks umum. Kegiatan perencanaan program dilakukan seperti wilayah lain yang tidak memiliki karakteristik khusus sehingga pendekatan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat pantai belum tersentuh.

c. Variabel Non Peraturan

Variabel non-peraturan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi lingkungan kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Wonokerto khususnya di kawasan pesisirnya yang meliputi lima desa pesisir yaitu Desa Semut, Dese Tratebang, Desa Wonokerto Kulon, Desa Api-Api dan Desa Pecakaran.

1) Kondisi Sosial dan Ekonomi

Konsisi ekonomi masyarakat pesisir sangat beragam. Kawasan pesisir di Kecamatan Wonokerto didominasi oleh nelayan-nelayan yang hanya berstatus sebagai buruh atau Anak Buah Kapal (ABK). Pendapatan mereka diperoleh dari sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh juragan kapal. Juragan kapal rata-rata tidak tinggal di desa-desa pesisir tersebut, mereka merupakan orang luar Kecamatan Wonokerto seperti di Kota Pekalongan hingga Jakarta.

Para ABK dipimpin oleh seorang Nahkoda atau Jurumudi. ABK mendapat bagian dari hasil penjaringan ikan dengan persentase 1:10 dari Juru Mudi atau Nahkoda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan IP 2 yang juga merupakan istri nelayan :

“Satu kapal itu buruhnya ato ABK nya tigapuluh, nahkodanya satu. Nahkoda nanti dapatnya 10, ABK dapat 1. Pembagiannya kan kayak gitu. Nanti kalo kepengkok ya yang nanggung jurumudi. Misalkan ABK sudah kasbon sama juragan trus nggak nutup itu nanti yang menutup semua itu ya Jurumudi bu, sebab kakak saya ya kayak gitu” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Dari hasil pembagian tersebut, buruh nelayan atau ABK mendapatkan porsi pendapatan yang sangat sedikit, berikut pernyataan informan IP 1 :

“Ada lagi yang ke pacitan Cuma setengah bulan dapatnya Cuma limaratus. Setengah bulan Cuma limaratus bu!! Kalo istrinya nggak bisa mbatik ya susah, anaknya nangis dikunci dirumah biar nggak jajan. Ada sumbangan, mau nengok orang sakit, ada orang beranak, pasti kan ngasih gula walaupun sekilo, gimana coba bu, siraha mumet bu. Kalo ABK yang kontrak bon dulu paling 1,5 juta satu orang selama melaut 3 bulan. La nanti istrinya ngebon ke warung-warung. Gini bu, kalo ndak ada batik bu susah. Jarebasan nglilir cekelane kompor nggo mbatik, nek telong ndino, rong ndino entuk seket kan mlayan keno nggo nyambung nggo tuku bumbon, tuku trasi, nggo nggawe ngelong utang. La nek ora kokui yo ora njajan pancen. La nanti kalo pulang nanti cok mboten nutup, yo pancen tah cok ada yang dapat lebih, tapi kan paling beberapa orang”

(Ada lagi yang ke Pacitan cuma setengah bulan dapatnya uang cuma limaratus ribu. Kalau istrinya tidak jadi buruh batik ya susah, anaknya menangis dikunci dirumah biar nggak jajan. Ada sumbangan, mau ngok orang sakit, ada yang lahiran pasti kan ngasih gula walaupun satu kilogram, gimana coba Bu, kepalanya pusing Bu. Kalau ABK yang kontrak pinjam dulu paling 1,5 juta satu orang selama melaut 3 bulan. Terus nanti istrinya pinjam ke warung-warung. Ibaratnya terbangun dari tidur langsung membatik, kalau 2-3 hari dapat limapuluh ribu kan lumayan bisa untuk beli bumbu masak dan untuk mengurangi hutang. Kalau tidak seperti itu ya memang susah. Kadang kalau pulang dari melaut hasilnya tidak bisa menutup hutang. Memang ada yang dapat lebih tapi kan hanya beberapa orang saja). (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Hal yang sama diungkapkan oleh informan IP 16 :

“Perhari dibawah 70 ribu. Tapi kalo misal nelayan yang besar itu sekali pulang itu 4 bulan sekali itu bersih dapat 3 juta, tetapi kalo kita bagi dengan harian, kebutuhan harian trus lain-lain, itu sebenarnya mines. Nah, jadi bisa dibilang untuk standar ekonomi atau penghasilan warga itu masih dibawah garis. Kadung dapat katakan 5 juta atau 4 juta empat bulan sekali sekarang kita ambil contoh seperti rumah tangga yang masih belum ada anak ataupun anak satu itu seharinya saja kalo untuk konsumsi trus kegiatan sehari-hari itu hampir atau kita harus punya uang sekitar 200 ribu dan sedangkan pemasukan dari pekerjaan kan nggak nyampe. 4 juta selama 5 bulan dibagi saja per 30 hari, itu seperti itu. Kita memang disini rata-rata masih dibawah” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Informan IP 27 juga mengatakan demikian :

“Gini, kita bicara dengan Cakalang sendiri itu kalo 4 bulan pulang itu paling dapatnya lima juta , itu sudah termasuk bagus. Jauh dari UMK kan? Apalagi yang ini, nelayan Gempluk. Itu mangkat Subuh, muleh jam 2 po jam 3 ulihe 20 ewu, dapatnya teri, itupun ndak mesti” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Untuk memperoleh tambahan pendapatan, para ABK memanfaatkan waktu di sela-sela menjaring ikan dengan memancing. Seperti pernyataan informan IP 17 berikut :

“Tapi yang ABK biasa ini yang secara ekonomi bisa dibilang agak dibawah karena mereka kalo misalkan melaut sampe 4 bulan hanya dapat bagian, bagian dari melaut itu, paling ya maksimal itu satu juta itu sudah luar biasa bagus. Cuma mereka dilaut itu mancing, nah pendapatan dari mancing itu yang banyak. Ya malah justru dari

bagian dia melaut sebagai ABK malah jauh, apalagi untuk menghidupi keluarga itu e...boleh dibilang nggak ketemu nalar, cuman karena dilaut mereka mancing dan biasanya mancing itu dapatnya banyak sampai ya...jual ikan dari mancing itu sampai puluhan juta” (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Senada dengan pernyataan Informan IP 19 :

“Itu kan cari untung ya, tapi kalo saya itung-itung rata-rata itu sebulan bisa dapat lima jutaan. Kalo tiga bulan kurang lebih 15 juta. Kalo mau berangkat nelayan bon dulu minimal 2 juta nek wonten nomone notaris lima juta, nanti kalo pulang yo dipotong, pan olehe sitik yo njabus. Mangkate jare nggo ninggali ngomah nggo tuku pancing. Berarti paling-paling bu setiap harine ora nono limapuluh, tapi itu kan pendapatan dari jaring. Sampingannya kan mancing, ya hasile sampe 20 juta, ikannya dijual di kapal situ” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Pernyataan informan IP 23 pun demikian :

“Sebenarnya kalo murni dari hasil tangkapan nelayan di laut itu sebenarnya belum seimbang dengan apa yang dikeluarkan, cuman sekarang kan kebanyakan mancing. Jadi mancing itu kadang kita dengan modal yang cukup besar hasilnya juga besar. Tapi kan tenaganya kan terkuras, harus begadang, harus sabar, itu kemarin banyak yang dapat sampai 30 juta. Kalo dari hasil tangkapan jaring dan pembagian hasil paling diangka 2 juta” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Apabila dilihat dari kondisi diatas, nampaknya kondisi ekonomi masyarakat nelayan sangat ditentukan berdasarkan struktur kehidupan yang berjenjang, seperti yang diungkapkan oleh informan IP 17 berikut ini :

“nelayan itu ada beberapa tingkatan. Sana misalnya di grup sana ada yang namanya, secara materi sebagai nelayan yang punya jenjang bagus itu nahkoda, jurumudi itu, trus istilahe kedua kan wakil nahkoda, ada yang motorist bagian mesin, itu ya lumayan lah kehidupannya. Tapi yang ABK biasa secara ekonomi bisa dibilang agak dibawah” (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Selain itu, berikut adalah pernyataan informan IP 27 :

“Kalo disisi pembagian memang kalo sini bahasanya kalo Nahkoda itu dapat tiga bagian kalo pulang, kalo kedua, wakil nahkoda dapat

dua bagian, motorist 1,5 bagian. Itupun ada bagian penata jaring, penata tali atau tambang, penata batu, juru masak, itu memang ada bagiannya sendiri dan berbeda, ada tambahannya seperempat dari ABK. Kalo ABK Cuma dapat 1 bagian” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Senada dengan yang disampaikan oleh informan IP 23 :

“Ada Nahkoda, trus yang kedua itu wakil nahkoda, trus ada kepala mesin, juru arus itu tugasnya di bawah laut menata jaring, trus ada yang mencari ABK, dan itu bagiannya masing-masing” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Struktur atau jenjang tersebut, terbawa dalam kehidupan sosial mereka. Nahkoda atau Jurumudi menjadi orang yang sangat berpengaruh bagi para nelayan. Berikut pernyataan beberapa informan :

Informan P 17 :

“Yang jelas nahkodanya. Ya karena bagaimanapun status itu biasanya berpengaruh, karena nahkoda itu pimpinan nelayan” (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 19 :

“Yo jurumudi ne ra mbak. Trus Suroto kae, Tiban kan itu jadi...malah sosialisasi nggak mesti Pak Lurah, dia-dia dulu” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

(Ya jurumudi nya mbak, ada Pak Suroto, Pak Tiban. Malahan kalau sosialisasi program tidak mesti harus Lurah yang bicara, ya mereka-mereka itulah yang menyampaikan terlebih dahulu).

Informan IP 23 :

“Nahkodanya, Powernya itu ada di Nahkoda, karena seakan seperti raja” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Untuk meningkatkan taraf hidupnya, para nelayan diakomodir oleh suatu kelompok sebagai jembatan untuk aktifitas pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten. Kelompok-kelompok tersebut beragam, namun rata-rata belum memiliki badan hukum.

Informan IP 17 :

*“Ada HNSI mba, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia”
(Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).*

Informan IP 19 :

*“Ada lima kelompok, satu kelompok anggotanya 20 orang”
(Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).*

Informan IP 16 :

“Ada kelompok sekitar 4. Kalo namanya sendiri saya kurang paham, yang jelas ada 4 kelompok dan semua belum berbadan hukum, karena kembali lagi dengan kesadaran mereka. Dadi seng jenenge kelompok berbadan hukum, mereka Cuma berfikiran ribet, ndadak perbulan buat laporan, NJOP ada. Padahal kan dari sana kalo misal kui sudah berbadan hukum akan diringankan, seperti bantuan pun lebih gampang” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB).

Informan IP 23 :

“Waduh, kelompok nelayan itu ada lumayan si, lebih dari lima, kalo saya ndak condong itunya. Karena kalo saya, KUB (Kelompok Usaha Bersama) nelayan itu sudah pasif” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 27 :

“Ada tiga kelompok kalo ndak salah, KUB. Satu kelompok biasanya kan anggotanya minimal itu kan 10. Kalo di pantai sana sudah ada 1 kelompok, kalo disini ada dua kelompok. Kan dulu dapat bantuan kapal nelayan, perahu kecil, kalo orang sini namanya Cukrik, itu dapat kalo ndak salah 4 unit” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.30 WIB).

Kegiatan pemberdayaan biasanya berupa bantuan yang diberikan kepada nelayan, berikut pernyataan informan:

Informan IP 16 :

“Kalo yang nelayan pemberdayaan paling ya sosialisasi di Dinas Kelautan, rata-rata cara nangkap ikan atau dengan istilahe tanpa harus merusak terumbu karang itu kan seperti itu ndak ada istilahe belum ada solusi bahwa selain nelayan nek biso yo diusahakke apa yang bisa menunjang ekanomi di darat. Karena nanti kalo bener-bener dihapuskan alat tangkap kita itu ya otomatis kebanyakan warga

malah akan keluar kota, dadi nggotone ibarate cari ikane yo diluar, melu kapal gedi, daripada disini juga susah si alat tangkapnya seperti itu kan ndak memenuhi.

Jaringnya itu jenise jenis nyantrang, benangnya nilon tapi istilahe lebih berat ngerucut, jadi ditarik itu seperti yo anulah caduk, ditarik belakangnya kerucut, tapi kalo itu istilahnya dilarang karena semua ikan kena dengan diameternya sedikit la kalo sekarang gantinya kan pake nilon seperti anu senar layangan, la itu nek dilaut yo kurang bisa maksimal karena ndak tenggelam jadi juga ngambang dan diameternya jarak, kotakan satu jaringnya besar-besar, 4 inc, ikan yang gede khususnya 4 kilo keatas bisa nyambut kalo nggak yo enggak ya lolos otok. Hasil tangkapan jelas memurun, bahkan ini sudah dapat bantuanpun kebanyakan ndak dipake masih negat pake cantrang, curi-curi. Tapi kalo disini pegawai perikanan sini masih toleransi dengan kearifan lokal, kalo kita ikut dengan peraturan yang diatas ya otomatis langsung sanksi, penjara 2 tahun lah” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB).

Informan IP 17 :

“Ya banyak si lewat Dinas Kelautan itu termasuk yang bantuan-bantuan untuk meningkatkan taraf hidup. Kegiatannya ya biasanya bantuan alat tangkap, ada juga yang dikasih perahu. Disini itu ada satu yang sudah terbentuk Koperasi, tapi saya lupa namanya, sudah ber RAT dan sudah berbadan hukum” (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 23 :

“Bantuannya mesin, jaring, yang susah itu perawatannya. Tapi kalo lewat kelompok saya nggak respon. Mereka itu kebanyakan karena SDM ada banyak kekeliruan cara pengelolaannya, cara pengertiannya. Itu yang saya bilang keras, kalo kita kasih masukan belum tentu mau. Dan saya sendiri dengan yang namanya KUB masih trauma, masih males, makanya saya harap kalo pemerintah mau kasih bantuan nelayan jangan berbentuk kelompok” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 27 :

“Nelayan sendiri itu kan ada wadahnya, namanya HNSI, kadang ada pembinaan dari dinas kelautan. Kalo nahkoda kan gini, masalahnya kan nahkoda itu belum tentu SDM nya mumpuni. Kebanyakan gak sekolah bisa jadi nahkoda karena faktor pendidikan tidak berpengaruh di nelayan, terutamanya adalah pengalaman” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto terutama untuk buruh nelayan sangat ditentukan oleh sistem bagi hasil yang dilakukan berdasarkan struktur atau jenjang pekerjaan. Maka seperti halnya wilayah pesisir lainnya yang identik dengan kemiskinan disebabkan karena kondisi struktur kehidupan yang sangat merugikan buruh nelayan.

2) Sikap dan Sumberdaya Kelompok Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap kelompok sasaran dalam hal ini adalah para pria sangatlah beragam. Tanggapan kelompok sasaran terhadap metode kontrasepsi Vasektomi atau MOP adalah sebagai berikut :

Informan IP 7 :

“Nek kulo kon KB mboten a...suko kawin maneh. Yo do ndongeng-ndongeng tah, jare di operasi kecil, dibundeli. Pernahe kok wong lanang kerjane berat kok dibundeli ngko pedhot nggagar. Kene kan wong nelayan nek candak ombak mboh opo kui kan ora ukuran kan kudu diangkat. Yo sebagian wong kota do ndongenge koyo kui dibundeli okui, yo wes sampeyan kerjane penak”

(Kalau saya disuruh KB ya nggak mau...lebih baik saya menikah lagi. Ya memang banyak yang bercerita katanya di operasi kecil dan diikat. Masak laki-laki yang pekerjaannya berat kok diikat nanti kalau putus kan gimana. Kita kan nelayan kalau kapal terkena ombak kan harus mengangkat jaring yang berat. Ya sebagian orang kota berbicara kalau nantinya diikat, ya sudah mereka kan pekerjaannya mudah).
(Wawancara : 2 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 4 :

“KB Pria kulo mboten ngertos. Wong mboten nate nglampai niku”
(KB Pria saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah menjalaninya).
(Wawancara : 1 Maret 2017 Pukul 16.30 WIB).

Informan IP 15 :

“Denger-denger dari seng bongsona seng agamane kenceng jare merubah anggota badan gitu nggak boleh”

(Dengar-dengar dari orang yang agamanya kuat, katanya merubah anggota badan tidak boleh dilakukan). (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB).

Informan IP 9 :

“Jare efekke nggo kerja kok kurang. Maksudde okie mbak, seng mbiyek-mbiyek wes tau ono seng dimodel kokui efek e neng tenogo mba”

(Katanya efeknya buat kerja kok kurang. Maksudnya gini mba, kalau dulu ada yang ikut seperti itu kok efek sampingnya ke tenaga mba). (Wawancara : 3 Maret 2017 Pukul 17.00 WIB).

Informan IP 6 :

“Mboten ngertos kulo”

(Saya tidak tahu). (Wawancara : 2 Maret 2017 Pukul 08.00 WIB).

Sikap inilah yang membuat pengendali program di tingkat desa kesulitan dalam memotivasi para pria untuk berpartisipasi dalam KB

Pria. Berikut penuturan mereka :

Informan IP 2 :

“Bilangnya MOP lemes Bu, istrinya yang bilang. Istrinya Pak Kasdi itu buleknya saya” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 14 :

“Katanya kalo MOP untuk kerja berat katanya nggak boleh, bilangny orang-orang itu” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 13 :

“MOP nya dulu sini banyak, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada yang minat” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 26 :

"Ah sungkan, barange ora tangi ngko"

(Ah saya nggak mau, nanti alat kelaminnya tidak bisa ereksi).
(Wawancara : 18 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Beberapa kegagalan pelayanan yang dialami oleh beberapa akseptor MOP nyatanya sangat mempengaruhi minat para pria dalam memilih metode kontrasepsi tersebut, seperti pernyataan sebagai berikut:

Informan IP 12 :

"MOP iso nduwe anak Bu, La kae Caridan, kae malah perangkat sini dulu. Caridan kan kokui, kan seng dadi sasaran wedokke, dikiro selingkuh neng ngendi, yo pok. Boro-boro kan wes podu ngertine operasi nganu dites ke neng kono, o, jebulno ucul, maune kan pak didakwo selingkuh"

(MOP kok bisa punya anak Bu, itu Pak Caridan, dia perangkat desa sini dulu. Yang jadi sasaran kan istrinya, dituduh selingkuh. Untung sama-sama tahu setelah di tes ternyata ikatannya lepas). (Wawancara : 8 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 2 :

"Kae Kasdi melu KB Lanang bek lemes kok. Kulone wedi ra bu, nggagar nek kulone disalah-salahke. Tapi memang Pak Kasdine niku wonge lemes"

(Pak Kasdi ikut KB pria kok lemes. Sayanya takut Bu kalau nanti disalah-salahkan). (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 27 :

"MOP itu biasanya yang jarang, karena ketakutan biasanya. Ada yang pernah terjadi itu sudah nggak berfungsi. Kemudian kembali dilepas, operasi lagi, bahkan orangnya jadi stress. Stress karena itu masalahnya, itu kan kebutuhan biologis si ya, jadi kan kepikiran"
(Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.30 WIB).

Informan IP 18 :

"Riyin koyo kui akhire masalah, niki malah RT ne kidule Pak Lurah. Pendarahan, kulo wedi kui. la seng ngongkon ngejak-ngejak kok, niku saestu, kulo waune SKD"

(Dulu seperti itu jadi masalah, rumahnya selatannya Pak Lurah. Terkena pendarahan, saya takut. Kan saya yang ngajak karena dulu saya SKD). (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB).

Namun hal tersebut dibantah oleh Pak Supari, seorang akseptor MOP dengan pernyataan sebagai berikut :

“Saya awit nom nganti tuwo niku kerja kasaran, ngantos mriki kulo izek iso nyekel pacul, niku tinggal manusianya. Asalkan orangnya sehat, ekonominya nyukupi, itu ndak ada masalah”

(Saya sejak muda sampai tua itu pekerjaannya kasar. Sampai sekarang saya masih bisa pegang cangkul. Itu tinggal manusianya, asalakan orangnya sehat dan ekonominya mencukupi saya rasa nggak jadi masalah). (Wawancara : 10 Maret 2017 Pukul 17.00 WIB).

Hal lain yang menghambat berhasilnya Program KB Pria adalah sikap para pria yang masih menganggap bahwa KB adalah urusan wanita, berikut penuturannya :

Informan IP 5 :

“Kadang kan juga laki-laki nggak mau ngumpul mbahas kokui si, terlalu tabu. Ngertine kan kebanyakan KB niku cuman nggo gawe perempuan. Kalo KB nggo wong lanang nggeh paling pemakaian alat kondom niku. Yo paling mungkin kalo sudah banyak anak paling yo mau seng vasektomi”

(Kadang kan laki-laki tidak mau berkumpul untuk membahas seperti itu karena terlalu tabu. Kebanyakan kan tahunya kalau KB itu untuk perempuan. Kalau KB pria paling pemakaian kondom. Ya mungkin kalau anak saya sudah banyak saya mau vasektomi). (Wawancara : 1 Maret 2017 Pukul 17.00 WIB).

Informan IP 17 :

“Ya barangkali memang nelayan itu kalo misalnya ke vasektomi itu kan pengetahuannya masih ...e, saya sendiri kadang-kadang gak bisa membayangkan vasektomi, gitu. Barangkali kenapa ketika para nelayan itu kok, karena mungkin awal pandangan bapak-bapak nelayan disini KB itu wedok mbak. Kalo vasektomi, mungkin para laki-laki butuh pengetahuan yang cukup untuk memahami vasektomi”

(Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Sama halnya dengan metode Vasektomi, sikap kelompok sasaran terhadap alat kontrasepsi Kondom juga beragam, berikut hasil wawancaranya :

Informan IP 15 :

“tanpa resiko, karena waktu itu setelah kelahiran anak yang kedua dan ketiga istri saya mengalami kista, setelah diangkat trus ibue takut kalo mau KB, baik spiral maupun pil atau yang laine, akhirnya ya saya” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB).

Informan IP 7 :

“nek kondom mboten enak jarene, kurang romantis”
(Kalau kondom tidak enak katanya, kurang romantis). (Wawancara : 2 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 2 :

“katanya pake Kondom pedes, itu keluhan istrinya” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 22 :

“Saya ndak masalah pake kondom. Cuman istri kok mintanya dia aja yang KB” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Informan IP 26 :

“Kesuwen. Ono seng ikut tapi kab beli sendiri, malu nggak ngomong”
(Kelamaan. Ada yang ikut tapi beli sendiri, malu jadinya tidak bilang). (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Informan IP 23 :

“Kalo Kondom saya nggak suka, nggak enak aja, beda rasanya”
(Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 27 :

“Pernah make. Nek nyaman dan tidaknya persepsinya manusianya masing-masing ya, kalo saya ya nyaman” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Sikap kelompok sasaran dari penelitian ini sebagian besar menolak menggunakan alat kontrasepsi pria dikarenakan informasi negatif yang beredar di masyarakat. Sikap tersebut terbentuk karena akumulasi informasi yang diakibatkan karena kegagalan pelayanan

KB Pria. Rata-rata dari mereka beranggapan bahwa pelayanan MOP mampu mempengaruhi tenaga para pria untuk bekerja. Selain itu informasi tentang berkurangnya kejantanan merupakan momok yang menakutkan para pria untuk menggunakan alat kontrasepsi ini.

3) Dukungan Kewenangan

Program Keluarga Berencana merupakan program yang menysasar hingga tingkat desa. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan seorang Penyuluh KB yang mampu melakukan pendekatan secara komprehensif dengan para pemangku kepentingan di tingkat desa. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di desa sudah cukup bagus, berikut hasil

wawancaranya :

Informan IP 17 :

“Yak..yak..yak.. saya kira itu bagus mbak. Sejauh memang apalagi kondisi nelayan itu kan memang pendapatannya kan nggak tentu kan, mereka tergantung kondisi lautnya, kalo lautnya memang yo corone persediaan ikan disana pas melimpah ya dia..maka kan pengaturan kelahiran anak itu seyogyanya memang dibutuhkan” (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 19 :

“Kalo saya punya pendapat gini Bu, tadi kon saya sudah matur ya kalo banyak anak banyak rejeki, la maksud saya ya kalo warga kami saja misalkan cukup dua anak gitu ya perawatannya mudah bu, itu yang jelas” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 16 :

“Kalo pendapat saya untuk program KB ya ndak masalah, karena untuk membatasi opo jenenge kelahiran. Kalo saya si khusus desa Tratebang ndak masalah karena kelahiran kalo misal orang yang berfikir secara perekonomian atau pikir pribadi mereka sendiri mereka akan tau, akan bisa ngatur kelahiran” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Informan IP 22 :

“Sebenarnya kalo saya alhamdulillah orang pemerintahan itu paham dalam arti wong saya sendiri juga pas istri mau KB kui malah saling menawarkan diri ngono lo, seng arep KB aku opo njenengan” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB).

Informan IP 23 :

“Kalo KB sebenere bagus Bu, istri saya juga KB juga” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 27 :

“Sebenere program KB itu bagus, kalo pendapat saya karena apa meminimalisir pertumbuhan penduduk terutama kan taraf ekonomi nelayan biasanya kan taraf ekonomi yang paling rendah. Pendapatannya tidak menentu, dengan adanya program KB ya mestinya penduduk yang ada di desa semut itu untuk kebutuhan sehari-hari kan lebih ringan dibandingkan kalo anak banyak, disamping itu pendidikan, karena kemajuan kan tidak seperti jaman dulu, kalo pendidikan dikesampingkan, kalo sekarang kan tidak seperti itu, minimal kan sekarang yang namanya sekolah SMA sendiri kan sudah gratis, paling kan kebutuhan buku, sepatu dan seragam” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Selain memberikan pengetahuan yang cukup, keterlibatan para pemangku kepentingan di desa juga perlu di tingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, didapatkan bahwa beberapa desa sudah cukup bagus keterlibatannya dalam Program KB.

Berikut hasil wawancaranya :

Informan IP 19 :

“Dilibatkan, kalo ada pertemuan dan ada waktu Bu Lurah tak suruh datang” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 16 :

“Kalo seng jelas kalo untuk pertemuan itu kan kadang disini melibatkan PKK, saya sering ada, disitu mendengarkan. Ikut dilibatkan mungkin dalam pengertian seperti itu. Tapi kalo dalam pengenalan KB atau prosedur KB kebetulan rumah saya kan untuk Posyandu, itu malah lebih sering sama bidan desanya. Jadi bidan

desanya kadang pas nerangkan apa, aku neng kono” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Informan IP 22 :

“Beberapa kali, soale sebenere KB itu kan untuk keadministrasian saya juga sering tanya SKD. Secara hirarki pekerjaan ada hubungannya, walaupun tidak full, paling setengah tahun sepihan” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB).

Informan IP 23 :

“Kadang, tapi sayanya males. Kalo saya jujur bu ya, saya cemplang cemplung ngomong tapi kalo saya disuruh ngomong serius gitu saya males. Tapi saya sangat ndukung program KB” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 27 :

“Perangkat desa dan PKK dilibatkan semua” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Namun ada beberapa desa yang nampaknya membutuhkan pendekatan yang lebih intensif, karena berdasarkan pengakuan informan dibawah ini, mereka belum dilibatkan dalam penggarapan program KB di desanya.

Informan IP 11 :

“Ndak pernah dilibatkan dalam penyuluhan” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 08.30 WIB).

Informan IP 21 :

“Kan bagian KB wes ono dewe bagiane Bu, koyo kene Bu Karomah” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB).
(Kalau yang mengurus masalah KB ada bagiannya sendiri Bu, kalau sini ya Bu Karomah).

Selain dukungan secara moril, dalam pelaksanaan Program KB di desa dibutuhkan juga dukungan operasional yang mampu menunjang kegiatan-kegiatan peningkatan Keluarga Sejahtera. Namun dari hasil

penelitian, belum semua desa yang dapat menganggarkan dukungan operasional untuk Program KB. Beberapa desa yang sudah sepenuhnya mendukung, bentuk dukungannya adalah sebagai berikut

:

Informan IP 17 :

“Ya jelas itu fasilitasi, disini kan ada Posyandu dan sebagainya, ada kader-kader desa yang menangani itu, nanti ada stimulan untuk kegiatan-kegiatan itu” (Wawancara : 24 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 16 :

“Jadi kita pendekatan untuk membatasi kelahiran anak, utowo arep anak akeh, ya itu tadi mbak kita kembalikan ke mereka, tapi ditunjang dengan perekonomian yang baik. kalo dukungan operasional kita ada untuk kader kesehatan, KB masuk didalamnya” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Informan IP 27 :

“Masuk dalam APBDes. Untuk honor kader atau SKD ada walaupun diambil per semester” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 11.00 WIB).

Desa yang belum dapat menganggarkan dukungan operasional beralasan sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Informan IP 19 :

“Nah bentuknya ya tetep saya sosialisasi kepada masyarakat, mengajak supaya ben berhasil Bu. Kalo di nelayan itu Bu ya kalo sudah tua, kalo dirumahnya nggak punya sisaan untuk masa depan ya susah. Makanya saya mendung sekali, tak paringi pandangan. Kalo untuk dukungan operasional belum ada. Soalnya kita sudah musyawarah di desa itu program Dana Desa itu diperuntukkan untuk infrastruktur semua” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Informan IP 21 :

“Yo ndukung, tak kon do KB Bu. Nek kapan wonten kesempatan kulo ngomong soal KB, pas wonten acara tingkeban, mitoni, ngapati” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB).

(Ya mendukung, saya menyarankan untuk KB. Kalau ada kesempatan pasti saya bicara masalah KB, seperti ketika ada acara 7 bulanan atau 4 bulanan).

Informan IP 23 :

“Kayak Kampung KB kemarin pun saya dampingi, temen-temen tak suruh mendekat, temen-temen dari Posyandu, Perangkat tak suruh ndampingi semua. Kalo dukungan operasional kita belum, karena kita masih kebingungan tentang anggaran. Karena kalo kita mau ngambil dari DD, kita DD nya masih kewalahan untuk infrastruktur. Bisa untuk Posyandu , Cuma kita masih kewalahan di infrastrukturnya. Kita masih kesulitan, kita nggak tau nanti kalo semuanya sudah tertata, infra sudah tertata baru kita plotkan ke pemberdayaan masyarakatnya. Kalo untuk kader ada walaupun sedikit. Kita masih kebingungan Bu, jujur aja. Kita sebenarnya pingin mengadakan pelatihan-pelatihan, cuman pengadministrasiannya seperti apa. Daripada nanti kita kebingungan ya kita ambil yang simpel-simpel aja lah, untuk infrastruktur” (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Selain dukungan moril dan operasional, ternyata dukungan dari tokoh-tokoh agama di desa juga sangat diperlukan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan mayoritas agama di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto adalah Muslim. Untuk itu, pemahaman Program KB dalam kacamata agama Islam perlu ditegaskan lagi. Namun beberapa tokoh agama yang ada di desa pesisir Kecamatan Wonokerto belum sepenuhnya memberikan sinyal positif terhadap Program KB utamanya metode kontrasepsi mantap atau sterilisasi.

Berikut hasil wawancaranya :

Informan IP 22 :

“Sebenarnya tergantung pada niatannya dulu, kalau di kitab-kitab fiqih itu, apalagi untuk kompilasi hukum islam sekarang itu tergantung daripada niatannya. Kalo memang niatannya untuk memutuskan secara langsung dalam arti memutuskan garis keturunan jelas itu tidak diperbolehkan, tapi secara ijma' daripada ulama dari 90an sampai sekian itu kalo untuk mengatur atau interval kelahiran itu boleh, itu secara kompilasi hukum islam kan boleh. Itu kan

memang sudah di golongan NU sendiri itu sudah ada Bahtsul Masa'il, pembahasan tentang permasalahan sengg yang kira-kira memang hukumnya masih samar. Seperti KB sendiri kan masih samar. Tapi kan kalo dulu memang KB itu opo yo.. haram sebenarnya, cuman kan dilihat dari kemanfaatannya dulu, tetap ijma' kiyas para ulama menyatakan kalo itu untuk mengatur tentang keintervalan jarak kelahiran itu ndak masalah. Tetapi kalo memang punya niatannya itu saya sudah tidak mau punya anak, ataupun menolak dan kekhawatiran tentang , ah, jangan-jangan kalo saya punya anak banyak nanti tidak bisa menghidupinya, itu memang yang tidak diperbolehkan dalam agama seperti itu.

Sebenarnya tergantung pada, kita balik kembali dari konteks atau situasi dan kondisinya dulu. Kan memang ada beberapa kasus misalkan, yang saya ketahui misalkan ini kalo hamil lagi akan menjadi kemudhorotan, itu boleh, itu secara ijma'nya. Tapi kalo asline yo, kalo kita balik kembali kepada asal usulnya memang tidak diperbolehkan tapi kita lihat islam itu fleksibel dalam konteksnya kita menuruti atau adaptasi dengan situasinya dulu, banyak manfaatnya atau banyak kemudharatannya dulu. Jika itu niatannya mau memutus keturunan ya tidak diperbolehkan. Jadi misalkan ada vasektomi ataupun e, coro gampang kalo perempuan yang pernah saya baca itu kan indung telur dibundeli kan seperti itu, itu kan butuh alasan yang tepat. Agama itu tidak mutlak harus haram semua itu ndak, makanya dalam fiqih itu memang sudah dibahas kasus seperti itu. Diperbolehkan tapi dengan alasan yang harus kuat. Tidak asal misalkan aku wes cukup anak dua misalnya, tak bundeli, kecuali dalam kanteks itu tadi kemudharatan, misalkan kalo hamil lagi kok akan membahayakan" (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB).

Informan IP 24 :

"KB itu tergantung dari caranya ya. Kalo caranya memutus kelahiran itu haram, tapi kalau ada niat atau tujuan yang lain itu tafsir. Tafsir itu contohnya ada kelahiran tapi dibatasi. Dalam arti disekat, mengatur jarak, itu tidak apa-apa dengan tujuan kesejahteraan. Tapi kalo memang langsung tidak boleh ada kelahiran itu haram. Trus juga dari KB sendiri itu kan macem-macem ya ada yang secara kedokteran ada juga secara alamiah. Sama, dari kedokteran kalo yang saran-saran seperti itu ekstrim untuk memutus kelahiran itu ndak boleh, tapi kalao secara biasa itu tafsir. Tafsir ada yang boleh ada yang tidak. Kalo untuk steril, kalo tidak ada penyakit, langsung memutus garis keturunan itu haram, kecuali memang ada penyakit. Jadi harus ada alasan yang mendukung dan kuat" (Wawancara : 17 April 2017 Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sterilisasi baik itu untuk pria maupun wanita harus dilakukan dengan alasan yang sangat kuat. Dan pemakaian alat kontrasepsi sebagai bagian dari Program KB harus benar-benar dipraktekkan oleh suatu keluarga dikarenakan manfaatnya yang hanya untuk mengatur jarak kelahiran anak. Hal yang hampir sama diungkapkan oleh informan IP 11 sebagai berikut :

“Kalo itu bener-bener si manusianya itu kasarannya menjadikan tuhan mengatakan orang ini sudah tidak beranak lagi, lain halnya dengan KB yang pencegahan seperti kondom, suntik tiga bulan dan yang lain, kalo ini reproduksi bener-bener dihentikan sedangkan itu sel manusia yang diciptakan oleh Allah itu kan nantinya dirubah menjadi manusia dan sedangkan Rasulullah sendiri menyebarkan kepada umat islam itu kan akan membanggakan umatnya dengan banyaknya umat sehingga kan ada yang melakukan poligami dengan tujuan mereka ingin memperbanyak anak Cuma kan dari situ tidak menyusahkan si istri yang pertama kalo anaknya banyak tapi yang mengurus kan ibunya ada banyak juga. Kalo itu kan bener-bener suatu tindakan yang kalo perspektif saya kok melampaui dari, artinya kan kalo anak kan ada program ikhtiar seperti tadi, kalo ini kan lebih dari ikhtiar, artinya hal-hal yang masih ditolerir seperti tadi KB suntik, pil, kondom, itu kan kalo menghendaki beranak ya beranak kalo enggak Allah yang akan berupaya, misalkan orang itu minum Pil, kalo Allah menghendaki tiba-tiba malam itu dia tidak minum pil, trus laki-lakinya datang berhubungan kan hamil, ya manusia kan terserah Allah, lupa atau ndaknya. Gitu juga dengan suntikan tiga bulan, ketika dia ditakdirkan untuk hamil maka si dokter akan menyuntikkan yang satu bulan, sehingga dua bulan berikutnya dia kan ndak KB dan hamil lagi. Jadi gitu hal-hal yang mengakibatkan kelalaian itu mudah bagi Allah untuk membuat mereka hamil sekalipun mereka sudah ikhtiar, la dengan seperti ini, ya mungkin secara akal manusia, hebat, mantep lah pasti jaminan karena ibaratnya tuhan yang akan nganu sudah dijegal jadi kekuasaan Tuhan itu dijegal, ini kan bener-bener pencegahan agar Allah tidak membuat si orang ini hamil, jadi bener-bener melakukan perlawanan” (Wawancara : 23 Maret 2017 Pukul 08.30 WIB).

Pernyataan diatas menegaskan bahwa pemilihan alat kontrasepsi yang dibolehkan dalam Islam adalah alat kontrasepsi jangka pendek,

seperti Pil, Suntikan dan Kondom. Karena hal tersebut masih dimungkinkan terjadi kelalaian yang akan membuat seseorang hamil tanpa melawan kehendak Tuhan. Sedangkan metode kontrasepsi yang mantap dalam hal ini adalah metode Vasektomi (MOP) dan Tubektomi (MOW) merupakan suatu upaya yang dianggap melawan Tuhan.

Informan IP 21 berikut ini lebih jelas menyatakan bahwa KB Pria dinyatakan haram :

“La nek (kalau) KB Pria kan otomatis ndak bisa. Nek (kalau) wanita biasane jare (kata) dokter membahayakan yo maka dilakukan, dokter memutuskan kalo mengandung lagi membahayakan. Kalo KB perempuan sudah dibahas dan boleh untuk menjarangkan keturunan. Kalo KB Pria nek (kalau) setau saya kok ndak boleh, kan mateni (mematikan) keturunan. tapi selanjutnya berkembang kan sementara niki terus terang kulo meboten saget mutuske boleh atau ndak e. Pernah dulu memang ndak boleh kata Kyai Gito, beliau mengatakan haram dulu sekitar tahun 74 (tapi selanjutnya perkembangan sementara ini terus terang saya belum bisa memutuskan boleh atau tidaknya. Pernah dulu memang tidak boleh kata Bapak Kyai Gito)” (Wawancara : 30 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB).

Variabel non-peraturan ini dapat pula disebut variabel lingkungan kebijakan dimana suatu program diimplementasikan. Kondisi lingkungan di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto sangat dipengaruhi dari dukungan para pemimpin wilayah di tingkat desa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar Kepala Desa sudah memberikan dukungan namun hanya berupa dukungan moril. Untuk dukungan operasional dari anggaran desa belum semua desa mampu memberikannya.

Selain itu, pengaruh yang disebabkan oleh variabel lingkungan kebijakan adalah sikap dari kelompok sasaran itu sendiri. Karakteristik

masyarakat di lokasi penelitian yang “keras” nampaknya juga berpengaruh dalam pembentukan sikap mereka. Kondisi inilah yang harus dijadikan fokus penggarapan dalam upaya untuk meningkatkan capaian KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto.

4. Implementasi Program KB Pria di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan

a. Output Kebijakan Organisasi Pelaksana

Dari dasar peraturan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, telah dirangkum beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana dalam hal ini adalah Penyuluh Keluarga Berencana dalam mengimplementasikan gerakan KB khususnya KB Pria di Kawasan Pesisir. Namun dari hasil penelitian, diketahui bahwa Penyuluh KB di Kecamatan Wonokerto tidak ada yang mengetahui peraturan tentang Peningkatan Partisipasi KB Pria, berikut hasil wawancaranya :

Informan IP 3 :

“Kok peraturannya saya kurang paham mba tentang itu” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 25 :

“Dasar peraturannya kok, belum pernah mendengar selama disini. Saya belum pernah” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Selain itu, sebagai acuan dalam Penggerakan Program KB di Kawasan Pesisir, Penyuluh KB di Kecamatan Wonokerto pun tidak mengetahuinya, berikut pernyataan Informan IP 3 :

“Selama ini belum pernah ada kegiatan yang khusus penggarapan daerah pesisir” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan IP 25 :

“Saya belum pernah dibekoli untuk khusus daerah pantai gitu. Pokoknya saya dibekalinya umum” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Dari Pedoman Penggarapan Gerakan KB di Wilayah Pantai dan Peraturan Kepala BKKBN No. 145/HK-010/B5/2009 tentang Peningkatan Partisipasi Pria maka dapat dirangkum tahapan-tahapan kegiatan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyiapan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) merupakan modal dasar kemitraan yang harus dimiliki oleh Penyuluh KB. Menghadapi fenomena dimana jumlah Penyuluh KB yang semakin menyusut maka IMP lah yang menjadi kepanjangan tangan Penyuluh KB di tingkat desa. Jawaban yang sama dari Informan IP 3 dan IP 25 bahwa Institusi Masyarakat Pedesaan terdiri dari :

“Institusi masyarakat pedesaan terdiri dari PPKBD atau SKD kemudian Sub PPKBD dan Kelompok Akseptor njih”

Sebagai petugas yang membantu pekerjaan Penyuluh KB, keaktifan IMP sangatlah dibutuhkan agar program dapat menysar sampai bawah. Berikut hasil wawancara tentang keaktifan IMP :

Informan IP 3 :

“Untuk PPKBD dan Sub PPKBD sebagian besar aktif” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 25 :

“Ya InshaAllah ada yang aktif ada yang tidak. Ya mungkin untuk SKD atau PPKBD aktif semua” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari Penyuluh KB adalah terbentuknya wadah atau perkumpulan para akseptor KB Pria di setiap desa. Namun keberadaan kelompok yang sering disebut sebagai “Prio Utomo” ini tidak berjalan maksimal di Kecamatan Wonokerto.

Berikut pernyataan Informan IP 3 :

“Untuk di Kecamatan Wonokerto karena memang peran prianya itu sangat minim jadi untuk Prio Utomo itu sementara tidak berjalan dengan baik mba karena memang peserta pria nya itu sangat sedikit” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Bahkan di beberapa desa pesisir kelompok Prio Utomo tidak terbentuk sama sekali. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan IP 25 :

“Desa Api-Api dan Desa Pecakaran itu Prio Utomo nggak ada soalnya disana peserta KB nya jarang. Jadinya belum terbentuk” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto hanya berfokus pada tingkat desa. IMP yang ada dibawahnya yaitu tingkat RW dan RT masih belum maksimal keaktifannya. IMP tingkat desa yang diketuai oleh PPKBD merupakan kepanjangan tangan dari Penyuluh KB di tingkat desa. Pembinaan kepada kelompok KB terutama kelompok KB pria nampaknya belum dijadikan prioritas penggarapan program.

2) Perencanaan Program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto

Setelah mengetahui potensi IMP di masing-masing desa, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah Perencanaan Program KB Pria yang diawali dengan penganggaran. Jawaban dari IP 3 dan IP 25 adalah sebagai berikut :

Informan IP 3 :

“Saya pikir kalo Cuma 150 ribu, itu kan dekne ora kerjo beberapa hari kan untuk makan kan ndak mencukupi. Kalo nek paling ora 500 yo rodok mending ketoe”

(Saya pikir kalau cuma 150 ribu, dia kan tidak kerja selama beberapa hari kan untuk makan tidak mencukupi. Kalau 500 ribu mungkin yang bisa mencukupi). (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 25 :

“Belum. Saya kok belum pernah mendengar ataupun menerima. La mungkin kalo ada ya saya nggak tau” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Sebagai dasar penggarapan suatu program, kegiatan pelatihan dan pengembangan merupakan hal mutlak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para Penyuluh KB. Hasil wawancara dengan *key informan* mengenai kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :

Informan IP 3 :

“Kalo pelatihan tahun 2016 dapat, 2014 kemudian saya tiga tahun berturut-turut itu latihan terus mba. Kemudian sudah lama sekali, sudah hampir 7 tahun saya nggak pernah pelatihan, jadi akhir-akhir kemarin aja. Tapi untuk fokus yang MOP ini memang saya pikir kurang” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 25 :

“ndak ada e” (Nggak ada itu). (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Langkah selanjutnya adalah bagaimana Penyuluh KB melakukan koordinasi dengan pemangku kewenangan dari tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (Rakorcam). Dari hasil wawancara dengan Penyuluh KB Kecamatan Wonokerto, nampaknya kegiatan Rakorcam sudah berjalan dengan baik, berikut pernyataannya :

Informan IP 3 :

“Untuk Rakorcam sebulan sekali, kepala desa, tokoh masyarakat itu sebagian hadir dalam Rakorcam” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 25 :

“Setiap bulannya kita ada Rakor, bersamaan dengan Rapat Dinas. Disitu kami menyampaikan program kami” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Selanjutnya adalah koordinasi tingkat desa (Rakordes) yang dilakukan di masing-masing desa, berikut pernyataan *key informan* :

Informan IP 3 :

“Rakordes ya, walaupun disana tidak formal tirik-tirik gitu ya kemudian dikumpulkan seperti Pak Kades sama perangkat desanya kemudian SKD nggeh kemudian kader nanti berkumpul disitu” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 25 :

“Kalo Rakordes, itu dari kecamatan kita bawa ke desa. Nanti di desa masalah-masalah di desa kan berbeda-beda itu, nanti dipecahkan di

Rakordes masing-masing” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Kegiatan koordinasi selanjutnya adalah khas dari pola penggarapan Kawasan Pesisir yaitu pendekatan dengan tokoh nelayan. Namun Penyuluh KB di Kecamatan Wonokerto belum ada satupun yang melakukan kegiatan ini, berikut hasil wawancaranya :

Informan IP 3 :

“Sebetulnya untuk Kelompok Nelayan itu sudah ada dan saya tau itu biasanya kerjasamanya dengan Pertanian. Untuk saya sendiri sebagai Korlap KB ini untuk Institusi Nelayan kok belum ada kerjasama kesitu” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Informan IP 25 :

“Selama ini kok kami belum pernah mendekati pada kelompok-kelompok nelayan yang ada karena kelompok nelayan itu kan menemuinya sulit, soalnya beberapa bulan mau pulangnyanya itu kan belum tentu, jadwalnya itu yang sulit” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Dalam hal perencanaan KB Pria, nampaknya pelaksana program di Kecamatan Wonokerto belum secara serius menjadikannya sebagai fokus penggarapan. Dari budaya atau kebiasaan ber-KB masyarakat di lokasi penelitian yang lebih menyerahkan urusan KB kepada para istri, maka fokus penggarapan hanya pada peningkatan capaian KB wanita. Selain itu, dari sisi anggaran yang berupa *reward* yang diberikan kepada akseptor MOP dirasa belum mencukupi.

Dari hasil wawancara dengan *key informan* yang merupakan petugas penyuluh KB menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan khusus KB pria. Hal inilah yang kemungkinan menjadi penyebab tidak dilakukannya penyuluhan tentang KB Pria. Hal lain yang masih menjadi ganjalan dalam implementasi program

adalah tidak dilakukannya pendekatan dengan tokoh informal di tingkat desa.

3) Langkah Operasional Penggarapan KB Pria di Daerah Pantai

Langkah operasional penggarapan KB Pria di daerah pantai dimulai dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang program KB Pria untuk meningkatkan pengetahuan para pria di Kawasan Pesisir serta untuk menepis mitos negatif yang telah beredar tentang KB Pria. Namun berikut pernyataan dari Informan 25 :

“Selama saya disini, belum pernah memang. Saya belum pernah mencoba ngumpulin Bapak-Bapak untuk sosialisasi KB Pria. Kami belum mencoba” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Dalam kegiatan penyuluhan tentu harus menggunakan media agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Media penyuluhan KB Pria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan akseptor KB Pria sebagai motivator untuk mempengaruhi sikap para pria di kawasan pesisir. Namun nampaknya hal tersebut belum dilakukan oleh Penyuluh KB di Kecamatan Wonokerto, berikut pernyataan Informan IP 25 :

“Kalo rencana itu ya mungkin ada, tapi belum bisa melaksanakan” (Wawancara : 18 April 2017 Pukul 09.00 WIB).

Tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi maka dilakukan pelayanan dimana Penyuluh KB bekerjasama dengan mitra yaitu Puskesmas. kerjasama dengan mitra untuk pelayanan Kontrasepsi Pria merupakan hal yang krusial, namun Puskesmas Kecamatan Wonokerto belum mampu untuk melayani pelaksanaan

Medis Operasi Pria (MOP) seperti yang disampaikan oleh Informan IP 3 :

“Sebetulnya disini belum ada tenaga yang untuk melayani MOP, belum ada dokternya yang khusus melayani kegiatan MOP tersebut” (Wawancara : 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB).

Dari serangkaian kegiatan operasional penggarapan KB Pria di daerah pantai maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program KB Pria di Kawasan Pesisir belum maksimal. Kegiatan penyampaian informasi yang disinyalir mampu memberikan pengetahuan sehingga dapat menepis informasi negatif mengenai alat kontrasepsi pria pun belum secara intensif dilakukan.

Kendala lainnya adalah terbatasnya tenaga pelayanan KB Pria di tingkat kecamatan. Puskesmas di Kecamatan Wonokerto hanya mampu melayani alat kontrasepsi kondom sedangkan pelayanan MOP belum dapat dilayani.

C. Pembahasan

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa tahap implementasi merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Bahkan telah disebutkan suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite jika program tersebut tidak diimplementasikan. Namun pada kenyataannya kegiatan implementasi program atau kebijakan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ahli maka dapat dipetakan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Berbagai peta tentang faktor-faktor tersebut terakumulasi menjadi apa yang disebut sebagai model implementasi kebijakan. Model implementasi ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana yaitu sebagai hubungan sebab akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut (Purwanto, 2015:18).

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, maka model implementasi yang digunakan adalah Kerangka Analisis Implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier (1983). Dalam model ini disajikan faktor-faktor yang dianggap mampu mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto yang kemudian diidentifikasi secara mendalam sehingga mampu menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti selama bulan Februari hingga April 2017, ditemukan hasil bahwa Karakteristik Masalah, Isi Kebijakan atau Daya Dukung Peraturan dan Lingkungan Kebijakan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan implementasi Program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto.

1. Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah mengupas aspek-aspek teknis dari permasalahan serta perilaku yang akan diatur dalam hal ini masyarakat pesisir di

Kecamatan Wonokerto yang menjadi kendala dalam implementasi program KB Pria. Hal-hal yang harus diidentifikasi antara lain Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, Sifat dari populasi dan Derajat perubahan perilaku yang diharapkan dari kelompok sasaran.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kelompok sasaran di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto didominasi oleh masyarakat nelayan dimana rata-rata tiap desa mencapai hingga diatas 70% dari total penduduk usia kerja. Namun ada satu desa yaitu desa Semut dimana jumlah nelayannya sedikit hanya sekitar 15% karena wilayah yang langsung berbatasan dengan laut terpisah oleh aliran sungai besar.

Pada awal tahun 2015, Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto dilanda bencana Rob yang merusak lingkungan di hampir semua desa-desa pesisir. Sebagian lahan pertanian dan kolam tambak menjadi tidak produktif yang mengakibatkan banyak para petani dan pekerja tambak beralih profesi menjadi nelayan. Profesi nelayan menjadi pilihan dikarenakan untuk menjadi nelayan buruh atau ABK tidak diperlukan modal finansial, profesi ini hanya membutuhkan tenaga serta kondisi fisik yang sehat dan kuat. Selain itu, teknologi perikanan yang sangat maju yang memungkinkan adanya freezer besar didalam kapal yang mampu menampung ikan sangat banyak membuat para nelayan melakukan kegiatan pemancingan di laut di luar jam kerjanya sebagai ABK. Kegiatan yang membutuhkan modal besar namun mampu menghasilkan pendapatan yang besar pula membuat banyak masyarakat di pesisir tergiur untuk ikut melaut.

Dari pernyataan informan, sebagian besar menyebutkan bahwa nelayan secara kasat mata merupakan pribadi yang keras terutama hal tersebut nampak pada gaya bicara mereka yang selalu dengan nada tinggi. Namun dari informan pula diketahui bahwa kesan keras disebabkan kebiasaan berbicara di laut dimana harus dengan volume yang tinggi dikarenakan pengaruh suara mesin serta tidak adanya pantulan suara di tengah laut. Dalam penerimaan program, ada informan yang menyatakan kesulitan dalam melakukan pendekatan dengan para nelayan. Ketika sosialisasi program yang ada di desa disampaikan kepada para nelayan, respon mereka sangatlah rendah. Banyak program desa yang mereka terima namun tidak dilaksanakan secara baik.

Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Definisi ini mudah dibuat untuk konteks masyarakat tradisional. Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1, Angka 10 mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Tentang pengertian nelayan tersebut, Ditjen Perikanan (2000) mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan (binatang air lainnya, tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan kedalam perahu atau kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan. Namun, ahli mesin dan juru masak yang bekerja diatas kapal

penangkap dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan (Satria, 2014:26-27).

Karakteristik masyarakat pesisir yang didominasi oleh nelayan memiliki sifat dasar yang keras dikarenakan sumber daya yang dihadapi masih bersifat terbuka (*open access*) sehingga menyebabkan mereka menghadapi elemen resiko yang sangat tinggi. Sifat keras ini nampaknya terbawa dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam cara pengambilan keputusan dalam keluarga.

Populasi yang menjadi sasaran Program KB Pria dalam penelitian ini adalah pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto yang masih masuk dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS). Telah dibahas sebelumnya bahwa masyarakat di Kawasan pesisir yang diidentikkan dengan kawasan desa terisolasi cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Terkait dengan pengetahuan mereka dalam pekerjaan yaitu sebagai nelayan umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Dari pernyataan informan, rata-rata masyarakat khususnya angkatan muda di desa-desa pesisir Kecamatan Wonokerto hanya menamatkan pendidikan SMP saja sedangkan para pria usia lanjut hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar, bahkan ada diantara mereka yang tidak lulus SD.

Dari hasil penelitian, para pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto sebagian besar menyerahkan urusan KB pada istrinya. Hasil yang sama telah didapatkan pada survei SDKI tahun 2012 yang menyatakan bahwa sikap pria yang menyerahkan "KB adalah urusan

wanita” sebesar 42%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada umumnya pria masih mempunyai persepsi atau anggapan bahwa sebaiknya yang berurusan dengan KB adalah wanita. Lebih jauh dapat pula diartikan bahwa pemakaian alat kontrasepsi lebih tepat kalau ditujukan untuk wanita.

Dalam perspektif antropologis, salah satu aspek yang dianggap penting dalam pembangunan identitas kebudayaan masyarakat adalah sistem gender. Sistem gender adalah sistem pembagian kerja secara seksual (*the division of labor by sex*) dalam masyarakat nelayan yang didasarkan pada persepsi kebudayaan yang ada. Dengan kata lain, sistem gender merupakan konstruksi sosial dari masyarakat nelayan yang terbentuk sebagai hasil evolutif dari suatu proses dialektika antar manusia, lingkungan dan kebudayaannya. Sebagai produk budaya, sistem gender diwariskan secara sosial dari generasi ke generasi. Berdasarkan sistem gender masyarakat nelayan, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan “laut” merupakan ranah kaum laki-laki, sedangkan wilayah “darat” adalah ranah kerja kaum perempuan.

Pekerjaan-pekerjaan di laut seperti kegiatan penangkapan menjadi ranah laki-laki karena karakteristik pekerjaan ini membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, kecapatan bertindak dan beresiko tinggi. Dengan kemampuan fisik yang berbeda, kaum perempuan menangani pekerjaan-pekerjaan di darat seperti mengurus tanggung jawab domestik serta aktivitas sosial, budaya dan ekonomi. Kaum perempuan memiliki cukup banyak waktu untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan

tersebut. Sebagian besar aktivitas perekonomian di kawasan pesisir melibatkan kaum perempuan dan sistem pembagian kerja tersebut telah menempatkan kaum perempuan sebagai “penguasa aktivitas ekonomi pesisir”. Dampak dari sistem pembagian kerja ini adalah kaum perempuan mendominasi dalam urusan rumah tangga dan pengambilan keputusan penting di rumah tangganya. Dengan demikian kaum perempuan tidak berposisi sebagai “suplemen” tetapi bersifat “komplemen” dalam menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya (Kusnadi, 2001:2).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata wanita di desa-desa pesisir Kecamatan Wonokerto lebih memilih menggunakan alat atau obat kontrasepsi jangka pendek. Mereka beralasan ketika ditinggal suaminya melaut itu juga termasuk KB karena tidak melakukan hubungan badan dengan suaminya, dengan begitu mereka bisa dengan mudah *drop out* dari obat kontrasepsi yang digunakannya. Selanjutnya ketika suaminya pulang dari melaut mereka kembali menjadi peserta KB aktif atau biasa disebut sebagai peserta KB *reactive*.

Perubahan perilaku yang diharapkan dari kelompok sasaran tentulah partisipasi pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto terhadap Program KB meningkat. Dalam deskripsi model Mazmanian dan Sabatier (1983) disebutkan bahwa semakin besar perilaku yang dikehendaki maka semakin sulit memperoleh implementasi yang berhasil. Partisipasi pria dalam program KB dapat diwujudkan melalui kesertaan mereka dalam penggunaan alat kontrasepsi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengetahuan para pria di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto terhadap manfaat program KB sudah cukup bagus. Sebagian besar dari informan menyatakan bahwa program KB memiliki manfaat untuk mengatur jarak kelahiran. Namun hal tersebut tidak membuat para pria meningkatkan partisipasinya dalam bentuk perubahan perilaku menjadi peserta KB. Mereka hanya mendukung para istrinya yang menggunakan alat kontrasepsi.

Fenomena inilah yang mendasari implementor Program KB di Kecamatan Wonokerto lebih memfokuskan penggarapan KB pada wanita sekalipun implementor mengetahui bahwa penyuluhan yang intensif akan mampu merubah perilaku pria menjadi peserta KB. Bahkan hingga lini desa, *key informan* menyatakan tidak pernah melakukan penyuluhan kepada para pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto untuk menjadi peserta KB. Kalaupun ada, penyuluhan bersifat tidak resmi.

Variabel karakteristik masalah dalam Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bagaimana masalah mendasar yang dihadapi dalam implementasi suatu kebijakan. Sebagai suatu kebijakan publik, program KB memiliki dinamikanya tersendiri. Keberhasilan yang telah diraih pada masa kejayaannya tidak lepas dari suatu upaya “intervensi” dari implementor dengan mengesampingkan masalah-masalah yang ada. Dan sebagai kebijakan sosial, program KB harus berhadapan dengan karakter masalah yang akan menjadi sasaran program.

Menurut kedua ahli tersebut, sifat dari masalah itu akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan dan apabila kelompok sasaran bersifat homogen maka peluang keberhasilannya semakin besar. Hal yang berbeda terdapat dalam temuan penelitian ini. Kelompok sasaran dalam masyarakat pesisir yang mayoritas adalah masyarakat nelayan tentu saja bersifat homogen dengan keteraturan sistem yang ada. Namun ternyata implementasi program KB pria tidak mendapat respon yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi tidak hanya dilihat dari homogen atau tidaknya kelompok sasaran. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari variabel ini lebih ditekankan pada bagaimana karakter dasar dari kelompok sasaran yang harus sepenuhnya dipahami oleh implementor program.

2. Daya Dukung Peraturan

Variabel ini lebih menekankan pada sisi implementor kebijakan Program Keluarga Berencana di lini lapangan dalam memainkan perannya dengan mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan implementasi secara tepat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan pengintegrasian dengan dinas lain, rekrutmen dari pejabat pelaksana dan bagaimana akses formal dari kelompok sasaran yang berkepentingan sama dalam mewujudkan tujuan program.

Telah disebutkan dalam Anggara (2014:259-260) bahwa kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program. Dalam

pelaksanaan program Keluarga Berencana dimana para implementor program yaitu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) masuk dalam struktur Dinas Satu Atap di wilayah kecamatan, tentunya harus melakukan koordinasi secara vertikal dengan kepala wilayah yaitu Camat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PKB telah mampu melaksanakan koordinasi dengan baik dengan Camat Wonokerto sehingga mendapat dukungan yang mampu meningkatkan keberhasilan program KB.

Sedangkan di tingkat desa, PKB telah melakukan koordinasi dengan para kepala desa sebagai wilayah binaan melalui kegiatan Rakordes (Rapat Koordinasi Desa) yang dilakukan sekali dalam sebulan. Hal ini nampaknya memberikan dampak positif di beberapa desa pesisir karena kepala desa telah bersedia memberikan dukungan operasional dari anggaran desa.

Dalam kegiatan pelayanan KB, PKB telah bekerjasama dengan berbagai mitra seperti dengan Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas di wilayah Kecamatan Wonokerto dalam bentuk pelayanan pemasangan alat/obat kontrasepsi. Jadwal kegiatannya yaitu setiap hari rabu baik di Puskesmas atau KKB (Klinik Keluarga Berencana) 1 dan KKB 2 untuk pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Sedangkan untuk pelayanan Pil, Suntikan dan Kondom bisa dilaksanakan setiap hari. Namun sayangnya, banyak Puskesmas di Kabupaten Pekalongan termasuk di Kecamatan Wonokerto belum mampu melayani Medis Operasi Pria (MOP) maupun Medis Operasi Wanita (MOW).

Untuk kegiatan tahunan dalam pelayanan KB, PKB Kecamatan Wonokerto telah melakukan kerjasama dengan berbagai mitra seperti kelompok keagamaan (Muslimat dan Aisyah), TNI dan Kepolisian. Kegiatan tersebut terlaksana setahun sekali melalui moment-moment khusus yang terkait dengan kegiatan intern mitra tersebut.

Hal yang membedakan dalam penggarapan Program KB di Kawasan Pesisir adalah bagaimana melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok yang dominan di wilayah ini yaitu kelompok nelayan ataupun tokoh-tokoh nelayan. Namun berdasarkan pengakuan *key informan*, mereka sama sekali belum pernah mencoba untuk mendekati kelompok ataupun tokoh nelayan tersebut.

Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan bagaimana upaya pencapaian tujuan yang dimaksudkan untuk merubah perilaku kelompok sasaran tidak akan membawa hasil yang diharapkan, kecuali kalau para pejabat dalam badan-badan pelaksana memiliki kesepakatan (komitmen) yang tinggi terhadap upaya pencapaian tujuan tersebut. Setiap program pada hakikatnya membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat untuk mengembangkan aturan-aturan atau prosedur implementasi serta mau berusaha keras memberlakukannya jika menghadapi penolakan dari kelompok sasaran dan pejabat-pejabat pemerintah yang enggan melaksanakan perubahan (Wahab, 2015:189).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor program KB atau PKB di Kecamatan Wonokerto hanya berjumlah dua orang yang harus membina 11 (sebelas) desa. Hal tersebut tidak sesuai dengan

Peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, pada pasal 2 point 2 dalam pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) yang menyebutkan bahwa ratio penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB adalah 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 2 (dua) desa/kelurahan pada tahun 2014. Selanjutnya menurut Goggin et.al, 1990 (dalam Purwanto, 2015:149) menyatakan bahwa jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tidak ada suatu rumus yang pasti tentang berapa jumlah SDM yang harus disediakan oleh suatu organisasi sangat tergantung pada tugas yang harus dilaksanakannya. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak pula jumlah SDM yang harus disediakan.

Untuk meniasati masalah ini, PKB memanfaatkan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang telah dibentuk sebagai mitra utama dalam penggarapan program KB di masing-masing desa binaan. IMP utamanya terdiri dari satu kelompok PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) pada level desa.

Wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada masing-masing PPKBD di tiap desa pesisir, diketahui bahwa mereka telah mengetahui manfaat program KB dan tugas mereka sebagai PPKBD dengan sangat baik. Untuk memantapkan komitmen para PPKBD, PKB Kecamatan

Wonokerto menyelenggarakan pembinaan tingkat kecamatan sekali dalam sebulan. Dalam pembinaan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap target atau PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) yang telah diberikan pada masing-masing desa serta pengisian laporan bulanan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi dari variabel isi kebijakan ialah sejauh mana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi para aktor diluar badan-badan pelaksana mempengaruhi para pendukung tujuan resmi. Undang-Undang, selain dapat mempengaruhi proses implementasi melalui pemilihan badan-badan pelaksana yang tepat (merancang bangun sifat strukturnya), ia dapat pula mempengaruhi partisipasi dua kelompok aktor diluar badan-badan pelaksana tersebut, yaitu :

- 1) Calon-calon penerima manfaat program atau kelompok-kelompok sasaran program;
- 2) Badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang merupakan atasan-atasan dari badan-badan pelaksana itu (Wahab, 2015:190).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud akses formal pihak luar adalah kelompok sasaran program yaitu kelompok atau wadah bagi akseptor KB Pria yang telah dilayani. Di Kabupaten Pekalongan, para akseptor KB Pria diakomodir dalam suatu kelompok atau wadah yang bernama kelompok "Prio Utomo". Namun dari hasil penelitian diketahui bahwa kelompok Prio Utomo di Kecamatan Wonokerto tidak berjalan maksimal, bahkan di sebagian desa-desa pesisir tidak terbentuk kelompok tersebut dikarenakan akseptor pria nya sangat sedikit.

Dalam variabel ini, Mazmanian dan Sabatier (1983) lebih menekankan bagaimana kinerja implementasi program dalam menjalankan aksinya untuk menghasilkan output kebijakan. Mereka menganggap bahwa integrasi dengan semua aktor kebijakan akan mampu meningkatkan keberhasilan program. Disisi lain, variabel ini memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sehingga bisa mewujudkan kebijakan yang mengusung azas governance. Partisipasi masyarakat dalam program KB tentu sangat dibutuhkan seiring dengan perubahan paradigma dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, program KB tidak bisa lagi sepenuhnya dijalankan dengan pendekatan *top down*. Masyarakat yang semakin berkembang menuntut pendekatan dalam program KB juga dilakukan secara *bottom up*. Hal tersebut dikarenakan implementor program tidak bisa lagi melakukan “intervensi” terhadap kelompok sasaran terkait berkembangnya isu hak azasi manusia.

3. Variabel Non-Peraturan / Lingkungan Kebijakan

Setiap kebijakan memiliki dinamikanya masing-masing dalam proses implementasinya. Tidak dipungkiri bahwa lingkungan atau lokasi dimana kebijakan tersebut diimplementasikan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan ataupun kegagalan implementasi suatu program. Menurut Kiviniemi (1986) dalam Purwanto (2015:81-83), menyebutkan bahwa lingkungan kebijakan yang kondusif tentu akan menciptakan kondisi yang memungkinkan implementasi untuk dapat berhasil. Sebaliknya lingkungan kebijakan yang buruk justru akan membuat implementasi

kebijakan menjadi terhambat atau gagal. Dengan demikian faktor lingkungan memberikan pengaruh pada proses implementasi.

Interaksi dalam proses implementasi dengan lingkungannya menghasilkan empat kategori atau tipologi implementasi, yaitu *cooperation* (kerjasama), *conformity* (dukungan), *counter action* (tindakan tandingan) dan *detachment* (pemutusan hubungan). Empat tipologi implementasi tersebut merupakan pertemuan dua variabel pokok yaitu :

1) Persetujuan para *stakeholder* terhadap isi kebijakan

Variabel ini merupakan variabel dengan skala nominal yang dibedakan menjadi dua kategori yaitu *pro-policy* (mendukung) dan *contra-policy* (menentang).

2) Sumberdaya yang dimiliki oleh para *stakeholder* tersebut

Variabel ini juga dibedakan menjadi dua kategori yaitu *strong* (kuat) dan *weak* (lemah).

Untuk memudahkan analisis, maka tipologi implementasi sebagai akibat (hasil) interaksi antara kebijakan dengan lingkungan kebijakan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :



Tabel 11
Interaksi Antara Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan

Resource of the actor	Values of the actor	
	Pro-Policy	Contra-Policy
Strong	Co-operation	Counter-Action
Weak	Conformity	Detachment

Sumber : Kiviniemi (1986) dalam Purwanto (2015:82)

Berdasarkan tipologi implementasi tersebut, maka dapat dibuat hipotesis bahwa peluang dihasilkannya kinerja implementasi yang baik adalah ketika suatu kebijakan yang diimplementasikan mendapat dukungan dari stakeholder non-pemerintah (lingkungan kebijakan). Kondisi yang demikian akan menghasilkan tipe implementasi *Co-operation* dan *Conformity*. Sementara itu, kinerja implementasi yang buruk akan terjadi pada tipe implementasi *Counter-action* dan *detachment*. Dua tipe implementasi tersebut terjadi dalam konteks lingkungan dimana para *stakeholder* non-pemerintah tidak mendukung kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, lingkungan kebijakan yang dimaksud adalah lingkungan atau Kawasan Pesisir yang memiliki karakteristik khusus baik itu ekosistemnya maupun masyarakatnya. Hal tersebut bisa diidentifikasi dari bagaimana kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran, sikap kelompok sasaran terhadap program KB Pria dan bagaimana dukungan kewenangan dari lingkungan kebijakan.

Perbedaan-perbedaan waktu dan perbedaan-perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Ada beberapa kemungkinan dimana perbedaan-perbedaan kondisi semacam itu dapat mempengaruhi efektivitas *output* kebijakan dari badan pelaksana serta terhadap tujuan program itu sendiri.

- 1) Perbedaan kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan ditanggulangi oleh suatu kebijakan. Kalau pada suatu waktu ada masalah sosial lainnya yang dianggap jauh lebih penting atau lebih serius maka kemungkinan dukungan politik untuk mengalokasikan sumber-sumber seperti dana, tenaga, keahlian dan sebagainya akan menurun drastis.
- 2) Keberhasilan implementasi akan lebih sulit dicapai mengingat perbedaan kondisi sosial ekonomi setempat dan keseriusan masalah yang sedang dihadapi.
- 3) Dukungan terhadap peraturan yang bermaksud untuk melindungi lingkungan, konsumen atau keselamatan kerja tampaknya berkorelasi dengan sumber-sumber keuangan dari kelompok sasaran dan kelompok lain yang memiliki posisi strategis dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Semakin beraneka ragam kehidupan ekonomi dan semakin makmur kelompok sasaran tersebut maka semakin besar peluang efektivitas implementasi program.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa kondisi sosial dan ekonomi merupakan variabel eksternal kunci yang dapat mempengaruhi *output* kebijakan badan pelaksana dan pada akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan program (Wahab, 2015: 193-194).

Dari hasil penelitian, kondisi ekonomi kelompok sasaran di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto sangat beragam. Apabila difokuskan pada kondisi perekonomian profesi yang paling dominan yaitu nelayan maka akan bersinergi dengan kondisi sosial para nelayan yang masih menganut budaya paternal dimana perolehan pendapatan disesuaikan dengan pembagian hasil berdasarkan struktur atau tingkatan. Ketika berbicara mengenai struktur atau tingkatan dalam kehidupan nelayan maka kita akan berbicara mengenai sejarah perkembangan teknologi penangkapan ikan. Sejak terjadi konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl* (jenis alat tangkap jaring tarik) di pesisir Jawa yang mengakibatkan kerusakan sumber daya hayati pada tahun 1970 hingga 1980 maka dikeluarkan Kepres yang melarang pengoperasian *trawl*.

Akibat dari pelarangan *trawl*, maka terjadi pula perubahan teknologi penangkapan, yakni *purse seine* menjadi dominan. Formasi sosial yang tercipta pun berbeda. Namun, perubahan teknologi penangkapan tidak saja menimbulkan konflik antar cara produksi, melainkan juga ternyata menyebabkan timbulnya konflik internal cara produksi. Dalam formasi sosial yang baru di kasus Pekalongan, “kekalahan” nelayan tradisional terjadi tatkala mereka melakukan adaptasi terhadap modernisasi dengan

menjadi ABK kapal *trawl*, kapal *purse seine*, dan seterusnya. “Kekalahan” mereka tidak lagi dalam pertarungan antar cara produksi, melainkan dalam hubungan produksi. Dengan memasuki cara baru yang lebih modern, mereka harus berhadapan dengan hubungan produksi yang sama sekali berbeda dengan hubungan produksi pada cara produksi tradisional. Hubungan produksi pada cara produksi yang baru bersifat hierarkis dengan spesialisasi pekerjaan yang semakin tinggi. Bagaimanapun “kekalahan” ABK adalah pada pola bagi hasil yang sering bias kepada pemilik kapal (juragan). Mereka sepenuhnya menyadari “kekalahan” itu namun tidak berdaya untuk memperjuangkannya (Satria, 2015:63-65).

Berdasarkan model implementasi yang ditawarkan oleh Grindle khususnya pada poin tipe manfaat isi kebijakan yang berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Tentunya apabila dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, mereka akan lebih merespon program atau kebijakan yang dapat membantu mereka terlepas dari himpitan masalah ekonomi. Sementara untuk program KB sepertinya belum menjadi urusan yang sangat darurat khususnya bagi laki-laki. Hal ini berhubungan dengan bagaimana persepsi tentang budaya KB yang lebih diperuntukkan untuk wanita.

Selanjutnya, perubahan-perubahan tertentu dalam sumber-sumber dan sikap kelompok-kelompok masyarakat di berbagai wilayah terhadap tujuan undang-undang dan *output-output* kebijakan lembaga-lembaga pelaksana, memainkan peran yang cukup penting dalam proses implementasi (Wahab, 2015:196-197). Sikap menurut La Pierre merupakan suatu pola perilaku maka komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Ini artinya bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut (Azwar, 2015:27).

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar sikap kelompok sasaran menunjukkan bahwa mereka mempercayai suatu informasi yang mereka ketahui yang kemudian membentuk perilaku menolak terhadap kontrasepsi pria. Dalam salah satu teori perilaku manusia yaitu "Teori Perilaku Terencana" menyebutkan bahwa diantara berbagai keyakinan yang akhirnya akan menentukan intensi dan perilaku tertentu adalah keyakinan mengenai tersedia-tidaknya kesempatan dan sumber yang diperlukan. Keyakinan ini dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku yang bersangkutan di masa lalu, dapat juga dipengaruhi oleh informasi tidak langsung mengenai perilaku itu misalkan dengan melihat pengalaman teman atau orang lain yang pernah melakukannya, dan dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mengurangi atau

menambah kesan kesukaran untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan. (Azwar, 2015:13).

Sedangkan dalam hal dukungan kewenangan yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam program dapat berbentuk :

- 1) Jumlah dan arah pengawasan
- 2) Penyediaan sumber-sumber keuangan
- 3) Banyaknya tugas-tugas baru, sesudah tugas-tugas termuat dan undang-undang yang telah ada dan saling bertentangan diantara tugas-tugas tersebut.

Yang dimaksud lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam program disini ialah lembaga-lembaga yang memiliki wewenang kontrol terhadap kewenangan hukum dan sumber-sumber keuangan. Lazimnya, yang masuk dalam lembaga ini adalah badan legislatif lebih khusus komisi keuangan dan komisi lain yang berkaitan dengan kebijakan atau program (Wahab, 2015:199).

Dikarenakan penelitian ini dilakukan dalam level desa, maka lembaga yang dimaksud adalah pemerintahan desa dimana saat ini dengan adanya anggaran desa yang berbentuk ADD (Alokasi Dana Desa) maupun Dana Desa diharapkan setiap desa dapat mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan program Keluarga Berencana.

Dalam Juknis Alokasi Dana Desa, disebutkan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pengakuan pemerintah kepada desa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam mencapai sasaran menjadikan desa maju, mandiri, masyarakat makmur dan sejahtera. ADD digunakan untuk keperluan alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta keperluan belanja desa lainnya yang merupakan sisa setelah terpenuhi penghasilan tetap 12 bulan dan dilakukan melalui musyawarah desa. Telah disebutkan dalam juknis ADD bahwa penggunaan ADD selain untuk siltap adalah sebagai berikut :

- 1) Konsumsi rapat
- 2) Bidang kegiatan seperti pendataan desa
- 3) Pelayanan kesehatan desa
- 4) Honor kader

Dari keempat penggunaan ADD tersebut, tentunya bisa dikaitkan dengan kegiatan program Keluarga Berencana karena program KB juga termasuk upaya pelayanan kesehatan.

Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima desa pesisir, rata-rata desa hanya menganggarkan untuk keperluan honor kader KB yang

bersumber dari ADD. Sedangkan anggaran DD masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa yang rusak akibat bencana rob. Dari pernyataan salah satu *key informan* di desa, sebenarnya kegiatan program KB bisa dianggarkan melalui anggaran DD dalam bentuk kegiatan pelatihan ataupun penyuluhan namun mereka merasa kesulitan bahkan minim pengetahuan dalam pengadministrasian kegiatannya.

Untuk mendapatkan dukungan operasional diatas tentunya harus dilakukan pendekatan oleh Penyuluh KB yang membina desa tersebut secara intensif. Dari hasil penelitian pula diketahui bahwa pengetahuan kepala desa sebagai pimpinan wilayah desa terhadap program KB sudah cukup bagus, rata-rata mereka memahami betul arti pentingnya program KB untuk kesejahteraan keluarga. Dengan modal awal ini seharusnya Penyuluh KB bisa lebih mudah melakukan advokasi kepada kepala desa.

Namun disisi lain, dari hasil wawancara dengan tokoh agama di desa-desa pesisir, diketahui bahwa pendapat mereka terhadap program KB masih belum sepenuhnya mendukung. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa program KB dibolehkan dalam agama islam hanya dalam upaya untuk mengatur jarak kelahiran. Dalam hal ini **impelementasi program KB mengalami kesulitan** terlebih dalam peningkatan penggunaan alat kontrasepsi mantap khususnya bagi pria yaitu MOP. Dalam pandangan beberapa informan, kontrasepsi mantap hanya boleh dilakukan dengan alasan yang kuat terutama alasan kesehatan. Namun dari hasil wawancara dengan informan pria hanya

sedikit diantara mereka yang enggan melakukan MOP dengan alasan agama. Penelitian serupa yang dilakukan oleh saudara Ahmad Zaeni di Kabupaten Batang juga menyatakan bahwa agama tidak begitu mempengaruhi peningkatan kesertaan KB Pria.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tipologi kinerja implementasi maka implementasi kebijakan KB Pria yang berjalan di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto masuk dalam kategori *detachment*. Hal ini dikarenakan terjadi tindakan penolakan dari sebagian *stakeholder* non-pemerintah yaitu masyarakat khususnya pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi pria.

2. Proses Implementasi Kebijakan KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto

Berikut ini akan dideskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan Program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto sesuai dengan tahapan implementasi dari Model Mazmanian dan Sabatier (1983).

a. Output Kebijakan Badan Pelaksana

Grindle (dalam Purwanto, 2015:66) menyatakan bahwa implementasi kebijakan menjadi suatu “jembatan” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

Merujuk pada pendapat Ripley (dalam Purwanto, 2015:68), implementasi dapat dilihat dari dua perspektif sebagaimana ia jelaskan “implementation studies have two major foci : “*compliance*” and “*what’s happening?*”. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan. Dengan pandangan yang demikian maka keberhasilan implementasi secara “mudah” dapat dilihat melalui serangkaian tahapan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh para implementor dalam melakukan *delivery* berbagai *policy output* kepada kelompok sasaran.

Dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa dari tiga tahapan implementasi KB Pria yang harus dilakukan, implementor program dalam hal ini adalah Penyuluh KB tidak sepenuhnya patuh. Pada tahap persiapan, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang ada di desa-desa pesisir Kecamatan Wonokerto sebagian besar aktif. Para PPKBD atau SKD sebagai kepanjangan tangan Penyuluh KB telah memiliki pengetahuan yang bagus mengenai Program KB dan telah mengetahui dengan jelas tugas mereka. Namun dikarenakan sedikitnya jumlah akseptor pria di Kecamatan Wonokerto, kelompok “Prio Utomo” yang ada di desa tidak berjalan maksimal. Bahkan beberapa desa tidak memiliki kelompok tersebut.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pengendali program KB di Kecamatan Wonokerto belum maksimal dalam menyiapkan IMP yang

ada di desa. Hal tersebut dapat terlihat dari IMP yang ada hanya PPKBD saja yang aktif dalam upaya pencapaian tujuan program. Sedangkan kelompok-kelompok lain yang masih masuk dalam lingkup IMP belum sepenuhnya digerakkan. Institusi Masyarakat Pedesaan merupakan aset utama bagi implementor Program KB di lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga penyuluh KB yang sangat minim dan tidak proporsional dengan beban kerja yang harus diemban.

Pada tahap perencanaan, seorang Penyuluh KB dituntut untuk memiliki kemampuan spesifik tentang isi kebijakan khususnya KB Pria. Mereka harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup, untuk itu sangat diperlukan sekali adanya pelatihan ataupun pembinaan yang khusus mengenai Penggarapan KB Pria. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edward III, Van Meter dan Van Horn maupun Grindle adalah sumber daya yang meliputi jumlah staf, pendanaan atau anggaran serta sarana dan prasarana. Jika jumlah pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program. Namun dari pernyataan *key informan*, mereka menyebutkan bahwa selama ini mereka hanya mendapat pelatihan penggarapan Program KB secara umum dan tidak secara khusus tentang KB Pria.

Untuk meningkatkan capaian kesertaan KB Pria ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh implementor, antara lain dengan memberikan insentif atau reward kepada akseptor MOP yang telah dilayani senilai

150 ribu per akseptor. Namun hal tersebut dirasa belum mampu menarik minat para pria untuk berpartisipasi menjadi peserta KB Pria. Reward tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi karena setelah pelayanan MOP seorang pria diharuskan istirahat dari aktivitasnya. Handoko (1995:92) mengemukakan bahwa *reward* merupakan suatu alat untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan perilaku seseorang sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan dan akhirnya target atau tujuan yang ingin dicapai terlaksana dengan baik. Dalam upaya peningkatan capaian kesertaan pria dalam ber KB *reward* diberikan sebagai motivasi agar mereka mau berpartisipasi dalam program. Salah satu contoh pemberian *reward* dalam program KB adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta kepada akseptor pria dengan memberikan seekor kambing sebagai upaya pemberdayaan. Hal tersebut nyatanya berhasil meningkatkan capaian KB pria di daerah tersebut (www.kulonprogokab.go.id, diakses pada 4 Juni 2017).

Perencanaan selanjutnya dalam penggarapan program KB di daerah pantai adalah melakukan pendekatan dengan tokoh nelayan yang merupakan profesi dominan di kawasan tersebut, namun dari wawancara yang dilakukan dengan *key informan*, implementor program KB belum sama sekali melakukannya. Tokoh nelayan merupakan tokoh informal yang ada di daerah pantai selain tokoh agama dan tokoh adat. Dalam pedoman pelaksanaan penggarapan program KB pendekatan dengan tokoh informal dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerjasama agar

mereka dapat memberikan komitmen, dukungan operasional dan peran aktif dalam pelaksanaan program KB khususnya KB Pria.

Tokoh nelayan yang dalam penelitian ini adalah Nahkoda dianggap mampu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat nelayan. Hal tersebut dikarenakan berlakunya prinsip-prinsip *Patron-Klien* pada masyarakat pesisir. Seorang patron (bapak buah) akan membantu klien (anak buah) berupa kemudahan akses pada peluang kerja serta mengatasi kebutuhan mendadak klien atau meringankan beban hutang klien pada pelepas uang. Klien menerima kebaikan tersebut sebagai “hutang budi”, menghargai dan berkomitmen untuk membantu patron dengan sumber daya jasa tenaga yang mereka miliki. Unsur-unsur yang berpotensi sebagai patron dalam masyarakat pesisir salah satunya adalah Juru Mudi atau Nahkoda. Secara intensif relasi patron-klien ini terjadi didalam aktivitas pranata ekonomi dan kehidupan sosial di kampung. Seorang patron memiliki status dan peranan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat nelayan. Kompleksitas relasi sosial patron-klien (vertikal) dan relasi sosial horisontal diantara mereka merupakan urat-urat struktur sosial masyarakat nelayan (Kusnadi, 2001:3).

Tahap selanjutnya adalah langkah operasional penggarapan KB Pria dimana hal utama yang harus dilakukan oleh implementor program KB adalah menepis penyebaran informasi yang negatif mengenai kontrasepsi Pria maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada para pria di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto, namun dari hasil wawancara

pula diketahui bahwa implementor program KB tidak secara intensif melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran. Kegiatan tersebut hanya dilakukan secara singkat tanpa memberikan informasi yang lengkap.

Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh KB biasa disebut dengan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu efek. Informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat, atau dengan bahasa lain informasi adalah pesan yang disampaikan. Sedangkan Edukasi adalah pengetahuan yang ditujukan sebagai proses perubahan perilaku kearah yang positif (<http://probidanbangsal.blogspot.com/2009/04/komunikasi-informasi-dan-edukasi-kie.html>).

Berbeda dengan perspektif yang pertama tentang kepatuhan, perspektif kedua adalah implementasi diukur dari keberhasilan dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa munculnya dampak kebijakan. Artinya, kepatuhan para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan bukan satu-satunya alat ukur keberhasilan implementasi. Kepatuhan tersebut semestinya perlu dipandang sebagai kondisi yang harus dilalui (*necessary condition*) agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan, bukan tujuan akhir dari implementasi itu sendiri (Purwanto, 2015:70). Perspektif what's happening dalam penelitian ini relevan dengan bagaimana kondisi

dari kelompok sasaran yang di deskripsikan dalam variabel lingkungan kebijakan.

Apabila mengacu pada dua perspektif yang ditawarkan oleh Ripley diatas, maka implemetasi kebijakan KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto tidak memenuhi keduanya. Implementor program tidak sepenuhnya mematuhi tahapan implementasi yang telah ditetapkan dan disisi lain sikap kelompok sasaran memberikan sikap penolakan terhadap program itu sendiri. Hal ini tentunya sama dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (1983) yang melihat kegagalan implementasi dari ketidakpatuhan implementor dalam menjalankan pedoman dan pencapaian tujuan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor yang lain seperti lingkungan kebijakan.

b. Kepatuhan Kelompok Sasaran Terhadap Output Kebijakan

Purwanto (2015:75) menyatakan bahwa untuk menjamin implementasi berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai *output* kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan.

Partisipasi pria dalam program KB diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan mereka dalam pemakaian alat kontrasepsi. Namun dari hasil

penelitian diketahui bahwa implementor program kurang memberikan informasi yang lengkap mengenai alat kontrasepsi pria, maka yang terjadi mereka hanya mendapatkan informasi dari lingkungan dimana informasi tersebut justru memberikan dampak yang buruk terhadap program KB Pria. Hal ini dapat dilihat pada variabel non-peraturan sub-variabel sikap kelompok sasaran dimana rata-rata kelompok sasaran tidak mau berpartisipasi menggunakan alat kontrasepsi Pria yang sebagian besar dikarenakan informasi negatif tentang alat kontrasepsi tersebut. Isu ini semakin berkembang terlebih karena implementor program tidak memberikan informasi atau sosialisasi yang lengkap kepada kelompok sasaran.

c. Dampak Nyata Output Kebijakan dan Persepsi Kelompok Sasaran

Kegiatan untuk menyampaikan *policy output* kepada kelompok sasaran ini dalam perspektif sempit sebagaimana dikatakan oleh Ripley (1985) sering dipahami sebagai kegiatan implementasi kebijakan. Tujuan dari *delivery activities* adalah sampainya *policy output* kepada kelompok sasaran yang diharapkan mampu menimbulkan *policy effect* (efek suatu kebijakan) atau dalam konseptualisasi para ahli yang lain sering disebut sebagai *initial outcome* yaitu dampak yang langsung dirasakan oleh kelompok sasaran (Purwanto, 2015:77).

Dari permasalahan dalam penelitian ini, diketahui bahwa capaian kesertaan KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto sangat rendah, bahkan tiga desa diantaranya hasil capaiannya adalah 0%. Apabila kita lihat dari *output* kebijakan yang telah dilakukan oleh implementor

program, maka bisa dikatakan bahwa *policy outcome* belum mampu mewujudkan tujuan kebijakan dan bisa dikatakan bahwa kinerja implementasi tersebut rendah.

Apabila permasalahan tersebut kita hubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB Pria maka hambatan keberhasilan implementasi dikarenakan karena hal-hal sebagai berikut :

1) Variabel Karakteristik Masalah

- Dari hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik kelompok sasaran adalah masyarakat yang “keras” dan mayoritas pekerjaan dari kelompok sasaran adalah nelayan. Menurut Guhde (2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Agung Prabowo di Desa Larangan Kabupaten Brebes menyatakan bahwa status pekerjaan dapat berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam KB karena adanya faktor pengaruh lingkungan pekerjaan yang mendorong seseorang untuk ikut dalam KB. Dari wawancara dengan beberapa informan nelayan, mereka menyatakan tidak mau menggunakan metode MOP karena informasi yang mereka dapatkan bahwa MOP mampu mempengaruhi tenaga mereka dalam bekerja. Namun ternyata faktor pekerjaan bukanlah faktor penyebab kelompok sasaran tidak mau berpartisipasi dalam Program KB Pria. Hal ini dikarenakan pria yang bukan nelayan pun tetap tidak mau berpartisipasi dalam penggunaan kontrasepsi pria.
- Faktor pendidikan merupakan dasar bagi seseorang untuk mampu menyerap pengetahuan tentang program KB. Dari hasil wawancara

dengan informan yang berpendidikan SD ternyata menunjukkan hasil yang sama dengan informan yang berpendidikan sarjana. Sekalipun pengetahuan mereka sudah cukup bagus mengenai manfaat program KB tapi mereka tetap saja tidak mau berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi pria. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan kelompok sasaran tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan kontrasepsi pria.

- Faktor yang dirasa memberikan pengaruh signifikan terhadap kegagalan implementasi Program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto adalah budaya atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan kelompok sasaran. Para pria cenderung menyerahkan urusan KB kepada para istrinya. Selain itu, kebiasaan istri nelayan yang cenderung memilih alat kontrasepsi jangka pendek juga menjadi faktor yang menghambat.
- Untuk merubah perilaku kelompok sasaran, salah satu yang harus diupayakan adalah kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang intensif, namun implementor program KB di Kecamatan Wonokerto belum melakukannya.

2) Variabel Isi Kebijakan

- Dalam pelayanan Program KB Pria, kerjasama dengan mitra dirasa masih kurang. Puskesmas sebagai mitra pelayanan program KB belum berkompeten untuk melaksanakan pelayanan MOP. Namun hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat

pria di Kawasan Pesisir untuk berpartisipasi dalam menggunakan alat kontrasepsi.

- Salah satu kegiatan yang dianggap menghambat implementasi karena tidak sesuai dengan pedoman penggarapan daerah pantai adalah tidak adanya pendekatan kepada kelompok ataupun tokoh nelayan yang dilakukan oleh implementor program KB di Kecamatan Wonokerto.
- Tidak adanya keterlibatan kelompok sasaran yang telah menerima program dalam bentuk suatu wadah atau kelompok “Prio Utomo” dianggap mampu menghambat implementasi.

3) Variabel Non-Peraturan

- Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendapatan tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini terlihat dalam hierarki nelayan dimana seorang nahkoda yang dianggap memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan buruh nelayan juga memberikan respon yang negatif terhadap kontrasepsi pria.
- Minimnya sosialisasi atau penyampaian *policy output* oleh implementor kepada kelompok sasaran memberikan dampak timbulnya sikap tidak mendukung terhadap program KB Pria. Selain itu, hal tersebut disebabkan pula karena informasi tentang kegagalan pelayanan yang menyebabkan calon penerima program enggan untuk berpartisipasi.

- Para pemegang kewenangan di tingkat desa yang menganggap program KB bukanlah program yang darurat menyebabkan alokasi anggaran dari desa-desa pesisir pada khususnya belum optimal.

d. Evaluasi Output Kebijakan

Dari identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, telah diketahui mana saja faktor yang menghambat implementasi Program KB Pria. Dari sisi kelompok sasaran, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penghambatnya bermuara pada sikap kelompok sasaran yang menolak Program KB Pria yang kemudian menimbulkan perilaku tidak mau berpartisipasi menggunakan alat kontrasepsi pria.

Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus dipengaruhi apabila kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Evaluasi *output* kebijakan dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan berperilaku dimana pendekatan ini diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*) (Wahab, 2015:240). Namun hal tersebut harus diawali dengan perubahan yang dilakukan dalam sisi implementor terlebih dahulu.

Apabila gejala-gejala dan sebab-sebab timbulnya penolakan telah diketahui, maka resep yang disarankan oleh pendekatan berperilaku berikut ini secara teoritis cukup jelas dan sederhana, walaupun dalam prakteknya seringkali tidak mudah dilakukan. Untuk menghindari atau sedikitnya mengurangi penolakan, informasi yang lengkap mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan atau diharapkan harus dapat

disediakan sejak awal, yang meliputi alasan, tujuan dan sarana yang dipergunakan. Selain itu, harus terdapat musyawarah yang ekstensif dengan pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh perubahan, baik dari kalangan dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Sedapat mungkin mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keterusterangan mengenai permasalahan dan segala akibat yang akan terjadi (komunikasi yang valid) sangat dianjurkan, misalnya dengan cara persuasif atau berusaha meyakinkan dan bukan dengan cara memerintah dan melibatkan pemimpin-pemimpin informal serta kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam proses konversinya (Wahab, 2015:242).

Hal diatas sesuai dengan pendapat Azwar (2015:30-33) dimana dalam interaksi sosialnya, individu akan bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengaruh orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Ilustrasi mengenai pembentukan sikap yang dikarenakan pengaruh orang yang dianggap penting oleh individu antara lain dapat dilihat pula pada situasi dimana terdapat hubungan atasan-bawahan. Sangatlah umum terjadi bahwa sikap atasan terhadap suatu masalah diterima dan dianut oleh bawahan tanpa landasan afektif maupun kognitif yang relevan dengan objek sikapnya. Dalam penelitian ini,

diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu informan bahwa orang yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi masyarakat pesisir khususnya para nelayan adalah Jurumudi atau Nahkoda. Lebih jelas, informan tersebut mengatakan bahwa posisi Nahkoda hampir seperti raja bagi para nelayan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan strategi persuasi yang merupakan usaha perubahan sikap individu dengan memasukkan ide, pikiran, pendapat dan bahkan fakta baru lewat pesan-pesan komunikatif. Pesan yang disampaikan dengan sengaja dimaksudkan untuk menimbulkan kontradiksi dan inkonsistensi diantara komponen sikap individu atau diantara sikap dan perilakunya sehingga mengganggu kestabilan sikap dan membuka peluang terjadinya perubahan yang diinginkan (Azwar, 2015:61-62). Penyampaian informasi yang relevan dengan penelitian ini adalah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Program KB Pria yang dilakukan secara intensif kepada kelompok sasaran di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto.

Pendekatan dengan tokoh informal atau dalam penelitian ini yang dimaksud adalah tokoh nelayan dan kegiatan penyuluhan merupakan tahapan-tahapan dalam alat manajemen (proses) lini lapangan yang ampuh untuk menggerakkan segenap potensi masyarakat untuk memberikan dukungan partisipasi kepada Program Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal dengan "10 Langkah PKB". Dalam pandangan ilmu manajemen, 10 Langkah PKB merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip manajemen yang mengandung unsur Planning,

Organizing, Actuating dan Controlling. Tahapan dalam 10 Langkah PKB adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Pendekatan Tokoh Formal | } | <u>Planning</u> |
| 2. Pendataan dan Pemetaan Sasaran | | |
| 3. Pendekatan Tokoh Informal | | |
| 4. Pembentukan kesepakatan melalui Rapat Koordinasi | | |
| 5. Penguatan hasil kesepakatan | | |
| 6. KIE / Penyuluhan bersama Tokoh Formal/Informal | } | <u>Organizing&Actuating</u> |
| 7. Pembentukan Kelompok Pelopor | | |
| 8. Pelayanan KB/KS | } | <u>Controlling</u> |
| 9. Pencatatan dan Pelaporan | | |
| 10. Pembinaan dan Evaluasi | | |

Apabila 10 Langkah PKB dibaurkan dengan Pedoman Penggarapan Wilayah Pantai maka dilakukan fokus atau penekanan terhadap beberapa langkah tersebut yaitu pada langkah Planning dan Organizing. Pada langkah Planning, ditekankan pada pendekatan tokoh informal dengan melakukan advokasi serta pembentukan kesepakatan agar dapat mendukung program KB. Dalam penelitian ini, PKB dapat melakukan pendekatan dengan tokoh nelayan yaitu Nahkoda.

Selanjutnya pada langkah Organizing, difokuskan pada kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan Pembentukan Kelompok Pelopor. Kegiatan KIE yang merupakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dapat

dilakukan secara persuasif yang dikolaborasikan dengan kelompok pelopor. Kelompok Pelopor dapat dibentuk dengan mengumpulkan akseptor pria (Aksesor Kondom dan MOP) yang kemudian dilakukan pembinaan sehingga mereka mampu melakukan KIE Persuasif dalam bentuk penyampaian testimoni dengan fasilitasi PKB. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Saptono Iman Budisantoso (2008) yang menyatakan bahwa teman yang telah menjadi akseptor pria merupakan *reinforcing* yang positif dalam meningkatkan pengetahuan tentang partisipasi pria dalam ber KB. Karena walaupun seseorang sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang KB Pria tetapi mereka masih ragu-ragu untuk berpartisipasi tanpa melihat contoh langsung dari teman yang sudah melakukannya.

Dengan mengaplikasikan langkah-langkah diatas, diharapkan ada perubahan sikap kelompok sasaran terhadap program KB khususnya KB Pria. Dengan penyuluhan yang intensif serta pendekatan yang maksimal ditujukan agar partisipasi pria meningkat dari yang tadinya hanya berupa dukungan terhadap istri untuk menggunakan alat kontrasepsi menjadi partisipasi yang menuju ke arah pemakaian alat kontrasepsi pria. Dengan begitu dapat dipastikan capaian kesertaan KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan Program KB Pria di kawasan tersebut bisa dikatakan belum maksimal. Apabila mengacu pada teori implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengatakan bahwa suatu implementasi akan berhasil apabila implementor program dalam hal ini adalah Penyuluh KB mampu menjalankan setiap tahapan penggarapan program yang telah dibuat dalam peraturan yang ada. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh KB di kawasan tersebut tidak sepenuhnya mematuhi dan menjalankannya.

Salah satu hal yang disinyalir menyebabkan kurangnya kepatuhan implementor program terhadap peraturan adalah kurangnya personil penyuluh KB di kecamatan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh KB di Kecamatan Wonokerto hanya berjumlah 2 (dua) orang yang harus membina 11 (sebelas) desa. Hal ini membuat beban pekerjaan menjadi terasa berat manakala karakter masyarakat yang dihadapi merupakan masyarakat yang keras. Tahapan penggarapan terpenting yang tidak dilakukan secara maksimal oleh Penyuluh KB adalah kegiatan penyuluhan tentang KB Pria kepada masyarakat pesisir. Dampak yang dihasilkan dari minimnya penyuluhan tersebut adalah sikap tidak mendukung yang ditunjukkan para pria

terhadap program KB Pria. Minimnya penyuluhan membuat informasi negatif tentang alat kontrasepsi pria semakin berkembang di masyarakat yang pada akhirnya membuat capaian KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto rendah.

Hal lain yang menjadi penyebab rendahnya capaian KB Pria adalah mobilitas nelayan yang terbilang tinggi. Ketika berangkat melaut, mereka akan meninggalkan keluarganya hingga 6 (enam) bulan lamanya. Dari fenomena ini mereka beranggapan sudah melakukan KB alami dikarenakan tidak bertemu dengan pasangan mereka. Selain itu sistem gender yang berlaku di masyarakat pesisir dimana menempatkan wanita sebagai penanggung jawab aktivitas sosial, budaya dan ekonomi di darat secara tidak langsung membebankan urusan KB kepada mereka. Inilah alasan mengapa penggarapan program KB di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto lebih ditekankan pada program KB Wanita.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu proses implementasi tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mendorong maupun yang menghambat keberhasilannya. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor yang mampu mendorong keberhasilan Program KB Pria adalah adanya kelompok Prio Utomo. Apabila dilakukan pembinaan yang lebih intensif dapat diyakini bahwa testimoni dari mereka mampu menjadi penarik minat para pria di pesisir untuk menggunakan alat kontrasepsi pria. Selain itu penyuluhan yang ditekankan kepada salah satu alat kontrasepsi pria yaitu Kondom yang dianggap lebih minim resiko dapat meningkatkan capaian program.

Sedangkan faktor penghambat dari implementasi program ini disebabkan dari dua sisi yaitu dari implementor dan dari kelompok sasaran. Telah diketahui bahwa implementor program di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto tidak maksimal dalam melakukan penyuluhan KB Pria sehingga para pria di kawasan tersebut tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi akurat mengenai metode kontrasepsi pria. Selain itu tidak adanya pendekatan dengan tokoh nelayan di kawasan pesisir menyebabkan kegiatan advokasi tidak berjalan efektif. Penghambat dari kelompok sasaran antara lain disebabkan karena budaya yang berlaku di kelompok sasaran yang menganggap bahwa KB adalah urusan wanita atau istri. Penghambat lainnya adalah sikap kelompok sasaran yang kurang mendukung terhadap Program KB Pria yang berakibat pada perilaku tidak mau menggunakan alat kontrasepsi pria. Hal ini dikarenakan informasi negatif mengenai kegagalan pelayanan MOP yang dialami oleh beberapa akseptor membuat para pria merasa takut.

Dari hasil analisis terhadap proses implementasi program KB Pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto, peneliti menyimpulkan bahwa Program KB yang semula merupakan program pemerintah yang dilakukan dengan intervensi pada masa orde baru ternyata tidak bisa lagi dilakukan pada era sekarang. Pembuat kebijakan nampaknya harus lebih memahami bahwa kinerja implementor program di lini bawah bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan program. Kelompok sasaran maupun lingkungan kebijakan ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses implementasi tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Program Keluarga Berencana. Sehingga dapat meningkatkan capaian kesertaan pria dalam Program Keluarga Berencana di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

1. Menambah jumlah Penyuluh KB di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan kebijakan yang tidak sama dengan lingkungan perkotaan atau pedesaan.
2. Memaksimalkan penyuluhan maupun sosialisasi tentang Program KB Pria di tingkat desa. Hal ini dirasa dapat meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran mengenai metode kontrasepsi pria.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan medis kontrasepsi pria terutama Medis Operasi Pria (MOP) agar meminimalisir kegagalan yang mampu memberikan dampak yang sangat besar terhadap sikap kelompok sasaran.
4. Meningkatkan pendekatan dengan kelompok ataupun tokoh nelayan. Advokasi yang intensif diharapkan mampu mendorong nelayan untuk mengikuti keputusan tokoh nya dalam hal ini adalah Nahkoda.
5. Meningkatkan keaktifan kelompok "Prio Utomo". Para akseptor pria terutama MOP diharapkan dapat memberikan testimoninya agar dapat menangkal isu negatif mengenai MOP.
6. Perlu adanya pengembangan model penyuluhan yang bekerjasama dengan tokoh informal dan menggunakan testimoni akseptor pria yang telah dilayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Azwar, Saifuddin. (1995). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2009). *Pedoman Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*. Jakarta : BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2014). *Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta : BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2014). *Peran Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta : BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2013). *Percepatan Pelaksanaan Revitalisasi Program KKB Nasional Kerjasama BKKBN dan TNI*. Jakarta : BKKBN
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2010). *Isu-Isu Terkini Berita Kependudukan*. *Warta Keluarga Berencana No 1 Tribulan I*. BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (1995). *Pedoman Operasional Gerakan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Daerah Pantai di Tingkat Lini Lapangan*. BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2011). *Potensi Penggarapan Program KB di Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (Galciltas) Melalui Pemetaan Kwadran Unmetneed dan MOP, Proporsi Pustumpar Tidak Ber-KB, Proporsi Pustumu Non-MKJP dan Proporsi PUS Hamil*. BKKBN : Puslitbang KB dan Keluarga Sejahtera.
- Bengen, D.G. (2000a). *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir*. Bogor : Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor.
- Biradar, Santosh M and Ravi A Bhovi. (2013). *Perception Among Women About Involving Men In Family Planning*. Dept. Of Community Medicine, BLDEU's Shri B M Patil Medical College, Bijapur-Karnataka : *International Journal of Pharma and Bio Science* 2013 Apr; 4(2): (B) 400-403.
- Creswell. John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Dahuri, R. (2000). Permasalahan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir. PPSDAL-LP Universitas Padjadjaran. Jurnal Ekologi dan Pembangunan No.4 Agustus 2000.
- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy 14th Edition*. United States : Pearson Education Inc.
- Edward, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C. : Congressional Quarterly Press.
- Handoko, T.Hani. (1995). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Hariwijaya, M dan Triton PB. (2013). *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Platimum.
- Hendropuspito, O.C. (1989). *Sosiologi Sistematis*. Jakarta : Penerbit Kanisius.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ika. (2012). *Minim Informasi, Partisipasi Pria Untuk KB Rendah*. Diambil 4 Februari 2016, dari situs World Wide Web : <http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=4468>
- Kirsten, M. Vogelsong. (2011). *Male Contraception, Research Area For Male Fertility Regulation/Male Reproductive Health UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme Of Research, Development and Reseach Training in Human Reproduction (HRP)*. Geneva, Switzerland : Department of Reproductive Health and Research Wworld Health Organization.
- Knoepfel, Peter, Corinne Larrue, Frederic Varone and Michael Hill. (2007). *Public Policy Analysis*. Great Britain : The Policy Press University of Bristol.
- Kuntjoro, Z.S. (2002). *Dukungan Sosial pada Lansia*. <http://www.e-psikologi.com>. Artikel. Diakses pada 16 Februari 2017.
- Kusnadi. (2001). *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*. Diambil 3 Juni 2007, dari situs World Wide Web : <http://slideshare.net>.
- Kusumanegara, Solahudin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

- Manetti, GJ and SC Honig. (2010). Update On Male Hormonal Contraception : Is The Vasectomy in Jeopardy?. University Press Cambridge, UK : International Journal Of Impotence Research (2010) 22, 159-170.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. (1998). Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan. Jakarta : EGC.
- Miles, Matthew B & A. M Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif, diterjemahkan T.R. Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Ghulam, et all. (2015). Family Planning Knowledge, Attitude and Practices among Married Men and Women In Rural Areas Of Pakistan : Findings From A Qualitative Need Assesment Study. Department of Urogynecology, Faculty Of Medicine and Health Sciences, University Of Gent, Belgium : International Journal of Reproductive Mendicine Volume 2015, Article ID 190520, 8 Pages.
- Nugroho, Riant. (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayne. (2008). Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). Implementasi kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Putra, Fadilah. (2003). Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik : Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Satria, Arif. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siswanto, Victorianus Aries. (2012). Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2003). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suyono, Haryono. (2009). Otobiografi Haryono Suyono Mengubah Loyang Menjadi Emas. Jakarta : Citra Kharisma Bunda.

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Wahab, Solichin Abdul. (2015). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Sinar Grafika.

Witjaksono AS, Julianto. (2012). *Rencana Aksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2012-2014*. BKKBN

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik. (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta : CAPS.

UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi Pemerintahan

UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perka BKKBN No. 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria.

Perka BKKBN No. 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

Umpan balik Tk. Kab. Th. 2014&2015

www.ugm.ac.id/id/post/page/minim-informasi-partisipasi-pria-untuk-kb-rendah

www.m.beritasatu.com/kesehatan

www.okezone.com

<http://probidanbangsal.blogspot.com/2009/04/komunikasi-informasi-dan-edukasi-kie.html>

www.kulonprogokab.go.id



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan untuk Penyuluh KB

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A. Variabel Karakteristik Masalah

a. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana karakteristik masyarakat pesisir di Kecamatan Wonokerto?
- 2) Bisakah anda menjelaskan profesi para pria di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto?
- 3) Mengapa masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto lebih memilih pekerjaan sebagai nelayan?

b. Sifat Populasi

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat pesisir di Kecamatan Wonokerto?
- 2) Bagaimana budaya yang berlaku di keluarga nelayan Kecamatan Wonokerto?
- 3) Bagaimana kebiasaan ber-KB masyarakat pesisir Kecamatan Wonokerto?

c. Derajat Perubahan Perilaku yang Diharapkan

- 1) Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang program KB?
- 2) Bagaimana cara anda memotivasi pria di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto untuk ber-KB?

B. Variabel Daya Dukung Peraturan

a. Integrasi Organisasi Pelaksana

Pertanyaan :

- 1) Bisakah anda menjelaskan mitra anda dalam pelaksanaan Program KB Pria di Kecamatan Wonokerto?
- 2) Bagaimana anda menjalin kerjasama dengan mitra dalam implementasi Program KB Pria di Kecamatan Wonokerto?
- 3) Bagaimana koordinasi yang anda lakukan terhadap pemangku kewenangan di kecamatan dan di desa?

b. Rekrutmen dari Pejabat Pelaksana

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana pengetahuan kader tentang program KB?
- 2) Apa saja tugas seorang SKD?
- 3) Bagaimana anda memantapkan komitmen para SKD di tingkat desa?
- 4) Seberapa sering anda membina mereka?
- 5) Bagaimana pembinaan tersebut?

c. Akses Formal

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana keberadaan kelompok KB Pria di Kecamatan Wonokerto?
- 2) Bagaimana pembinaan yang anda lakukan terhadap kelompok tersebut?

C. Variabel Non Peraturan

a. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kelompok Sasaran

Pertanyaan :

- 1) Bisakah anda menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto?
- 2) Bagaimana struktur kehidupan nelayan?
- 3) Bagaimana keberadaan kelompok nelayan di Kecamatan Wonokerto?
- 4) Bisakah anda menjelaskan siapa tokoh yang berpengaruh bagi para nelayan?
- 5) Bagaimana tingkat pendapatan nelayan?
- 6) Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan kepada kelompok nelayan?

b. Sikap Kelompok Sasaran

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana pendapat pria di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto tentang MOP?
- 2) Bagaimana pendapat pria di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto tentang Kondom?

c. Dukungan Kewenangan

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana pendapat kepala desa tentang Program KB?
- 2) Bagaimana keterlibatan kepala desa dalam Program KB?
- 3) Bagaimana bentuk dukungan kepala desa terhadap Program KB?

D. Variabel Proses Implementasi

a. Output Kebijakan Organisasi Pelaksana

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana pendapat Ibu mengenai dasar peraturan tentang peningkatan partisipasi KB Pria?
- 2) Menurut Ibu, apakah perlu adanya peraturan atau pedoman khusus untuk penggarapan daerah pesisir?
- 3) Berapa kali frekuensi kegiatan Rakorcam?
- 4) Siapa saja yang hadir dalam kegiatan Rakorcam?
- 5) Bagaimana dengan kegiatan Rakordes?
- 6) Bagaimana pendekatan anda dengan kelompok nelayan?
- 7) Bisakah anda menjelaskan tentang Institusi Masyarakat Pedesaan?
- 8) Bagaimana keaktifan mereka?
- 9) Bagaimana kerjasama dengan KUA?
- 10) Bagaimana dengan pelatihan tentang peningkatan partisipasi pria?
- 11) Bagaimana dengan dana operasional untuk sosialisasi KB Pria?
- 12) Apa saja media penyuluhan KB Pria?
- 13) Seberapa sering anda melakukan sosialisasi KB Pria kepada masyarakat?
- 14) Berapa jumlah kelompok Prio Utomo di Kecamatan Wonokerto?
- 15) Pernahkah anda mengajak akseptor Pria untuk menjadi motivator?

2. Pertanyaan untuk Sub Klinik Desa (SKD) atau PPKBD

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A. Variabel Karakteristik Masalah

a. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana karakteristik masyarakat di desa anda?
- 2) Bisakah anda menjelaskan profesi para pria di desa anda?
- 3) Mengapa masyarakat di desa anda lebih memilih pekerjaan sebagai nelayan?

b. Sifat Populasi

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di desa anda?
- 2) Bagaimana budaya yang berlaku dalam keluarga nelayan di desa anda?
- 3) Bagaimana kebiasaan ber-KB masyarakat di desa anda?

c. Derajat Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana pengetahuan masyarakat di desa anda tentang Program KB?
- 2) Bagaimana anda memotivasi para pria di desa anda untuk ber KB?

B. Variabel Daya Dukung Peraturan

a. Integrasi Organisasi Pelaksana

Pertanyaan :

b. Rekrutmen dari Pejabat Pelaksana

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana pendapat anda tentang Program KB?
- 2) Apasaja tugas anda sebagai SKD?
- 3) Seberapa sering pertemuan SKD di tingkat kecamatan?

4) Bagaimana Penyuluh KB mengevaluasi kinerja anda?

c. Akses Formal

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana keberadaan kelompok KB Pria di desa anda?
- 2) Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok tersebut?

C. Variabel Non Peraturan

a. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kelompok Sasaran

Pertanyaan :

- 1) Bisakah anda menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di desa anda?
- 2) Bagaimana struktur kehidupan para nelayan?
- 3) Bagaimana keberadaan kelompok nelayan di desa anda?
- 4) Bisakah anda menjelaskan siapa tokoh yang berpengaruh bagi para nelayan?
- 5) Bagaimana tingkat pendapatan nelayan?

b. Sikap Kelompok Sasaran

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana pendapat para pria di desa anda tentang MOP?
- 2) Bagaimana pendapat para pria di desa anda tentang Kondom?

c. Dukungan Kewenangan

Pertanyaan :

-

3. Pertanyaan untuk Kepala Desa

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A. Variabel Karakteristik Masalah

a. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana karakteristik masyarakat di desa anda?

- 2) Bisakah anda menjelaskan profesi pria di desa anda?
- 3) Mengapa masyarakat di desa anda lebih memilih pekerjaan sebagai nelayan?

b. Sifat Populasi

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di desa anda?

B. Variabel Non Peraturan

a. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kelompok Sasaran

Pertanyaan :

- 1) Bisakah anda menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di desa anda?
- 2) Bagaimana struktur kehidupan para nelayan?
- 3) Bagaimana pendapatan para nelayan?
- 4) Bagaimana keberadaan kelompok nelayan di desa anda?
- 5) Bisakah anda menjelaskan siapa tokoh yang berpengaruh bagi para nelayan?
- 6) Bagaimana tingkat pendapatan nelayan?
- 7) Bagaimana pemberdayaan untuk kelompok nelayan?

b. Dukungan Kewenangan

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana pendapat anda tentang Program KB?
- 2) Bagaimana keterlibatan anda dalam Program KB?
- 3) Bagaimana dukungan anda terhadap program KB?

4. Pertanyaan untuk Tokoh Agama

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A. Variabel Non-Peraturan

c. Dukungan Kewenangan

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana Program KB dari sudut pandang agama islam?
- 2) Bagaimana hukum kontrasepsi mantap dalam agama islam?
- 3) Bagaimana keterlibatan anda dalam program KB?

5. Pertanyaan untuk Pria Usia Subur

Nama :

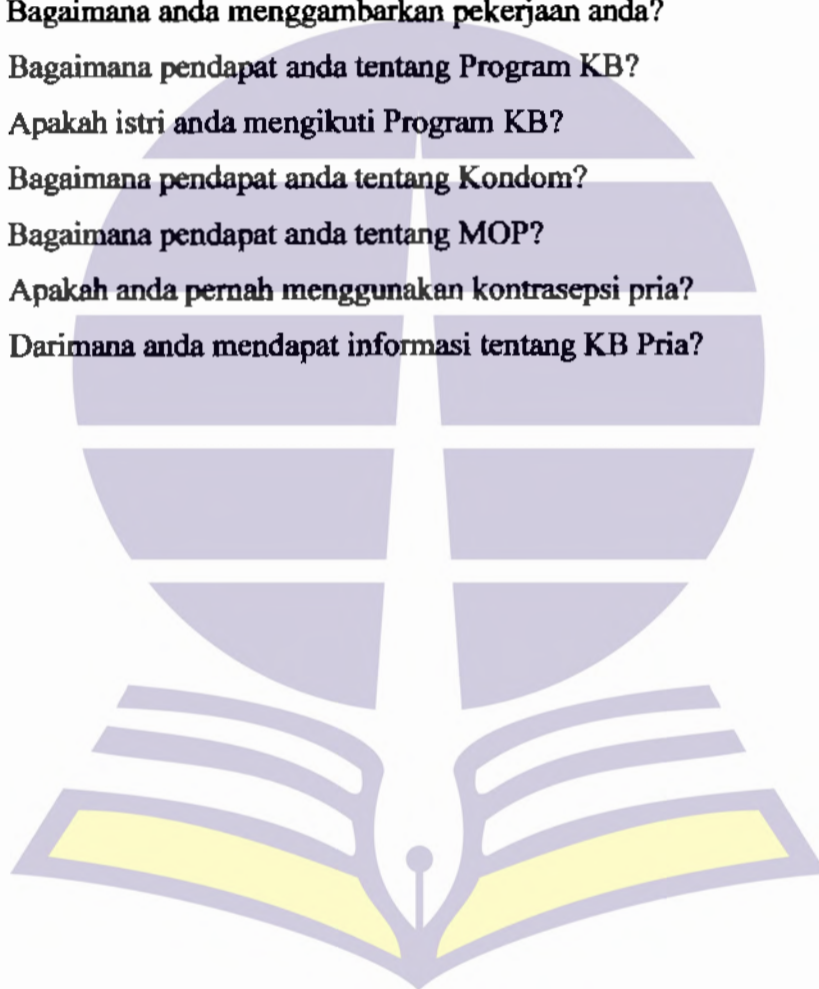
Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Pertanyaan :

- 1) Apa pekerjaan anda?
- 2) Bagaimana anda menggambarkan pekerjaan anda?
- 3) Bagaimana pendapat anda tentang Program KB?
- 4) Apakah istri anda mengikuti Program KB?
- 5) Bagaimana pendapat anda tentang Kondom?
- 6) Bagaimana pendapat anda tentang MOP?
- 7) Apakah anda pernah menggunakan kontrasepsi pria?
- 8) Darimana anda mendapat informasi tentang KB Pria?



Lampiran 2. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati Proses Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Capaian Kesertaan KB Pria di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan yang meliputi :

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik Proses Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Capaian Kesertaan KB Pria Di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan.

B. Aspek yang diamati :

1. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - a. Karakteristik pria di Kawasan Pesisir
 - b. Tingkat Pendidikan masyarakat di Kawasan Pesisir
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Program
 - a. Kondisi Puskesmas di masing-masing Kecamatan di Kawasan Pesisir
 - b. Akses Pelayanan KB Pria
3. Proses Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana dari Tingkat Kabupaten hingga Tingkat Desa
4. Kendala-Kendala yang menyebabkan rendahnya capaian KB Pria

REDUKSI DATA

1. Implementasi Program KB Pria di Kawasan Pesisir

A. Variabel Karakteristik Masalah

a. Sub-variabel Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Informan	Pertanyaan 1. Karakteristik masyarakat pesisir
IP 16	Kalo secara karakter umum kepribadian mereka kadang keras, yang jelas keras untuk perihal kekeluargaan itu kadang keras dan juga ya...kesannya. ndak semua si Cuma orang itu, yo dapat uang trus pulang istilahe untuk seneng-seneng itu ndak Cuma kadang ada yang beberapa memikirkan untuk pendidikan anaknya, itu ada memang. Istilahe koyo gambarane orang Wonokerto ki isine yo foya-foya, per tahun hampir milyaran dana. Tapi ndak, karakter mereka ada yang baik ada yang kurang lah istilahe. Ndak semua.
IP 17	InshaAllah sebetulnya Wonokerto Kulon itu karakternya lemah lembut mbak, hanya karena mereka itu melaut, gitu kan, nelayan itu ketika dilaut itu kan suara..kalo saya di darat bisa dengan suara seperti ini tetapi di laut nggak bisa,.. Ya, akhirnya ya dibawa ke darat karena mereka hampir 90% hidupnya kan ada dilaut. Jadi ketika mereka bicara kayak gini dilaut itu kan pada kenceng akhirnya juga sama-sama ketika di darat ya kayak gitu. Jadi nanti orang yang melihat orang lain atau orang luar Wonokerto yang melihat orang-orang nelayan saling berbicara ketika didarat itu kayak orang bertengkat itu karena suaranya kenceng-kenceng padahal mereka bicara biasa karena mungkin juga gurauan-gurauan ketika dilaut karena semuanya laki-laki kan karena di laut bebas bergurau kan mungkin ya terbawa kebiasaan itu di darat. InshaAllah ya masyarakat pantai itu masyarakat Wonokerto Kulon itu ya lemah lembut, gotong royongnya bagus apalagi dengan kondisi desa yang seperti ini memang dibutuhkan semangat kebersamaan itu.
IP 19	Karakteristik nya orang sini itu orang nelayan semua ya, orangnya keras. Kalo saya langsung ke masyarakat nelayan itu agaknya ya diterima tapi ya ita tok. Jadi betul kalo dipandang jauh-jauh itu keras-keras kalo nggak pernah ketemu ya wah ngeri sekali. Tapi kalo kita menelusuri setiap hari ya ndak papa. Nyatanya kegiatan apa disini ndak ada yang negatif.
IP 3	Kalo menurut saya, e, masyarakat pesisir itu ya keras, kemudian itu agak cuek-cuek gitu.
IP 23	Karena masyarakat Api-Api itu terdiri dari beberapa elemen ya, diantaranya nelayan, kalo nelayan kan njenengan tau sendiri kan katanya keras. Kalo karakter yang agak condong ke agama itu masyarakatnya yo biasa-biasa aja, dalam artian kalo yang agama ngurusi agama dan sosialnya. Kalo nelayan keras, dia kerasnya keras baik Bu, bukan keras yang jelek tapi keras yang kompak.
IP 27	Walaupun mereka bahasanya kasar, tapi sebenarnya hatinya baik. suara keras karena terpengaruh dari suara mesin, karena tidak ada pantulan. Jadi mereka itu kalo ngomong keras tapi sebenarnya hatinya juga ndak keras seperti pembicaraannya.

IP 25	Karakteristik masyarakat desa Api-Api dan desa Pecakaran karena itu berbatasan dengan laut dan pesisir, dia itu kebanyakan orangnya orang nelayan semua. Kebanyakan orang nya tidak dirumah, jarang dirumah bapak-bapaknya, dan dia itu karena biasa dilaut orangnya keras, kalo bicara nadanya tinggi, kenceng karena biasa di lepas pantai. Orange ki nek didelok lebih keras kalo dibandingke dengan yang bukan nelayan. Koyok sangar-sangar padahal yo tidak.
IP 26	Orangnya sebenarnya baik-baik, tapi kan sedikit keras.
Informan	Pertanyaan 2. Profesi Pria di Kawasan Pesisir
IP 19	Semua nelayan, tani ne ki sitik. Ini ya, generasi yang ini itu semuanya masuk ke nelayan semua. Paling nggak 70%, pokoknya kita sudah ngalih ke arah situ semua.
IP 17	Mayoritas nelayan, kira-kira 85%
IP 16	Tratebang 90% nelayan mbak, local maupun yang besar istilah sampe keluar propinsi itu 90% nelayan karena yang 10% itu daratan seperti buruh trus guru, TNI juga ada disini
IP 12	Yo campur-campur. Sebagian besar malah perantauan, hampir 50% perantauan. Petani paling 25% tapi y owes berkurang, wong sawahe keno Rob si. Kalo nelayannya sedikit, paling 10%.
IP 14	Mayoritas nelayan bu
IP 23	Wah kalo sini hampir 60-70% nelayan, petani tambaknya 30%
Informan	Pertanyaan 3. Mengapa masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto lebih memilih pekerjaan sebagai nelayan?
IP 19	Waktu ekonomi itu terbagi dari tambak, sekarang tambak mati kena rob, pertaniannya juga kena rob, jadi anak-anak kami yang muda itu masuk semua jadi nelayan.
IP 20	Gampang bu, tanpa modal, Cuma modal tenaga sehat
IP 26	Gampang Bu, pergi gak bawa apa-apa, pulang bawa uang
IP 23	Kebanyakan karena terpengaruh, biasanya kan gini Bu ceritanya itu yang bagus-bagus, bukan jeleknya. Sedangkan melihat hasilnya kalo pulang bawa uang bisa mau beli apapun.

b. Sub-variabel Sifat Populasi

Informan	Pertanyaan 1. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir di Kecamatan Wonokerto
IP 19	Tamat SMP sudah melaut bu, la gimana lapangan kerja disini nggak ada, adanya Cuma itu.
IP 20	Saiki sekolah SMA banyak, kalo yang perguruan tinggi bisa diitung pake jari. Kalo nelayan SD, SMP. Yang nahkoda SD rak tamat bu.
IP 17	Nelayan itu rata-rata SMP, karena melaut itu tidak butuh ketrampilan khusus kayak bekerja di darat.
IP 16	Kalo nelayan yang tua SD nggak lulus
IP 1	Pokokke 15 taun bu, wong lulus SD kadang melu wong tuwone ngelaut.

IP 23	Minimal SMP. Biasanya kalo SMP sudah lulus, nganggur dulu nunggu usia 17 tahun terus ikut melaut.
	Pertanyaan 2. Budaya Keluarga Nelayan Kecamatan Wonokerto (A.b.2)
IP 16	Kalo pekerja nelayan yang katakan besar, 4 bulan atau 3 bulan sekali pulang ataupun yang luar propinsi itu bisa dibilang kalo habis idul fitri desa ki desa rondo, karena semua bapak-bapaknya melaut. Memang kebanyakan seperti itu karena SDM mereka kita harus bener-bener sedikit demi sedikit mengasih penjelasan bahwa yo kerja ndak harus neng laut semua, atau yang diutamakan kalo kita sering ngomong sama bapak-bapak, tulung lah anakke njenengan minimal itu bisa sampe sarjana, diusahakan maksimal dalam pendidikan.
IP 20	Setaun pisan nanggap orkes bu, kebanyakan kokui. Wong omahe do kelem ki motore loro opo telu bu. Kalo hasile banyak yo tuku motor, ada yang beli mobil jugak. Hasil mancing e akeh bu, makane cah nom mesti nek hari raya do nanggap orkes dek duit sisihan kui, sistime gotong royong nggo nanggap orkes.
IP 1	Wong nek ngambeng utowo walimahan sakniki ibu-ibu. Kadang-kadang lebaran bek orak ono, do melu kontrak.
IP 2	Ibu-ibue mbatik tulis bu. Jadi dibawa pulang, kayak saya habis nganter sekolah, kan mengerjakan rumah dulu, nanti baru mbatik. Satu kemejan paling murah itu empat puluh.
	Pertanyaan 3. Kebiasaan ber-KB masyarakat pesisir Kecamatan Wonokerto (A.b.3)
IP 13	Disini paling banyak suntik bu, jalur B.
IP 14	Kalo cari akseptor MKJP susah, banyaknya suntik sama pil
IP 20	Sini banyaknya suntik bu, kesadaran sendiri. Kalo implant sama MKJP harus dioprak-oprak. Disini kalo habis melahirkan langsung suntik bu, tapi nanti berhenti, "aku tak mendeg bu, bojoku urung muleh, nelayan, pak melu meneh nek bojoku pak bali". Wong kene ki kokui bu, nek melu suntik mengko leren, ngko pan bojone pak bali, mboh tengah wengi bidane di dodog nyong pak suntik KB, bojoku pak bali.
IP 2	Kalo istri KB ndak papa, maksude ada si yang beberapa nggak boleh, tapi yo istrinya do nyolong jadi suaminya ndak tau. Nanti kartu kb nya dititipkan neng nggon sedulure, ngko seng ngilike yo sedulure kae.
IP 1	Nek badhe kb mboten angsal kaleh jalere, tapi kan estrine do nyolong-nyolong.
IP 3	Untuk partisipasi kb pria memang sangat kurang sekali. Dia memang cenderung kalo kb yang disuruh KB ya wanitanya kecuali kalo memang wanitanya itu sudah punya anak banyak kemudian tidak bisa menggunakan kontrasepsi yang lain mungkin kondom dia masih mau, kalo MOP memang kurang diminati.
IP 9	Kalo nelayan nggak KB ndak papa, masalahe pertemuane jarang.
IP 26	Kalo suaminya pergi ya nggak KB. Nanti kalo pulang kurang seminggu kan sudah bel-bel an ra baru ikut suntik.

c. Sub-variabel Derajat Perubahan Perilaku yang diharapkan

Informan	Pertanyaan 1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Program KB (A.c.1)
IP 7	Yo ora kaiki nggo nggawe ngarang-ngarangi peranakan jare. Kekerepen do bae bebane tambah akeh.
IP 4	Wong niku kangge pengaturan lare. Umpami gadhah lare kathah tapi nopo niku nek masalah pangan nggeh saget siyam tapi kan perawatane niku seng angel
IP 23	Jaga jarak kelahiran
IP 24	Denger-denger manfaatnya ya untuk mengatur kelahiran, untuk kesehatan, tapi itu kan cuman analisa ya, tapi semua kan Allah yang ngatur.
	Pertanyaan 1. Cara memotivasi pria di kawasan pesisir Kecamatan Wonokerto (A.c.2)
IP 3	Yo banyak-banyak penyuluhan mbak, tentunya kepada calon akseptor nggeh. Penyuluhan tentang MOP itu tidak menyebabkan lemes dan nanti diceritakan memakai KIE kit itu, kemudian motivasinya itu bersama-sama dengan orang yang sudah ikut MOP dan tidak terjadi kasus apa-apa, karena yang sudah melaksanakan kan luweh enak daripada saya petugas.
IP 1	Mboten nate penyuluhan seng jaler, wong ora mesti ketemu bapak-bapak. Soale nek nelayan ki do sibuk sendiri-sendiri.
IP 2	Selama ini saya belum pernah, wong ngumpulin orange susah, jarang dirumah. Kalo ABK selama dirumah ya cari kerjaan lain.
IP 26	Ndak khusus dikumpulkan, paling guyon-guyon, kae wedokmu penyakiten varises, mbok kowe po'o seng melu.

B. Variabel Daya Dukung Peraturan

a. Sub-variabel Integrasi Organisasi Pelaksana

Informan	Pertanyaan 1. Kerjasama dengan mitra dalam pelaksanaan program KB Pria (B.a.1)
IP 3	Kerjasama dengan puskesmas untuk pelayanan KB itu sudah ada jadwalnya tiap hari rabu haik di KKB 1 dan 2 untuk MKJP. Tapi untuk yang Pil, Kondom dan Suntik bisa setiap hari. Kalo untuk MOP, belum ada tenaga atau dokter yang dapat melayani MOP.
IP 25	Yo kalo ada pelayanan yo, sebelumnya kami harus konsultasi kesana dulu, karena disini Puskesmasnya itu kondisinya itu ijek didandani, kondisinya banjir. Jadi siap tidaknya di Puskesmas kita harus kesana dulu untuk menyiapkan, kalo bidannya sudah siap baru akseptornya kita calling.
	Pertanyaan 2. Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kewenangan atau mitra di Kecamatan maupun di Desa (B.a.2)
IP 3	- Dengan Pak Camat, tentunya kita setiap ada kegiatan mesti koordinasi dengan Pak Camat, begitu juga ke Desa, kalo ada moment-moment tertentu atau kegiatan sesuatu apapun mesti koordinasi dulu dengan kepala desa. - Tokoh agama itu kita koordinasi istilahnya advokasi ya memberikan biar

	<p>dia itu mendukung program KB, kita pendekatan untuk dia misalnya didalam tokoh agama itu kan misalnya kegiatan di Mushola itu dia bisa menyampaikan tentang program KB, kemudian di acara hajatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terus terang saja untuk di Kecamatan Wonokerto yang saya alami memang untuk tokoh nelayan nya saya belum begitu ada koordinasi ke tokoh nelayan. - Untuk kelompok keagamaan setiap tahun kita laksanakan dalam moment-moment seperti Bhaksos Muslimat dan Aisyiyah. - Koramil itu biasanya pada waktu bhaksos TNI kemudian Polsek pada waktu Bhayangkara itu tiap tahun sekali nggih.
IP 25	<ul style="list-style-type: none"> - Ya kita selalu koordinasi dengan Pak Camat, selaku kepala wilayah di kecamatan sini, sebulannya ya kita ada Rakor bersamaan dengan rapat dinas, dari situ kita menyampaikan program kami. - Kalo Rakordes, itu dari kecamatan kita bawa ke desa. Nanti di desa, masalah-masalahnya kan berbeda-beda itu, nanti dipecahkan di Rakordes masing-masing. - Selama ini kok kami belum pernah mendekati pada kelompok-kelompok nelayan yang ada karena kelompok nelayan itu kan menemuinya sulit, soalnya beberapa bulan mau pulangnyanya kan belum tentu, jadwalnya itu yang sulit.

b. Sub-Variabel Rekrutmen dari Pejabat Pelaksana

Informan	Pertanyaan 1. Pengetahuan Kader Tentang Program KB (B.b.1)
IP 20	KB kui jareku biso nggo ngatur ekonomi, anak sedikit bisa nyekolahke sampe perguruan tinggi ngaten.
IP 14	KB niku kangge ncegah kelahiran untuk jangka panjang.
IP 13	Kalo KB menurut saya wong itu mengatur jarak kelahiran si bukan apa berarti mencegah seseorang itu mempunyai anak, cuman mengatur jarak kelahiran supaya mereka itu bisa ngopeni yang besar, kalo pingin punya anak lagi kan sudah siap segala sesuatunya, kayak gitu.
IP 26	Yo meringankan beban, koyomono meringankan beban keluarga biar lebih sejahtera.
	Pertanyaan 2. Apasaja tugas SKD (B.b.2)
IP 14	Yaa pendataan, mencari akseptor baru, penyuluhan masalah KB dan Posyandu
IP 20	Tugasnya untuk mencapai akseptor baru, la kui karo ngoprak-oprak yang belum ikut saya ajak ikut KB
IP 13	Ya..memotivasi seseorang untuk ikut KB, untuk mengatur jarak kelahiran itu tadi. Kalo KB kan tidak hanya meliputi KB tok yo, disitu kan mencakup keseluruhan, pendidikannya ada, tentang balitanya ada, lansi, remajanya, bumilnya disitu kadang disinggung juga kan, semuanya..bagaimana dia setelah melahirkan harus ikut KB apa.
IP 26	Pendataan, menulis laporan R/1/PUS

	Pertanyaan 3. Bagaimana memantapkan komitmen para SKD di desa (B.b.3)
IP 3	SKD tiap bulan ada pertemuan rutin, biasanya kegiatannya sesudah tanggal 25 nggeh. Kemudian pertemuannya itu bergilir ke desa-desa, kegiatan tersebut biasanya SKD memberikan laporan hasil akseptor baru pada bulan itu nggeh, kemudian kegiatan kami juga mengevaluasi hasil-hasil kegiatan dari bulan tersebut kemudian merencanakan akan ada kegiatan apa untuk bulan yang akan datang.
IP 25	Pertemuan SKD setiap bulan di kecamatan. Isinya ya evaluasi, rencana kegiatan bulan ini dan menanggulangi masalah-masalah di desa masing-masing.
	Pertanyaan 4. Bagaimana bentuk pembinaan kepada SKD (B.b.4)
IP 13	Diberi target, harus mencapai target berapa, untuk e..apa ya..kan misale yang suntik harus dapat berapa, di evaluasi, tapi paling tinggi juga paling 75 atau 80, itupun KB-KB tertentu.
IP 20	Yo apan Bu Susi dapat laporan dari Kabupaten pokokke disampaikan karoan SKD. Trus dievaluasi.
IP 14	Ngisi laporan C1, nyuwun potokopi saking PLKB, laporan tiap bulan pas pertemuan
IP 26	Kalo ada informasi dari Kabupaten disampaikan dan evaluasi

c. Sub-Variabel Akses Formal

Informan	Pertanyaan 1. Keberadaan Kelompok KB Pria di Kecamatan Wonokerto (B.c.1)
IP 3	Untuk di Kecamatan Wonokerto karena memang peran prianya itu sangat minim jadi untuk Prio Utomo itu sementara tidak berjalan dengan baik mba karena memang peserta prianya itu sangat sedikit.
IP 25	Desa Api-Api sama Desa Pecakaran itu Prio Utomo nggak ada soalnya disana peserta KB nya jarang, jadi belum terbentuk.
	Pertanyaan 2. Pembinaan kepada Kelompok KB Pria (B.c.2)
IP 3	Ya mestinya yang ikut KB Pria itu dikumpulkan kemudian tidak menutup kemungkinan dengan orang-orang yang belum ikut KB Pria juga karena disitu kan bisa ngomong-ngomong bertukar pengalaman nantinya bisa sampe kesitu. Yang belum ikut MOP misalnya atau yang belum pernah pake Kondom biar mengikuti KB Pria tersebut.

C. Variabel Non Peraturan

a. Sub-variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Kelompok Sasaran

Informan	Pertanyaan 1. Tingkat Pendapatan Nelayan (C.a.1)
IP 2	Targetnya lima bulan, kalo yang biasa paling ya tiga bulan. Ada lagi yang ke pacitan Cuma setengah bulan dapatnya Cuma limaratus. Setengah bulan Cuma limaratus bu!! Kalo istrinya nggak bisa mbatik ya susah, anaknya nangis dikunci dirumah biar nggak jajan. Ada sumbangan, mau nengok orang sakit, ada orang beranak, pasti kan ngasih gula walaupun sekilo, gimana coba bu, sirahe mumet bu. Kalo ABK

	<p>yang kontrak bon dulu paling 1,5 juta satu orang selama melaut 3 bulan. La nanti istrinya ngebon ke warung-warung. Gini bu, kalo ndak ada batik bu susah. Jarebasan nglilir cekelane kompor nggo mbatik, nek telong ndino, rong ndino entuk seket kan mlayan keno nggo nyambung nggo tuku bumbon, tuku trasi, nggo nggawe ngelong utang. La nek ora kokui yo ora njajan pancen. La nanti kalo pulang nanti cok mboten nutup, yo pancen tah cok ada yang dapat lebih, tapi kan paling beberapa orang. Satu kapal itu buruhnya ato ABK nya tigapuluh, nahkodanya satu. Nahkoda nanti dapatnya 10, ABK dapat 1. Pembagiannya kan kayak gitu. Nanti kalo kepengkok ya yang nanggung jurumudi. Misalkan ABK sudah kasbon sama juragan trus nggak nutup itu nanti yang menutup semua itu ya Jurumudi bu, sebab kakak saya ya kayak gitu.</p>
IP 19	<p>Itu kan cari untung ya, tapi kalo saya itung-itung rata-rata itu sebulan bisa dapat lima jutaan. Kalo tiga bulan kurang lebih 15 juta. Kalo mau berangkat nelayan bon dulu minimal 2 juta nek wonten nomone notaris lima juta, nanti kalo pulang yo dipotong, pan olehe sitik yo njabus. Mangkate jare nggo ninggali ngomah nggo tuku pancing. Berarti paling-paling bu setiap harine ora nono limapuluh, tapi itu kan pendapatan dari jaring. Sampingannya kan mancing, ya hasile sampe 20 juta, ikannya dijual di kapal situ.</p>
IP 17	<p>Tapi yang ABK biasa ini yang secara ekonomi bisa dibilang agak dibawah karena mereka kalo misalkan melaut sampe 4 bulan hanya dapat bagian, bagian dari melaut itu, paling ya maksimal itu satu juta itu sudah luar biasa bagus. Cuma mereka dilaut itu mancing, nah pendapatan dari mancing itu yang banyak. Ya malah justru dari bagian dia melaut sebagai ABK malah jauh, apalagi untuk menghidupi keluarga itu e...boleh dibilang nggak ketemu nalar, cuman karena dilaut mereka mancing dan biasanya mancing itu dapatnya banyak sampai ya...jual ikan dari mancing itu sampai puluhan juta.</p>
IP 16	<p>Kalo di Tratebang sendiri kalo kondisi ekonomi itu sebenarnya sekitar 80% itu masih dibawah, istilahe standar lah. Kalo kita dengan patokan rata-rata UMR di Kabupaten 1,4 juta itu kalo bisa dimasukkan ke khususnya nelayan, karena disini kan mayoritas nelayan, itu masih standar UMR, tapi ada yang lebih banyak seperti nelayan lokal dibawah. Mereka paling bisa pemasukan bersih itu dibawah 70 ribu. Per hari. Perhari dibawah 70 ribu. Tapi kalo misal nelayan yang besar itu sekali pulang itu 4 bulan sekali itu bersih dapat 3 juta, tetapi kalo kita bagi dengan harian, kebutuhan harian trus lain-lain, itu sebenarnya mines. Nah, jadi bisa dibilang untuk standar ekonomi atau penghasilan warga itu masih dibawah garis. Kadung dapat katakan 5 juta atau 4 juta empat bulan sekali sekarang kita ambil contoh seperti rumah tangga yang masih belum ada anak ataupun anak satu itu seharusnya saja kalo untuk konsumsi trus kegiatan sehari-hari itu hampir atau kita harus punya uang sekitar 200 ribu dan sedangkan pemasukan dari pekerjaan kan nggak nyampe. 4 juta selama 5 bulan dibagi saja per 30 hari, itu seperti itu. Kita memang disini rata-rata masih dibawah.</p>
IP 26	<p>Yang sregep yo mancing. Kalo mancing kan dapat 10, 15 sampai 30 juta. Kalo yang ndak ya biasa, 2-3 juta, itu kan bagen hasil.</p>
IP 23	<p>Sebenernya kalo murni dari hasil tangkapan nelayan di laut itu sebenarnya belum seimbang dengan apa yang dikeluarkan, cuman</p>

	<p>sekarang kan kebanyakan mancing. Jadi mancing itu kadang kita dengan modal yang cukup besar hasilnya juga besar. Tapi kan tenaganya kan terkuras, harus begadang, harus sabar, itu kemarin banyak yang dapat sampai 30 juta. Kalo dari hasil tangkapan jaring dan pembagian hasil paling diangka 2 juta</p>
IP 27	<p>Gini, kita bicara dengan Cakalang sendiri itu kalo 4 bulan pulang itu paling dapatnya lima juta , itu sudah termasuk bagus. Jauh dari UMK kan? Apalagi yang ini, nelayan <i>Gempluk</i>. Itu mangkat Subuh, muleh jam 2 po jam 3 ulihe 20 ewu, dapatnya teri, itupun ndak mesti</p>
	<p>Pertanyaan 1. Struktur Kehidupan Nelayan (C.a.2)</p>
IP 17	<p>Ya, nelayan itu ada beberapa tingkatan. Sana misalnya di grup sana ada yang namanya, secara materi sebagai nelayan yang punya jenjang bagus itu nahkoda, jurumudi itu, trus istilah kedua kan wakil nahkoda, ada yang motorist bagian mesin, itu ya lumayan lah kehidupannya. Tapi yang ABK biasa secara ekonomi bisa dibilang agak dibawah.</p>
IP 27	<p>Kalo disisi pembagian memang kalo sini bahasanya kalo Nahkoda itu dapat tiga bagian kalo pulang, kalo kedua, wakil nahkoda dapat dua bagian, motorist 1,5 bagian. Itupun ada bagian penata jaring, penata tali atau tambang, penata batu, juru masak, itu memang ada bagiannya sendiri dan berbeda, ada tambahannya seperempat dari ABK. Kalo ABK Cuma dapat 1 bagian.</p>
IP 23	<p>Ada Nahkoda, trus yang kedua itu wakil nahkoda, trus ada kepala mesin, juru arus itu tugasnya di bawah laut menata jaring, trus ada yang mencari ABK, dan itu bagiannya masing-masing.</p>
	<p>Pertanyaan 3. Keberadaan Kelompok Nelayan di Kecamatan Wonokerto (C.a. 3)</p>
IP 16	<p>Ada kelompok sekitar 4. Kalo namanya sendiri saya kurang paham, yang jelas ada 4 kelompok dan semua belum berbadan hukum, karena kembali lagi dengan kesadaran mereka. Dadi seng jenenge kelompok berbadan hukum, mereka Cuma berfikiran ribet, ndadak perbulan buat laporan, NJOP ada. Padahal kan dari sana kalo misal kui sudah berbadan hukum akan diringankan, seperti bantuan pun lebih gampang. Lah kemarin aku juga wes istilah ngomong karo beberapa kelompok, “wes ngene Pak, sampeyan nggaweo badan hukum karena dari situ njenengan pak opo jenenge nek ono bantuan-bantuan dan opo gampang”. Trus masalah administrasi yang terkait opo kui laporan bulanan atau apa, kita InsyaAllah bantu dari perangkat, tapi perangkat ndak bantu secara langsung nyetorke. Kita jadi misalkan sampeyan punya anak, kita tuturi anakke kon. Heeh, kita nanti satu dua kali kita dampingi, priye carane kalo ada kendala yo kita tetep dampingi, jadi ndak lepas, jadi eman-eman mbak kadang dari kemarin pun aku diminta untuk e, badan hukum badan hukum, eh ndak ada karena yo bingung si arep opo, trus mereka juga bingung.. satu kelompok anggotanya ada yang 10 ada yang 15, kalo perahu-perahu disini sekitare 40an ada, tapi itu data tahun 2015.</p>
IP 17	<p>Ada HNSI mba, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.</p>
IP 20	<p>Ada lima kelompok, satu kelompok anggotanya 20 orang</p>
IP 23	<p>Waduh, kelompok nelayan itu ada lumayan si, lebih dari lima, kalo saya ndak condong itunya. Karena kalo saya, KUB (Kelompok Usaha</p>

	Bersama) nelayan itu sudah pasif.
IP 27	Ada tiga kelompok kalo ndak salah, KUB. Satu kelompok biasanya kan anggotanya minimal itu kan 10. Kalo di pantai sana sudah ada 1 kelompok, kalo disini ada dua kelompok. Kan dulu dapat bantuan kapal nelayan, perahu kecil, kalo orang sini namanya Cukrik, itu dapat kalo ndak salah 4 unit.
	Pertanyaan 4. Tokoh yang berpengaruh bagi nelayan (C.a.4)
IP 16	Sebenarnya ada, tetapi kalo misal amit sewu berbicara dengan ruang lingkup kedalam istilah dengan kepribadian mereka masing-masing atau ke egoan mereka masing-masing kadang malah si tokoh, ada beberapa tokoh malah istilah malah membuat modus tersendiri, kadang gitu, jadi sing tadinya itu dipercaya malahan seakan-akan manglehe rodo ngendo karena tingkah polahnya sendiri. Nah seperti contoh kenapa tidak terjadi sampe pembuatan kelompok yang berbadan hukum, salah satunya seperti itu, jadi ada tokoh tapi ndak terlalu berperan, kalo nelayan. Untuk hal-hal yang lain, la itu mbak karakteristiknya nelayan itu ego nya juga tinggi, keras, kemudian kadang rumongso biso.
IP 27	Yang jelas nahkodanya. Ya karena bagaimanapun status itu biasanya berpengaruh, karena nahkoda itu pimpinan nelayan.
IP 20	Yo jurumudi ne ra mbak. Trus Suroto kae, Tiban kan itu jadi...malah sosialisasi nggak mesti Pak Lurah, dia-dia dulu
IP 23	Nahkodanya, Powernya itu ada di Nahkoda, karena seakan seperti raja.
	Pertanyaan 5. Pemberdayaan Nelayan (C.a.5)
IP 17	Ya banyak si lewat Dinas Kelautan itu termasuk yang bantuan-bantuan untuk meningkatkan taraf hidup. Kegiatannya ya biasanya bantuan alat tangkap, ada juga yang dikasih perahu. Disini itu ada satu yang sudah terbentuk Koperasi, tapi saya lupa namanya, sudah ber RAT dan sudah berbadan hukum.
IP 16	Kalo yang nelayan pemberdayaan paling ya sosialisasi di Dinas Kelautan, rata-rata cara menangkap ikan atau dengan istilah tanpa harus merusak terumbu karang itu kan seperti itu ndak ada istilah belum ada solusi bahwa selain nelayan nek biso yo diusahakke apa yang bisa menunjang ekonomi di darat. Karena nanti kalo bener-bener dihapuskan alat tangkap kita itu ya otomatis kebanyakan warga malah akan keluar kota, dadi nggotone ibarate cari ikane yo diluar, melu kapal gedi, daripada disini juga susah si alat tangkapnya seperti itu kan ndak memenuhi. Jaringnya itu jenise jenis nyantrang, benangnya nilon tapi istilah lebih berat ngerucut, jadi ditarik itu seperti yo anulah caduk, ditarik belakangnya kerucut, tapi kalo itu istilahnya dilarang karena semua ikan kena dengan diameternya sedikit la kalo sekarang gantinya kan pake nilon seperti anu senar layangan, la itu nek dilaut yo kurang bisa maksimal karena ndak tenggelam jadi juga ngambang dan diameternya jarak, kotakan satu jaringnya besar-besar, 4 inc, ikan yang gede khususnya 4 kilo keatas bisa nyambut kalo nggak yo enggak ya lolos otok. Hasil tangkapan jelas menurun, bahkan ini sudah dapat bantuanpun kebanyakan ndak dipake masih negat pake cantrang, curi-curi. Tapi kalo disini pegawai perikanan sini masih toleransi dengan kearifan lokal, kalo

	kita ikut dengan peraturan yang diatas ya otomatis langsung sanksi, penjara 2 tahun lah.
IP 23	Bantuannya mesin, jaring, yang susah itu perawatannya. Tapi kalo lewat kelompok saya nggak respon. Mereka itu kebanyakan karena SDM ada banyak kekeliruan cara pengelolaannya, cara pengertiannya. Itu yang saya bilang keras, kalo kita kasih masukan belum tentu mau. Dan saya sendiri dengan yang namanya KUB masih trauma, masih males, makanya saya harap kalo pemerintah mau kasih bantuan nelayan jangan berbentuk kelompok.
IP 27	Nelayan sendiri itu ka nada wadahnya, namanya HNSI, kadang ada pembinaan dari dinas kelautan. Kalo nahkoda kan gini, masalahnya kan nahkoda itu belum tentu SDM nya mumpuni. Kebanyakan gak sekolah bisa jadi nahkoda karena faktor pendidikan tidak berpengaruh di nelayan, terutamanya adalah pengalaman.

b. Sub-Variabel Sikap Kelompok Sasaran

Informan	Pertanyaan 1. Pendapat pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto tentang MOP (C.b.1)
IP 2	Bilangnya MOP lemes Bu, istrinya yang bilang. Istrinya Pak Kasdi itu buleknya saya.
IP 12	MOP iso nduwe anak Bu, La kae Caridan, kae malah perangkat sini dulu. Caridan kan kokui, kan seng dadi sasaran wedokke, dikiro selingkung neng ngendi, yo pok. Boro-boro kan wed podo ngertine operasi nganu dites ke neng kono, o, jebulno ucul, maune kan pak didakwo selingkuh.
IP 13	MOP nya dulu sini banyak, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada yang minat.
IP 14	Katanya kalo MOP untuk kerja berat katanya nggak boleh, bilanganya orang-orang itu.
IP 17	Ya barangkali memang nelayan itu kalo misalnya ke vasektomi itu kan pengetahuannya masih ...e, saya sendiri kadang-kadang gak bisa membayangkan vasektomi, gitu. Barangkali kenapa ketika para nelayan itu kok, karena mungkin awal pandangan bapak-bapak nelayan disini KB itu wedok mbak. Kalo vasektomi, mungkin para laki-laki butuh pengetahuan yang cukup untuk memahami vasektomi.
IP 7	Nek kulo kon KB mboten a...suko kawin maneh. Yo do ndongeng-ndongeng tab, jare di operasi kecil, dibundeli. Pernahe kok wong lanang kerjane berat kok dibundeli ngko pedhot nggagar. Kene kan wong nelayan nek candak ombak mboh opo kui kan ora ukuran kan kudu diangkat. Yo sebagian wong kota do ndongenge koyo kui dibundeli okui, yo wes sampeyan kerjane penak.
IP 5	Sepengetahuan saya ndak ada penyuluhan. La mungkin kalo ada paling sosialisasi tok, sekeadar. Trus kadang kan juga laki-laki nggak mau ngumpul mbahas kokui si, terlalu tabu. Ngertine kan kebanyakan KB niku cuman nggo gawe perempuan. Kalo KB nggo wong lanang nggeh paling pemakaian alat kondom niku. Yo paling mungkin kalo sudah banyak anak paling yo mau seng vasektomi
IP 4	KB Pria kulo mboten ngertos. Wong mboten nate nglampai niku

IP 10	Saya mau MOP karena saya mengikuti Program KB berencana daripada ibu ikut, orang payah kalo ibu ikut kan susah.
IP 15	Denger-denger dari seng bongstone seng agamane kenceng jare merubah anggota badan gitu nggak boleh.
IP 9	Jare efekke nggo kerja kok kurang. Maksud okie mbak, seng mbiyek-mbiyek wes tau ono seng dimodel kokui efek e neng tenogo mba.
IP 6	Mboten ngertos kulo
IP 27	MOP itu biasanya yang jarang, karena ketakutan biasanya. Ada yang pernah terjadi itu sudah nggak berfungsi. Kemudian kembali dilepas, operasi lagi, bahkan orangnya jadi stress. Stress karena itu masalahnya, itu kan kebutuhan biologis si ya, jadi kan kepikiran.
IP 26	Ah sungkan, barange ora tangi ngko
IP 18	Riyin koyo kui akhire masalah, niki malah RT ne kidule Pak Lurah. Pendarahan, kulo wedi kui. la seng ngongkon ngejak-ngejak kok, niku saestu, kulo waune SKD.
	Pertanyaan 2. Pendapat pria di Kawasan Pesisir Kecamatan Wonokerto tentang Kondom (C.b.2)
IP 15	Tanpa resiko
IP 7	Nek kondom mboten penak jarene, kurang romantis.
IP 2	Katanya pake kondom pedes, itu keluhan istrinya.
IP 22	Saya ndak masalah pake kondom. Cuman istri kok mintanya dia aja yang KB.
IP 26	Kesuwen. Ono seng ikut tapi kab beli sendiri, malu nggak ngomong.
IP 27	Pernah make. Nek nyaman dan tidaknya persepsinya manusianya masing-masing ya, kalo saya ya nyaman.
IP 23	Kalo Kondom saya nggak suka, nggak enak aja, beda rasanya.

c. Sub-variabel Dukungan Kewenangan

Informan	Pertanyaan 1. Pendapat tentang KB (C.c.1)
IP 27	Yak..yak...yak.. saya kira itu bagus mbak. Sejauh memang apalagi kondisi nelayan itu kan memang pendapatannya kan nggak tentu kan, mereka tergantung kondisi lautnya, kalo lautnya memang yo corone persediaan ikan disana pas melimpah ya dia..maka kan pengaturan kelahiran anak itu seyogyanya memang dibutuhkan.
IP 20	Kalo saya punya pendapat gini Bu, tadi kan saya sudah matur ya kalo banyak anak banyak rejeki, la maksud saya ya kalo warga kami saja misalkan cukup dua anak gitu ya perawatannya mudah bu, itu yang jelas.
IP 16	Kalo pendapat saya untuk program KB ya ndak masalah, karena untuk membatasi opo jenenge kelahiran. Kalo saya si khusus desa Tratebang ndak masalah karena kelahiran kalo misal orang yang berfikir secara perekonomian atau pikir pribadi mereka sendiri mereka akan tau, akan bisa ngatur kelahiran.
IP 22	Sebenarnya kalo saya alhamdulillah orang pemerintahan itu paham dalam arti wong saya sendiri juga pas istri mau KB kui malah saling

	menawarkan diri ngono lo, seng arep KB aku opo njenengan.
IP 23	Kalo KB sebenere bagus Bu, istri saya juga KB juga
IP 27	Sebenere program KB itu bagus, kalo pendapat saya karena apa meminimalisir pertumbuhan penduduk terutama kan taraf ekonomi nelayan biasanya kan taraf ekonomi yang paling rendah. Pendapatannya tidak menentu, dengan adanya program KB ya mestinya penduduk yang ada di desa semut itu untuk kebutuhan sehari-hari kan lebih ringan dibandingkan kalo anak banyak, disamping itu pendidikan, karena kemajuan kan tidak seperti jaman dulu, kalo pendidikan dikesampingkan, kalo sekarang kan tidak seperti itu, minimal kan sekarang yang namanya sekolah SMA sendiri kan sudah gratis, paling kan kebutuhan buku, sepatu dan seragam.
	Pertanyaan 2. Keterlibatan dalam Program KB (C.c.2)
IP 11	Ndak pernah dilibatkan dalam penyuluhan
IP 21	Kan bagian KB wes ono dewe bagiane Bu, koyo kene Bu Karomah
IP 22	Beberapa kali, soale sebenere KB itu kan untuk keadministrasian saya juga sering tanya SKD. Secara hirarki pekerjaan ada hubungannya, walaupun tidak full, paling setengah tahun sepisan.
IP 16	Kalo seng jelas kalo untuk pertemuan itu kan kadang disini melibatkan PKK, saya sering ada, disitu mendengarkan. Ikut dilibatkan mungkin dalam pengertian seperti itu. Tapi kalo dalam pengenalan KB atau prosedur KB kebetulan rumah saya kan untuk Posyandu, itu malah lebih sering sama bidan desanya. Jadi bidan desanya kadang pas nerangkan apa, aku neng kono.
IP 20	Dilibatkan, kalo ada pertemuan dan ada waktu Bu Lurah tak suruh datang.
IP 23	Kadang, tapi sayanya males. Kalo saya jujur bu ya, saya cemplang cemplung ngomong tapi kalo saya disuruh ngomong serius gitu saya males. Tapi saya sangat ndukung program KB.
IP 27	Perangkat desa dan PKK dilibatkan semua
	Pertanyaan 3. Bentuk Dukungan Kewenangan. (C.c.3)
IP 17	Ya jelas itu fasilitasi, disini kan ada Posyandu dan sebagainya, ada kader-kader desa yang menangani itu, nanti ada stimulan untuk kegiatan-kegiatan itu.
IP 20	Nah bentuknya ya tetep saya sosialisasi kepada masyarakat, mengajak supaya ben berhasil Bu. Kalo di nelayan itu Bu ya kalo sudah tua, kalo dirumahnya nggak punya sisaan untuk masa depan ya susah. Makanya saya mendung sekali, tak paringi pandangan. Kalo untuk dukungan operasional belum ada. Soalnya kita sudah musyawarah di desa itu program Dana Desa itu diperuntukkan untuk infrastruktur semua.
IP 16	Jadi kita pendekatan untuk membatasi kelahiran anak, utowo arep anak akeh, ya itu tadi mbak kita kembalikan ke mereka, tapi ditunjang dengan perekonomian yang baik. kalo dukungan operasional kita ada untuk kader kesehatan, KB masuk didalamnya.
IP 21	Yo ndukung, tak kon do KB Bu. Nek kapan wonten kesempatan kulo ngomong soal KB, pas wonten acara tingkeban, mitoni, ngapati.

IP 23	Kayak Kampung KB kemarin pun saya dampingi, temen-temen tak suruh mendekat, temen-temen dari Posyandu, Perangkat tak suruh ndampingi semua. Kalo dukungan operasional kita belum, karena kita masih kebingungan tentang anggaran. Karena kalo kita mau ngambil dari DD, kita DD nya masih kewalahan untuk infrastruktur. Bisa untuk Posyandu, Cuma kita masih kewalahan di infrastrukturnya. Kita masih kesulitan, kita nggak tau nanti kalo semuanya sudah tertata, infra sudah tertata baru kita plotkan ke pemberdayaan masyarakatnya. Kalo untuk kader ada walaupun sedikit. Kita masih kebingungan Bu, jujur aja. Kita sebenarnya pingin mengadakan pelatihan-pelatihan, cuman pengadministrasiannya seperti apa. Daripada nanti kita kebingungan ya kita ambil yang simpel-simpel aja lah, untuk infrastruktur.
IP 27	Masuk dalam APBDes. Untuk honor kader atau SKD ada walaupun diambil per semester.
	Pertanyaan 4. Pendapat Agama terhadap Program KB
IP 11	Kalo itu bener-bener si manusianya itu kasarannya menjadikan tuhan mengatakan orang ini sudah tidak beranak lagi, lain halnya dengan KB yang pencegahan seperti kondom, suntik tiga bulan dan yang lain, kalo ini reproduksi bener-bener dihentikan sedangkan itu sel manusia yang diciptakan oleh Allah itu kan nantinya dirubah menjadi manusia dan sedangkan Rasulullah sendiri menyebarkan kepada umat islam itu kan akan membanggakan umatnya dengan banyaknya umat sehingga kan ada yang melakukan poligami dengan tujuan mereka ingin memperbanyak anak Cuma kan dari situ tidak menyusahkan si istri yang pertama kalo anaknya banyak tapi yang mengurus kan ibunya ada banyak juga. Kalo itu kan bener-bener suatu tindakan yang kalo perspektif saya kok melampaui dari, artinya kan kalo anak kan ada program ikhtiar seperti tadi, kalo ini kan lebih dari ikhtiar, artinya hal-hal yang masih ditolerir seperti tadi KB suntik, pil, kondom, itu kan kalo menghendaki beranak ya beranak kalo enggak Allah yang akan berupaya, misalkan orang itu minum Pil, kalo Allah menghendaki tiba-tiba malam itu dia tidak minum pil, trus laki-lakinya datang berhubungan kan hamil, ya manusia kan terserah Allah, lupa atau ndaknya. Gitu juga dengan suntikan tiga bulan, ketika dia ditakdirkan untuk hamil maka si dokter akan menyuntikkan yang satu bulan, sehingga dua bulan berikutnya dia kan ndak KB dan hamil lagi. Jadi gitu hal-hal yang mengakibatkan kelalaian itu mudah bagi Allah untuk membuat mereka hamil sekalipun mereka sudah ikhtiar, la dengan seperti ini, ya mungkin secara akal manusia, hebat, mantep lah pasti jaminan karena ibaratnya tuhan yang akan nganu sudah dijegal jadi kekuasaan Tuhan itu dijegal, ini kan bener-bener pencegahan agar Allah tidak membuat si orang ini hamil, jadi bener-bener melakukan perlawanan.
IP 18	Ndak papa, boleh. Neng kono memang ora kaiki memang ono kepentingan og, kepentingan nasional kok.
IP 21	La nek KB Pria kan otomatis ndak bisa. Nek wanita biasane jare dokter membahayakan yo maka dilakukan, dokter memutuskan kalo mengandung lagi membahayakan. Kalo KB perempuan sudah dibahas dan boleh untuk menjarangkan keturunan. Kalo KB Pria nek setau saya kok ndak boleh, kan mateni keturunan. tapi selanjutnya berkembange kan

	<p>sementara niki terus terang kulo meboten saget mutuske boleh atau ndak e. Pernah dulu memang ndak boleh kata Kyai Gito, beliau mengatakan haram dulu sekitar tahun 74.</p>
IP 22	<p>Sebenarnya tergantung pada niatannya dulu, kalau di kitab-kitab fiqih itu, apalagi untuk kompilasi hukum islam sekarang itu tergantung daripada niatannya. Kalo memang niatannya untuk memutuskan secara langsung dalam arti memutuskan garis keturunan jelas itu tidak diperbolehkan, tapi secara ijma' daripada ulama dari 90an sampai sekian itu kalo untuk mengatur atau interval kelahiran itu boleh, itu secara kompilasi hukum islam kan boleh. Itu kan memang sudah di golongan NU sendiri itu sudah ada Bahtsul Masa'il, pembahasan tentang permasalahan seng yang kira-kira memang hukumnya masih samar. Seperti KB sendiri kan masih samar. Tapi kan kalo dulu memang KB itu opo yo haram sebenarnya, cuman kan dilihat dari kemanfaatannya dulu, tetap ijma' kiyas para ulama menyatakan kalo itu untuk mengatur tentang keintervalan jarak kelahiran itu ndak masalah. Tetapi kalo memang punya niatannya itu saya sudah tidak mau punya anak, ataupun menolak dan kekhawatiran tentang , ah, jangan-jangan kalo saya punya anak banyak nanti tidak bisa menghidupinya, itu memang yang tidak diperbolehkan dalam agama seperti itu.</p> <p>Sebenarnya tergantung pada, kita balik kembali dari konteks atau situasi dan kondisinya dulu. Kan memang ada beberapa kasus misalkan, yang saya ketahui misalkan ini kalo hamil lagi akan menjadi kemudhorotan, itu boleh, itu secara ijma'nya. Tapi kalo asline yo, kalo kita balik kembali kepada asal usulnya memang tidak diperbolehkan tapi kita lihat islam itu fleksibel dalam konteksnya kita menuruti atau adaptasi dengan situasinya dulu, banyak manfaatnya atau banyak kemudharatannya dulu. Jika itu niatannya mau memutus keturunan ya tidak diperbolehkan. Jadi misalkan ada vasektomi ataupun e, coro gampang kalo perempuan yang pernah saya baca itu kan indung telur dibundeli kan seperti itu, itu kan butuh alasan yang tepat. Agama itu tidak mutlak harus haram semua itu ndak, makanya dalam fiqih itu memang sudah dibahas kasus seperti itu. Diperbolehkan tapi dengan alasan yang harus kuat. Tidak asal misalkan aku wes cukup anak dua misalnya, tak bundeli, kecuali dalam konteks itu tadi kemudharatan, misalkan kalo hamil lagi kok akan membahayakan.</p>
IP 24	<p>KB itu tergantung dari caranya ya. Kalo caranya memutus kelahiran itu haram, tapi kalau ada niat atau tujuan yang lain itu tafsir. Tafsir itu contohnya ada kelahiran tapi dibatasi. Dalam arti disekat, mengatur jarak, itu tidak apa-apa dengan tujuan kesejahteraan. Tapi kalo memang langsung tidak boleh ada kelahiran itu haram. Trus juga dari KB sendiri itu kan macam-macam ya ada yang secara kedokteran ada juga secara alamiah. Sama, dari kedokteran kalo yang saran-saran seperti itu ekstrim untuk memutus kelahiran itu ndak boleh, tapi kalao secara biasa itu tafsir. Tafsir ada yang boleh ada yang tidak. Kalo untuk steril, kalo tidak ada penyakit, langsung memutus garis keturunan itu haram, kecuali memang ada penyakit. Jadi harus ada alasan yang mendukung dan kuat.</p>

2. Implementasi Program KB Pria Di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan

a. Output Kebijakan Organisasi Pelaksana

1) Penyiapan Institusi Masyarakat Pedesaan

Informan	Pertanyaan 1. Dasar Peraturan tentang Peningkatan Partisipasi KB Pria
IP 3	Kok peraturannya saya kurang paham mba tentang itu
IP 25	Dasar peraturannya kok, belum pernah mendengar selama disini. Saya belum pernah
	Pertanyaan 2. Pedoman Penggarapan KB Daerah Pesisir
IP 25	Saya belum pernah dibekali untuk khusus daerah pantai gitu. Pokoknya saya dibekalnya umum.
IP 3	Selama ini belum pernah ada kegiatan yang khusus penggarapan daerah pesisir
	Pertanyaan 3. Institusi Masyarakat Pedesaan
IP 3	Institusi masyarakat pedesaan terdiri dari PPKBD atau SKD kemudian Sub PPKBD dan Kelompok Akseptor njih
IP 25	IMP terdiri dari SKD, Sub PPKBD dan Kelompok KB
	Pertanyaan 4. Keaktifan IMP
IP 3	Untuk PPKBD dan Sub PPKBD sebagian besar aktif
IP 25	Ya InshaAllah ada yang aktif ada yang tidak. Ya mungkin untuk SKD atau PPKBD aktif semua
	Pertanyaan 5. Keberadaan Kelompok KB Pria
IP 3	Untuk di Kecamatan Wonokerto karena memang peran prianya itu sangat minim jadi untuk Prio Utomo itu sementara tidak berjalan dengan baik mba karena memang peserta pria nya itu sangat sedikit.
IP 25	Desa Api-Api dan Desa Pecakaran itu Prio Utomo nggak ada soalnya disana peserta KB nya jarang. Jadinya belum terbentuk

2) Perencanaan Program KB Pria

Informan	Pertanyaan 1. Dana Operasional KB Pria
IP 3	Saya pikir kalo Cuma 150 ribu, itu kan dekne ora kerjo beberapa hari kan untuk makan kan ndak mencukupi. Kalo nek paling ora 500 yo rodok mending ketoe.
IP 25	Belum. Saya kok belum pernah mendengar ataupun menerima. La mungkin kalo ada ya saya nggak tau.
	Pertanyaan 2. Kerjasama dengan Mitra Kerja
IP 3	Sebetulnya disini belum ada tenaga yang untuk melayani MOP, belum ada dokternya yang khusus melayani kegiatan MOP tersebut.
	Pertanyaan 3. Pelatihan Peningkatan Partisipasi Pria
IP 3	Kalo pelatihan tahun 2016 dapat, 2014 kemudian saya tiga tahun berturut-turut itu latihan terus mba. Kemudian sudah lama sekali, sudah

	hampir 7 tahun saya nggak pernah pelatihan, jadi akhir-akhir kemarin aja. Tapi untuk fokus yang MOP ini memang saya pikir kurang.
IP 25	Ndak ada e
	Pertanyaan 4. Media Penyuluhan KB Pria
IP 25	Kalo rencana itu ya mungkin ada, tapi belum bisa melaksanakan

3) Langkah Operasional Penggarapan Daerah Pantai

Informan	Pertanyaan 1. Kegiatan Rakorcam
IP 3	Untuk Rakorcam sebulan sekali, kepala desa, tokoh masyarakat itu sebagian hadir dalam Rakorcam
IP 25	Setiap bulannya kita ada Rakor, bersamaan dengan Rapat Dinas. Disitu kami menyampaikan program kami.
	Pertanyaan 2. Kegiatan Rakordes
IP 3	Rakordes ya, walaupun disana tidak formal tirik-tirik gitu ya kemudian dikumpulkan seperti Pak Kades sama perangkat desanya kemudian SKD nggeh kemudian kader nanti berkumpul disitu.
IP 25	Kalo Rakordes, itu dari kecamatan kita bawa ke desa. Nanti di desa masalah-masalah di desa kan berbeda-beda itu, nanti dipecahkan di Rakordes masing-masing.
	Pertanyaan 3. Pendekatan dengan Kelompok Nelayan
IP 3	Sebetulnya untuk Kelompok Nelayan itu sudah ada dan saya tau itu biasanya kerjasamanya dengan Pertanian. Untuk saya sendiri sebagai Korlap KB ini untuk Institusi Nelayan kok belum ada kerjasama kesitu.
IP 25	Selama ini kok kami belum pernah mendekati pada kelompok-kelompok nelayan yang ada karena kelompok nelayan itu kan menemuinya sulit, soalnya beberapa bulan mau pulanginya itu kan belum tentu, jadwalnya itu yang sulit
	Pertanyaan 4. Sosialisasi KB Pria
IP 25	Selama saya disini, belum pernah memang. Saya belum pernah mencoba ngumpulin Bapak-Bapak untuk sosialisasi KB Pria. Kami belum mencoba.

